Pemerintah Daerah
Kabupaten Wajo

RANCANGAN AWAL
RPJMD
TAHUN 2025-2029



Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1 Latar Belakang ..... I - 1

1.2 Dasar Hukum ..... I - 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 7

1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 8

1.5 Sistematika Penulisan ..... I - 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah..... II - 1

2.1.2. Potensi Sumber Daya Air ..... II - 16

2.1.3. Berketahanan Energi, Air, dan Mandiri..... II - 30

2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas ..... II – 35

2.1.5. Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim ..... II - 40

2.1.6. Aspek Demografi ..... II - 49

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 52

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi ..... II - 52

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua ..... II - 57

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II - 58

2.2.4. Perlindungan Sosial Adaptif ..... II - 64

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ..... II - 66

2.2.6. Kelaurga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ..... II - 67

2.3. Aspek Daya Saing..... II - 68

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ..... II - 68

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ... II - 70

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II - 75

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ..... II - 76

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat dan Pertumbuhan Ekonomi..... II - 78

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro ..... II - 81
2.3.7. Daya Saing Iklim Investasi ..... II - 82
2.4. Aspek Pelayanan Umum ..... II - 83
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif ..... II - 83
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial. II - 88
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gender Kawasan..... II – 90
2.5. Indikator Kinerja Kunci ..... II – 92

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III - 2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III - 54
3.3 Kerangka Pendanaan..... III - 63

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV - 1
4.2 Isu Strategis Daerah ..... IV - 43

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 187
5.1 Visi 187
5.2 Misi 11
5.3 Tujuan dan Sasaran 11
5.4 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 11

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI - 1
6.1 Strategi Pembangunan ..... VI -1
6.2 Arah Kebijakan ..... VI - 4
6.3 Program Pembangunan Daerah ..... VI - 16

BAB VII PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII - 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII - 1
8.1 Indikator Kienerja Utama ..... VIII – 1
8.2 Indikator Kinerja Daerah ..... VIII - 2

BAB IX PENUTUP ..... IX - 1

BAB
I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis untuk memajukan daerah dengan memanfaatkan kewenangan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan menguatkan daya saing daerah, melalui peningkatan kualitas hidup dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di samping itu, pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hasil pembangunan di daerah harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pembangunan yang dilaksanakan dengan cermat dan terarah sehingga memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Hasil nyata yang dimaksud adalah terjadinya perbaikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kecerdasan, kesehatan dan kesejahteraan, baik individu maupun kolektif, sampai kepada terjadinya perbaikan lingkungan yang sehat dan memiliki daya dukung yang memadai di masa yang akan datang. Kondisi itu tercermin dari sasaran visi daerah di RPJPD dan sasaran Visi Indonesia Emas yang tertuang dalam RPJPN yaitu 1. Pendapatan perKapita setara dengan Negara Maju; 2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkuranga; 3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; 5. Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD, kondisi Kabupaten Wajo saat ini telah berhasil mencapai berbagai kemajuan yang menggembirakan. Namun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Wajo sebagai daerah yang nyaman bagi warganya. Hal itu tergambar dalam aspek-aspek berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Misi 1 yaitu Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Sejahtera, memuat 14 sasaran pokok dan 14 indikator. Dari seluruh sasaran pokok, 7 (tujuh) indikator berhasil tercapai dan 7 (tujuh) indikator lainnya belum tercapai.
2. Misi 2 yaitu Meningkatkan Jiwa Kemandirian Masyarakat memuat 3 (tiga) sasaran pokok dan 3 (tiga) indikator. Dari seluruh sasaran pokok, 2 (dua) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator lainnya satuan target dan data realisasi tidak sesuai.
3. Misi 3 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Baik memuat 5 (lima) sasaran pokok dan 5 (lima) indikator. Dari seluruh sasaran pokok 5 (lima) indikator tercapai.
4. Misi 4 yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan memuat 7 (tujuh) sasaran pokok dengan 10 indikator. Dari seluruh sasaran pokok 2 (dua) indikator tercapai, 2 (dua) indikator belum tercapai, dan dan 6 (enam) indikator tidak tersedia data realisasi.
5. Misi 5 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Berbasis Iman dan Takwa memuat 4 (empat) sasaran pokok dengan 4 (empat) indikator. Dari seluruh sasaran pokok 1 (satu) indikator tercapai dan 3 (tiga) indikator lainnya belum tercapai.

Hasil evaluasi terhadap capaian RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Misi 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah memuat 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator. Dari seluruh indikator 2 (dua) indikator berhasil tercapai dan 4 (empat) indikator lainnya belum tercapai.
2. Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman memuat 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator. Dari seluruh indikator 4 (empat) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator lainnya belum tercapai.
3. Misi 3 yaitu Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan memuat 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator. Dari seluruh indikator 1 (satu) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator lainnya belum tercapai.

4. Misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekomoni daerah yang merata dan berkeadilan memuat 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator. Dari seluruh indikator 5 (lima) indikator tercapai.

Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Wajo tahun 2025 - 2030 memuat Periode pertama dari pembangunan jangka Panjang Kabupaten Wajo adalah "Penguatan Fondasi Transformasi". Tahap pertama ini berfokus pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, serta penguatan keamanan dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi didukung oleh persiapan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang inklusif dan mengintegrasikan pusat-pusat produksi komoditas daerah, disertai dengan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan, memastikan kesinambungan dengan tahapan selanjutnya dan menguatkan pilar-pilar daya saing daerah.

Tahap pertama ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi jangka panjang daerah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dasar pembangunan sudah dipersiapkan dengan baik, dan bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan transformasi pada tahap berikutnya dalam RPJPD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang sudah mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah serta menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 154); dan
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Awal RPJMD sebagai dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yakni dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.

2. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, yakni dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045, yakni pada tahapan pertama dari pembangunan jangka panjang daerah periode 2025-2029 yang mengarahkan pada kebijakan Penguatan Fondasi Transformasi.
4. Dokumen KLHS, yakni dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.
5. Dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah tersusun, yaitu dokumen Manajemen Penanggulangan Bencana dimana paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah pengurangan risiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah untuk menyempurnakan rancangan teknokratik dengan mempertimbangkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rancangan Awal RPJMD ini disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mendorong pembangunan daerah yang terarah dan terencana, dengan memposisikan fungsi RPJMD sebagai peta jalan pembangunan daerah, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan terukur. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pembangunan.
2. Mewujudkan visi misi daerah, dengan menyajikan penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih periode 2025-2030.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

4. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memuat target-target pembangunan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, investasi dan pariwisata.
5. Menjamin ketersediaan sumber daya, dengan membantu perencanaan dan pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan berkelanjutan.
6. Memperkuat koordinasi dan sinergi, dimana RPJMD mendorong koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Transparansi dan akuntabilitas, dengan menjadikan RPJMD sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.5 Sistematika Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

Bab I **Pendahuluan** memuat latar belakang, dasar hukum yang relevan dan signifikan, hubungan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II **Gambaran Umum** menguraikan kondisi Kabupaten Wajo berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Selain itu bab ini menjelaskan mengenai standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo, serta BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Bab III **Gambaran Umum Keuangan Daerah** menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029.

Bab IV **Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab V **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran** menguraikan visi dan misi pembangunan daerah yang disertai dengan serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab VI **Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah** memuat strategi dan arah kebijakan daerah yang disertai dengan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab VII **Program Perangkat Daerah** menguraikan tentang program perangkat daerah yang disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bab VIII **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

Bab IX **Penutup** memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah

BAB
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

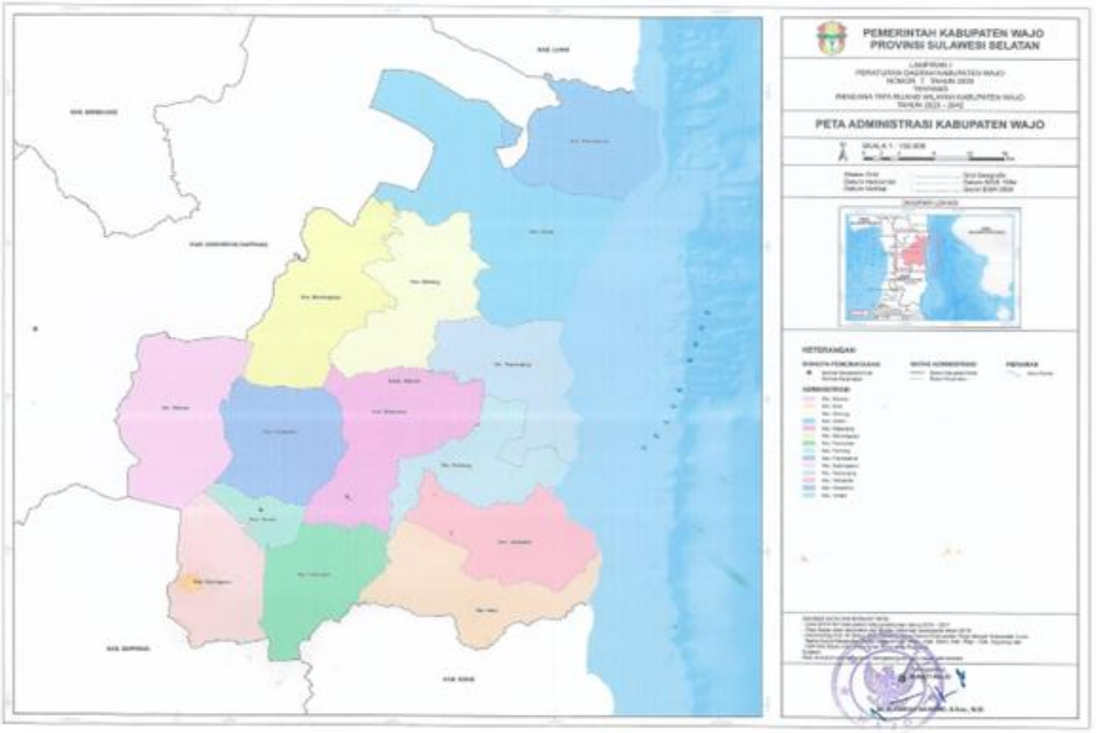
Kabupaten Wajo berada di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibukota Sengkang yang berjarak sekitar 200 hingga 242 km dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai Kabupaten Wajo, terdapat tiga jalur yang bisa ditempuh, yaitu melalui Camba (Kabupaten Maros), Bulu Dua (Kabupaten Soppeng), dan melalui Kota Parepare.

Kabupaten Wajo secara astronomis berada di antara 3º 39’ - 4º 16’ LS dan 119º 53’ - 120º 27’ BT. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di utara, Teluk Bone di timur, Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di selatan, serta Kabupaten Sidenreng Rappang di barat.

Luas Kabupaten Wajo mencapai 260.872 hektare, atau sekitar 4,17% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geostrategis, bagian selatan Kabupaten Wajo menjadi jalur transportasi antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Wilayah ini juga berfungsi sebagai daerah transit dengan akses ke beberapa daerah strategis, seperti Kabupaten Sidrap, Luwu, Toraja, dan Kota Pare-pare. Posisi yang strategis ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Wajo dalam mendukung mobilitas barang, jasa, dan orang.

Wilayah administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Keera seluas 37.412 Ha atau sekitar 14,34% dari luas Kabupaten Wajo, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Tempe dengan luas wilayah 4.692 Ha atau sekitar 1,80% dari luas wilayah Kabupaten Wajo.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Berdasarkan jumlah desa/kelurahan, maka Kecamatan Pitumpanua merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 27 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Maniangpajo merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit, yaitu 8 desa/kelurahan. Pembagian administrasi wilayah Kabupaten Wajo secara lengkap termuat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Wilayah Kabupaten Wajo menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Belawa	22.752	8,72%	6	3	9
2	Bola	17.864	6,85%	10	1	11
3	Gilireng	19.668	7,54%	8	1	9
4	Keera	37.412	14,34%	9	1	10
5	Majauleng	22.206	8,51%	14	4	18
6	Maniangpajo	22.652	8,68%	5	3	8
7	Pammana	15.444	5,92%	14	2	16
8	Penrang	13.839	5,30%	9	1	10

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
9	Pitumpanua	18.022	6,91%	23	4	27
10	Sabbangparu	15.338	5,88%	12	3	15
11	Sajoanging	17.375	6,66%	6	3	9
12	Takkalalla	16.743	6,42%	11	2	13
13	Tanasitolo	16.865	6,46%	15	4	19
14	Tempe	4.692	1,80%	0	16	16
Jumlah		**260.872**	**100%**	**142**	**48**	**190**

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

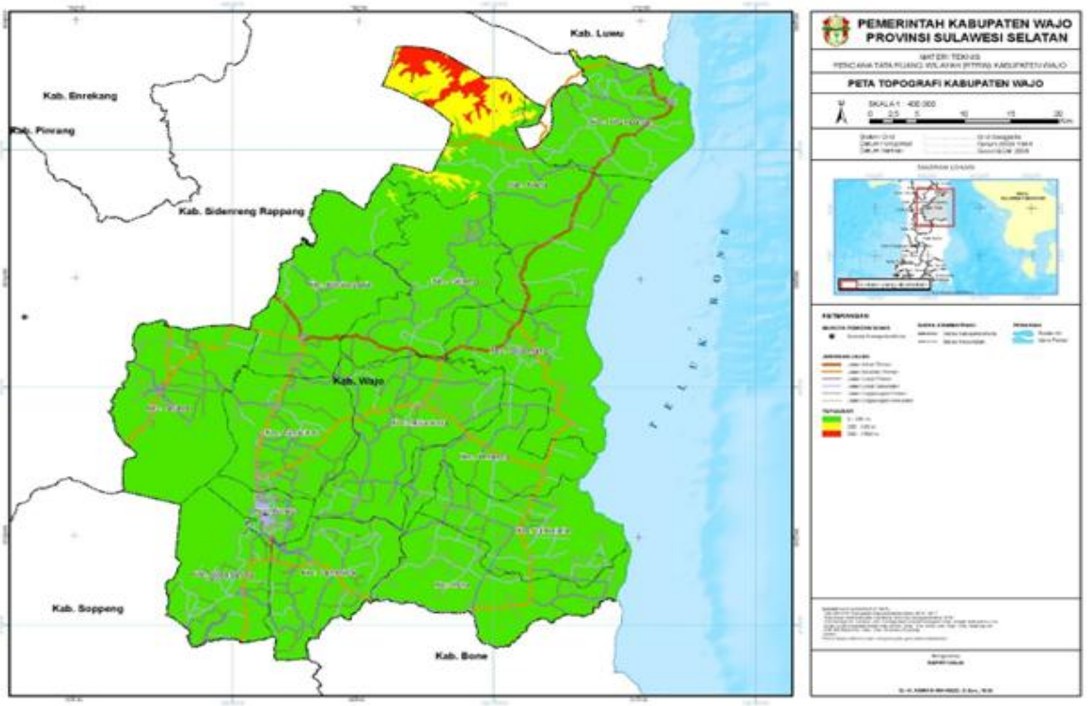
Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam kategori wilayah dataran rendah. Daerah ini memiliki tiga karakter lahan yang meliputi perbukitan, dataran rendah, serta laut dan danau, yang diilustrasikan dalam ungkapan Bugis, *mangkalungu ri bulue, massulappe ri pottanangnge, mattoddang ri tasie/tapparenge*. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Wajo memiliki 3 (tiga) dimensi lahan. Dimensi lahan yang pertama adalah tanah berbukit yang berjejer dari selatan ke utara, mulai dari Kecamatan Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, hingga Pitumpanua sebagai dataran tinggi. Kecamatan-kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta peternakan. Dimensi lahan kedua, yaitu tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat. Sedangkan dimensi lahan yang ketiga adalah keberadaan Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang di sepanjang pesisir Teluk Bone di sebelah timur. Keduanya merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak. Gambaran mengenai kondisi topografi Kabupaten Wajo diuraikan berdasarkan ketinggian, kemiringan, dan jenis tanah.

Ketinggian wilayah dari permukaan laut atau elevasi merupakan faktor pembatas alam terhadap pengusahaan tanaman di daerah beriklim tropis. Begitu pula pengaruh pembatas ketinggian akan banyak tampak pada temperatur atau suhu yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan. Secara morfologis Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl). Dalam menyusun penggolongan wilayah

tanah usaha, ketinggian wilayah dikelompokan ke dalam beberapa kelas, yaitu:

1. Ketinggian wilayah antara 0-7 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam kelompok tanah usaha terbatas.
2. Ketinggian wilayah antara 7-25 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha Ia dan Ib.
3. Ketinggian wilayah antara 25-100 meter di atas permukaan laut dikelompokkan ke dalam wilayah tanah usaha utama Ic.
4. Ketinggian wilayah antara 100-500 meter di atas permukaan laut, dikelompokkan ke dalam kelompok wilayah tanah usaha utama Id.

Gambar 2. 2
Peta Topografi (Ketinggian Wilayah) Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, mencakup 209.876,85 hektar atau 84,13% dari luas kabupaten. Wilayah dengan ketinggian di atas 100 meter mencakup 11.511,11 hektar atau 4,61% dari luas kabupaten. Informasi mengenai sebaran ketinggian dan luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Kabupaten Wajo menurut Ketinggian

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Sabbangparu	100 sampai 500 m	14,75	0,12%
		25 sampai 100 m	2.616,66	21,06%
		7 sampai 25 m	8.759,39	70,51%
		Rawa	1.031,25	8,30%
Luas Kecamatan Sabangparu			**12.422,05**	**100,00%**
2	Tempe	100 sampai 500 m	4,20	0,10%
		25 sampai 100 m	1.656,60	38,82%
		7 sampai 25 m	1.646,15	38,58%
		Danau	543,68	12,74%
		Rawa	416,74	9,77%
Luas Kecamatan Tempe			**4.267,37**	**100,00%**
3	Pammana	100 sampai 500 m	22,92	0,15%
		25 sampai 100 m	5.811,29	38,77%
		7 sampai 25 m	7.593,49	50,65%
		Danau	212,80	1,42%
		Rawa	1.350,56	9,01%
Luas Kecamatan Pammana			**14.991,06**	**100,00%**
4	Bola	25 sampai 100 m	4.290,87	24,23%
		7 sampai 25 m	8.975,95	50,68%
		0 sampai 7 m	1.026,73	5,80%
		Rawa	3.418,27	19,30%
Luas Kecamatan Bola			**17.711,82**	**100,00%**
5	Takkalalla	25 sampai 100 m	5.314,23	31,65%
		7 sampai 25 m	6.925,98	41,25%
		0 sampai 7 m	4.549,11	27,10%
Luas Kecamatan Takkalalla			**16.789,32**	**100,00%**
6	Sajoanging	25 sampai 100 m	3.294,17	19,03%
		7 sampai 25 m	5.603,08	32,36%
		0 sampai 7 m	8.417,31	48,61%
Luas Kecamatan Sajoanging			**17.314,56**	**100,00%**
7	Majauleng	100 sampai 500 m	396,92	1,80%
		25 sampai 100 m	13.926,50	63,13%
		7 sampai 25 m	6.809,87	30,87%
		0 sampai 7 m	71,39	0,32%
		Danau	31,85	0,14%
		Rawa	822,40	3,73%
Luas Kecamatan Majauleng			**22.058,93**	**100,00%**

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
8	Tanasitolo	100 sampai 500 m	343,06	2,26%
		25 sampai 100 m	10.414,03	68,46%
		7 sampai 25 m	2.598,88	17,08%
		Danau	349,61	2,30%
		Rawa	1.506,75	9,90%
Luas Kecamatan Tanasitolo			**15.212,33**	**100,00%**
9	Belawa	25 sampai 100 m	1.465,83	9,04%
		7 sampai 25 m	10.857,81	66,98%
		Danau	456,66	2,82%
		Rawa	3.429,42	21,16%
Luas Kecamatan Belawa			**16.209,72**	**100,00%**
10	Maniangpajo	100 sampai 500 m	1.788,01	10,41%
		25 sampai 100 m	13.731,92	79,98%
		7 sampai 25 m	1.261,46	7,35%
		Rawa	387,38	2,26%
Luas Kecamatan Maniangpajo			**17.168,77**	**100,00%**
11	Keera	> 500 m	96,92	0,34%
		100 sampai 500 m	5.405,88	18,74%
		25 sampai 100 m	9.293,56	32%
		7 sampai 25 m	7.618,70	26,41%
		0 sampai 7 m	6.432,98	22,30%
Luas Kecamatan Keera			**28.848,04**	**100,00%**
12	Pitumpanua	100 sampai 500 m	454,98	2,48%
		25 sampai 100 m	4.577,14	24,95%
		7 sampai 25 m	7.792,98	42,48%
		0 sampai 7 m	5.518,40	30,08%
Luas Kecamatan Pitumpanua			**18.343,50**	**100,00%**
13	Penrang	25 sampai 100 m	7.917,44	57,79%
		7 sampai 25 m	4.329,61	31,60%
		0 sampai 7 m	1.378,03	10,06%
		Rawa	75,49	0,55%
Luas Kecamatan Penrang			**13.700,57**	**100,00%**
14	Gilireng	100 sampai 500 m	2.983,47	14,64%
		25 sampai 100 m	16.210,20	79,53%
		7 sampai 25 m	1.189,11	5,83%
Luas Kecamatan Gilireng			**20.382,78**	**100,00%**
15	Danau Tempe	Danau	6.822,73	48,54%
		Danau1 1 meter	1.261,88	8,98%
		Danau2 2 meter	3.672,14	26,12%

No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	Persen (%)
		Danau2 2 meter	2.199,52	15,65%
		Danau2 7 meter	100,67	0,72%
Luas Danau Tempe			**14.056,94**	**100,00%**

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

Kemiringan lereng merupakan faktor fisik dalam perencanaan pembukaan suatu wilayah dan berpengaruh langsung pada usaha dan kegiatan penduduk. Dalam menyusun tingkat kemampuan dan kesesuaian tanah, kemiringan lereng dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu:

1. Wilayah datar, yaitu wilayah yang berlereng antara 0 - 2%.
2. Wilayah landai, yaitu wilayah yang berlereng antara 2 - 15%.
3. Wilayah agak curam, yaitu wilayah yang berlereng antara 15 - 40%.
4. Wilayah curam, yaitu wilayah yang berlereng lebih dari 40%.

Penyebaran luas wilayah menurut kelas kemiringan lereng di setiap kecamatan Kabupaten Wajo disajikan pada Tabel 2.3, yang menunjukkan bahwa proporsi wilayah datar sebesar 74,46% dari luas wilayah Kabupaten Wajo. Kelas kemiringan ini merupakan wilayah terluas untuk masing-masing kecamatan jika dibandingkan dengan kemiringan lereng yang lainnya. Adapun wilayah curam sebagian besar berada di Kecamatan Keera dengan luas 2.113,91 hektar atau 7,33% terhadap luas kecamatan.

Tabel 2. 3
Luas Wilayah menurut Kemiringan Lereng di Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
1	Sabbangparu	0-2%	9.677,68	77,91%
		2-15%	1.418,98	11,42%
		15-40%	293,99	2,37%
		Rawa	1.031,25	8,30%
Luas Kecamatan Sabangparu			**12.421,90**	**100,00%**
2	Tempe	0-2%	2.266,50	53,11%
		2-15%	901,38	21,12%
		15-40%	139,07	3,26%
		Danau	543,68	12,74%
		Rawa	416,74	9,77%
Luas Kecamatan Tempe			**4.267,37**	**100,00%**
3	Pammana	0-2%	11.942,52	79,66%
		2-15%	1.217,95	8,12%
		15-40%	267,40	1,78%

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
		Danau	212,80	1,42%
		Rawa	1.350,56	9,01%
Luas Kecamatan Pammana			**14.991,23**	**100,00%**
4	Bola	0-2%	14.060,21	79,38%
		2-15%	233,39	1,32%
		Rawa	3.418,27	19,30%
Luas Kecamatan Bola			**17.711,87**	**100,00%**
5	Takkalalla	0-2%	16.728,31	99,64%
		2-15%	60,94	0,36%
Luas Kecamatan Takkalalla			**16.789,25**	**100,00%**
6	Sajoanging	0-2%	16.377,62	94,59%
		2-15%	936,91	5,41%
Luas Kecamatan Sajoanging			**17.314,53**	**100,00%**
7	Majauleng	0-2%	19.311,90	87,63%
		2-15%	1.316,96	5,98%
		15-40%	555,92	2,52%
		Danau	31,85	0,14%
		Rawa	822,40	3,73%
Luas Kecamatan Majauleng			**22.039,03**	**100,00%**
8	Tanasitolo	0-2%	8.242,47	54,15%
		2-15%	4.466,21	29,34%
		15-40%	627,55	4,12%
		Danau	349,61	2,30%
		Rawa	1.536,50	10,09%
Luas Kecamatan Tanasitolo			**15.222,34**	**100,00%**
9	Belawa	0-2%	12.323,64	76,03%
		Danau	456,66	2,82%
		Rawa	3.429,42	21,16%
Luas Kecamatan Belawa			**16.209,72**	**100,00%**
10	Maniangpajo	0-2%	13.392,81	78,00%
		2-15%	1.738,83	10,13%
		15-40%	1.580,82	9,21%
		> 40%	70,83	0,41%
10	Maniangpajo	Rawa	387,38	2,26%
Luas Kecamatan Maniangpajo			**17.170,67**	**100,00%**
11	Keera	0-2%	20.030,98	69,44%
		2-15%	2.052,10	7,11%
		15-40%	4.651,11	16,12%
		> 40%	2.113,91	7,33%
Luas Kecamatan Keera			**28.848,10**	**100,00%**

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persen
12	Pitumpanua	0-2%	16.963,02	91,97%
		2-15%	638,83	3,46%
		15-40%	575,40	3,12%
		> 40%	266,33	1,44%
Luas Kecamatan Pitumpanua			**18.443,58**	**100,00%**
13	Penrang	0-2%	13.625,08	99,45%
		Rawa	75,49	0,55%
Luas Kecamatan Penrang			**13.700,57**	**100,00%**
14	Gilireng	0-2%	10.897,22	53,46%
		2-15%	5.115,28	25,10%
		15-40%	4.323,04	21,21%
		> 40%	47,09	0,23%
Luas Kecamatan Gilireng			**20.382,63**	**100,00%**
15	Danau Tempe	Danau	14.056,94	100,00%
Luas Danau Tempe			**14.056,94**	**100,00%**

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Jenis tanah merupakan aspek yang dapat menentukan potensi peruntukan suatu lahan, karena jenis tanah menentukan jenis tanaman apa saja yang sesuai dengan jenis tanah tersebut. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wajo antara lain aluvial, latosol, podsolik dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut mengenai sebaran geologi berikut ini.

Tabel 2. 4
Jenis Tanah di Kabupaten Wajo

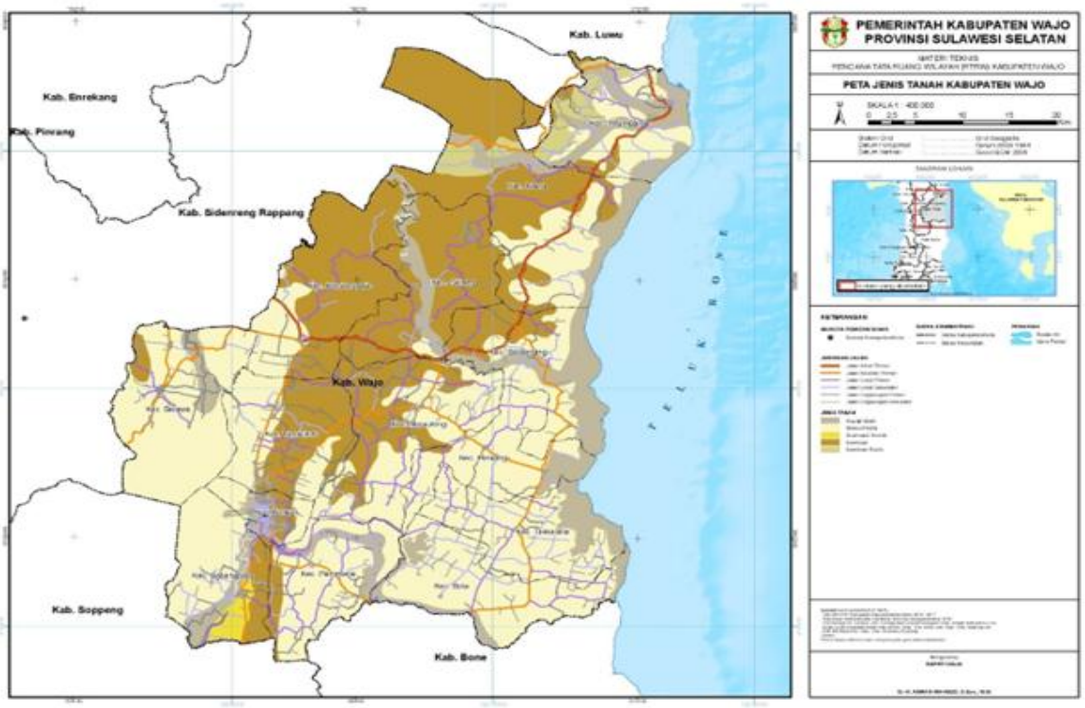
No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Typic Fluvaquents	18.695,75
2	Fluvaquentic Endoaquepts	14.232,07
3	Typic Endoaquepts	70.265,86
4	Typic Hapluderts	1.749,57
5	Typic Endoaquepts	19.497,81
6	Typic Endoaquepts	11.943,62
7	Typic Endoaquepts	13.993,05
8	Typic Eutrudepts	4.418,35
9	Typic Eutrudepts	1.471,18
10	Typic Dystrudepts	51.616,35
11	Typic Dystrudepts	18.302,48
12	Typic Dystrudepts	3.235,32
13	Typic Dystrudepts	1.984,07

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
14	Lain-Lain	19.296,50
15	Lain-Lain	658,70
Total		**251.360,68**

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Berdasarkan Tabel 2.4, sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Wajo adalah jenis *Typic Endoaquepts* seluas 70.265,86 Ha atau sebesar 27,95%. Ciri khas tanah jenis tersebut umumnya memiliki horison permukaan yang kaya bahan organik dan bersaturasi air serta mampu mengakumulasi bahan lepas atau liat yang terbawa oleh air. Umumnya tanah jenis *Endoaquepts* bersifat lembab dan cenderung memiliki kesuburan yang baik karena kaya akan kandungan bahan organik di horison permukaan.

Gambar 2. 3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Kondisi geologi Kabupaten Wajo diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi serta tinjauan stratigrafi dan struktur geologi. Tinjauan morfologi menguraikan tentang bentuk dan evolusi permukaan wilayah, sedangkan tinjauan stratigrafi dan struktur geologi menguraikan tentang lapisan batuan yang berada di bawah lapisan bumi.

Secara geomorfologis, wilayah Kabupaten Wajo dibedakan menjadi 5 (lima) satuan morfologi sebagai berikut:

1. Satuan dataran, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut antara 0-7 m dan terdapat hampir di seluruh wilayah yang membentang dari utara ke selatan dengan luasan mencapai 57,263 Ha atau sekitar 22,85%. Dominasi jenis batuan di wilayah dataran ini adalah jenis *alluvium* yang merupakan batuan hasil dari proses endapan tanah permukaan. Dalam klasifikasi sistem terbentuknya batuan tergolong jenis batuan termuda.
2. Satuan dataran bergelombang, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 8-25 m, terdapat di sekitar danau, rawa dan tepian sungai dengan luasan mencapai 94.539 Ha atau sekitar 37,72%. Jenis batuan di wilayah dataran bergelombang tersebut yaitu batuan lempung biru kehitaman, kenyal, pejal, keras serta merekah jika dalam keadaan kering, agak labil karena terdapat antiklin. Oleh karena itu perlu ada penguatan apabila akan dibangun pondasi bangunan gedung.
3. Satuan wilayah bergelombang hingga berbukit, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 25-100 m. Satuan wilayah ini terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Wajo yang luasnya 87.419 Ha atau sekitar 33,68%. Di wilayah ini ada beberapa jenis batuan diantaranya batuan lempung, lanau, pasir, kerikil dan sedikit batu gamping.
4. Satuan wilayah berbukit hingga bergunung, dengan ketinggian 100-500 m, terdapat di bagian utara dan sebagian kecil terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Wajo yang luasnya hanya 11.231 Ha atau sekitar 4,50%. Jenis batuan berstruktur konglomerasi batu pasir *glaukonit* dengan serpih *kaquina* dan *moluska*.
5. Satuan wilayah bergunung, dengan ketinggian di atas permukaan laut mencapai lebih dari 500 m, terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Wajo tepatnya di Kecamatan Pitumpanua yang memiliki luas sangat terbatas yaitu 167 Ha atau hanya sekitar 0,70 %. Jenis batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan pasir vulkanik.

Kondisi wilayah Kabupaten Wajo akan menentukan struktur batuan yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Peta Geologi Indonesia, Kabupaten Wajo mempunyai 3 (tiga) struktur batuan yaitu:

1. Daerah berstruktur batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik. Struktur batuan ini terdapat di bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gunung Rantekombola dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dengan struktur batuan Napal dan batu Gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua.
2. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir Glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang mempunyai ketebalan 100-500 m. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di wilayah Kabupaten Wajo, dan mempunyai luasan paling besar.
3. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi air laut dan tersebar di sepanjang pantai juga yang berasal dari endapan air sungai/danau yang mempunyai ketinggian kurang dari 25 meter di atas permukaan laut.

Adapun penjelasan mengenai sebaran kondisi geologi Kabupaten Wajo dapat dilihat dalam Tabel 2.5 dan Gambar 2. 5.

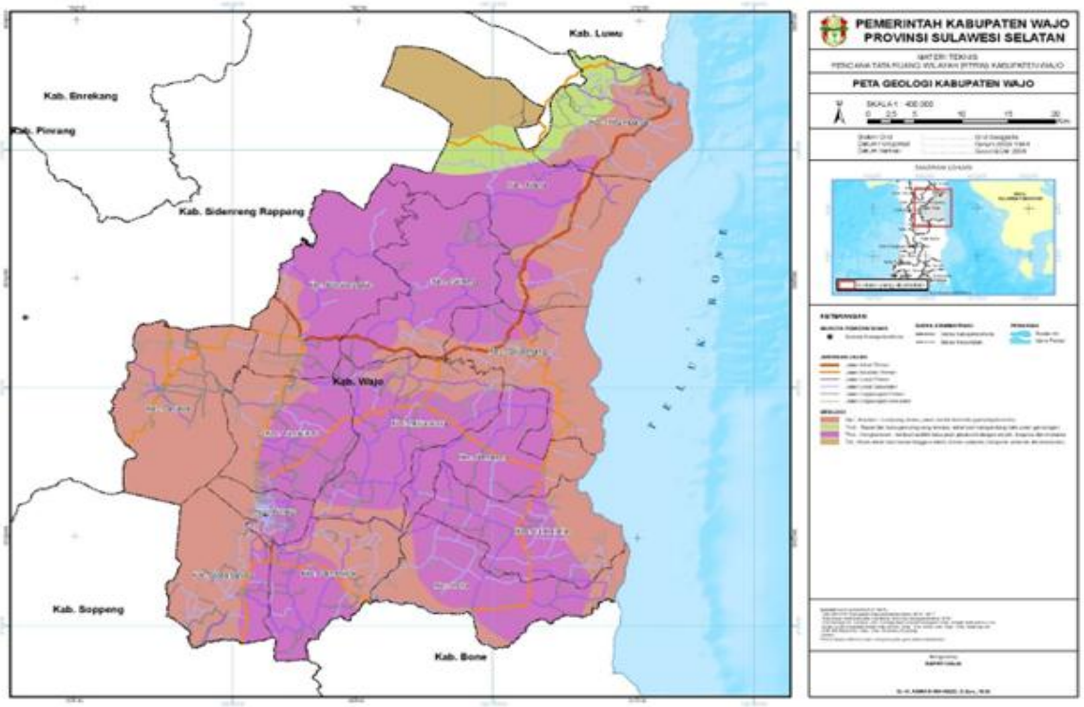
Tabel 2. 5
Kondisi Geologi Kabupaten Wajo

No	Uraian	Ketinggian	Lokasi	Luasan	Persentase	Jenis Batuan
Geomorfologi						
1	Satuan dataran	antara 0 -7 mdpl	hampir diseluruh wilayah yang membentang dari Utara ke Selatan	57.263 Ha	22,85%	alluvium
2	Satuan Dataran Bergelombang	antara 8 - 25 mdpl	disekitar danau, rawa dan tepian sungai	94.539 Ha	7,72%	batuan lempung biru kehitaman, kenyal, pejal, keras serta merekah jika dalam keadaan kering, agak labil karena terdapat antiklin
3	Satuan Wilayah Bergelombang hingga Berbukit	antara 25 - 100 mdpl	dibagian tengah wilayah Kabupaten Wajo	87.419 Ha	33,68 %.	batuan lempung, lanau, pasir, kerikil dan sedikit batu gamping

No	Uraian	Ketinggian	Lokasi	Luasan	Persentase	Jenis Batuan
4	Satuan Wilayah Berbukit hingga Bergunung	ketinggian 100 - 500 mdpl	dibagian Utara dan sebagian kecil terdapat di bagian Tengah wilayah Kabupaten Wajo	11.231 Ha	4,50 %.	batuan berstruktur konglomerasi batu pasir galukonit dengan serpih Kaquina dan moluska
5	Satuan Wilayah Bergunung	lebih dari 500 mdpl	Dibagian Utara tepatnya di Kecamatan Pitumpanua	167 Ha	0,70 %	batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan pasir vulkanik
Struktur Batuan						
1	Daerah berstruktur batuan aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik	ketinggian 500 mdpl	bagian Utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gn. Rante Kambola			
2	Daerah berstruktur batuan Napal dan batu Gamping	di daerah bawah yang berstruktur batuan lairan lava	Kecamatan Pitumpanua.			
3	Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir Glaukonit dengan, serpih kaquina dan moluska	100 - 500 mdpl	bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo			
4	Daerah Alluvial yang berasal selain dari hasil sedimertasi air laut	kurang dari 25 mdpl	tersebar disepanjang pantai juga yang berasal dari endapan air sungai/danau			

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Diolah)

Gambar 2. 4
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Keadaan hidrologi di Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh tipe iklim dan kondisi geologi wilayahnya. Hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai di Kabupaten Wajo, yang umumnya memiliki debit sedang hingga kecil. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah ini merupakan daerah tadah hujan dengan sistem sungai yang baik, aliran langsung ke laut, batuan dengan kelulusan sedang, serta curah hujan yang mendukung

Analisis hidrologi memberikan gambaran mengenai distribusi ketersediaan air tanah dan air permukaan di Kabupaten Wajo. Ketersediaan air ini sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang terserap di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan peta potensi air tanah yang dibuat oleh Dinas Pengairan Provinsi Sulawesi Selatan, ketersediaan air baku di Kabupaten Wajo tersebar dalam berbagai akuifer, yaitu:

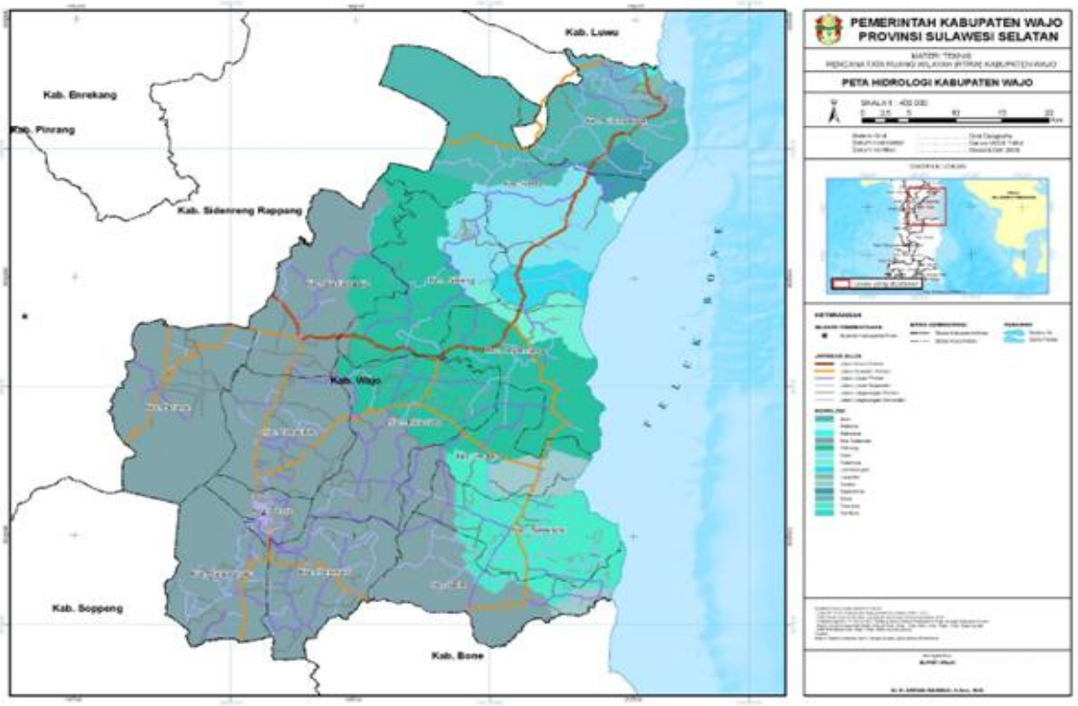
1. Wilayah endapan aluvial sungai dan pantai, sehingga muka air tanah dangkal di berbagai tempat tersusupi air laut. Kedalaman akuifernya kurang dari 15 meter dan cocok untuk pengembangan sumur gali dengan perkiraan debit hanya kurang dari 1 liter/detik.
2. Wilayah dataran endapan aluvial sungai dan pantai hasil gunung api formasi Camba dan formasi Walanae. Kedalaman akuifer 15-30 meter

dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dangkal dengan menggunakan mesin pompa kecil atau pompa tangan, dengan perkiraan debit kurang dari 1 liter/detik.

3. Wilayah dataran endapan aluvial dan *endapan hash* gunung api formasi Camba dengan lapisan akuifer cukup dalam antara 1-3 meter lapisan akuifer. Kedalaman akuifer antara 25-150 meter *dart* dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan menggunakan mesin pompa jenis rotary, dengan perkiraan debit antara 0,5-3 liter/detik.
4. Wilayah dataran aluvial sungai dan danau yaitu merupakan wilayah cekungan artesis pada formasi Walanae. Kedalaman akuifer antara 80-110 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan cara pemboran menggunakan mesin pompa jenis rotary. Perkiraan debit dapat mencapai lebih dari 3 liter/detik.
5. Wilayah dataran aluvial sungai dan danau yang merupakan wilayah cekungan artesis, endapan lapisan akuifernya cukup tua dan sebagai bagian dari formasi Walanae. Kedalaman akuifer antara 60-150 meter dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tanah dalam dengan cara pemboran menggunakan mesin pompa jenis rotary. Perkiraan debit mencapai antara 3-5 liter/detik.
6. Daerah endapan batu gamping sebagai anggota Taccipi dari formasi Walanae dan formasi Tonasa yang merupakan wilayah air tanah daerah karst. Sistem pemanfaatannya bisa diambil dari mata air dan aliran sungai bawah tanah dengan perkiraan debit cukup bervariasi/tidak menentu.
7. Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan air tanah atau biasa disebut sebagai *catchment area*. Sistem pemanfaatannya dapat diambil dari air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi, perkiraan debit tidak menentu.

Dalam upaya untuk memelihara keseimbangan ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Wajo, maka perlu mencermati sirkulasi air yang masuk (dalam bentuk curah hujan) dan jumlah air yang keluar melalui cara evapotranspirasi, pengisian air tanah *(groundwater recharge)* dan jumlah air yang mengalir sebagai *run off (surface and subsurface).*

Gambar 2. 5
Peta Hidrologi Kabupaten Wajo

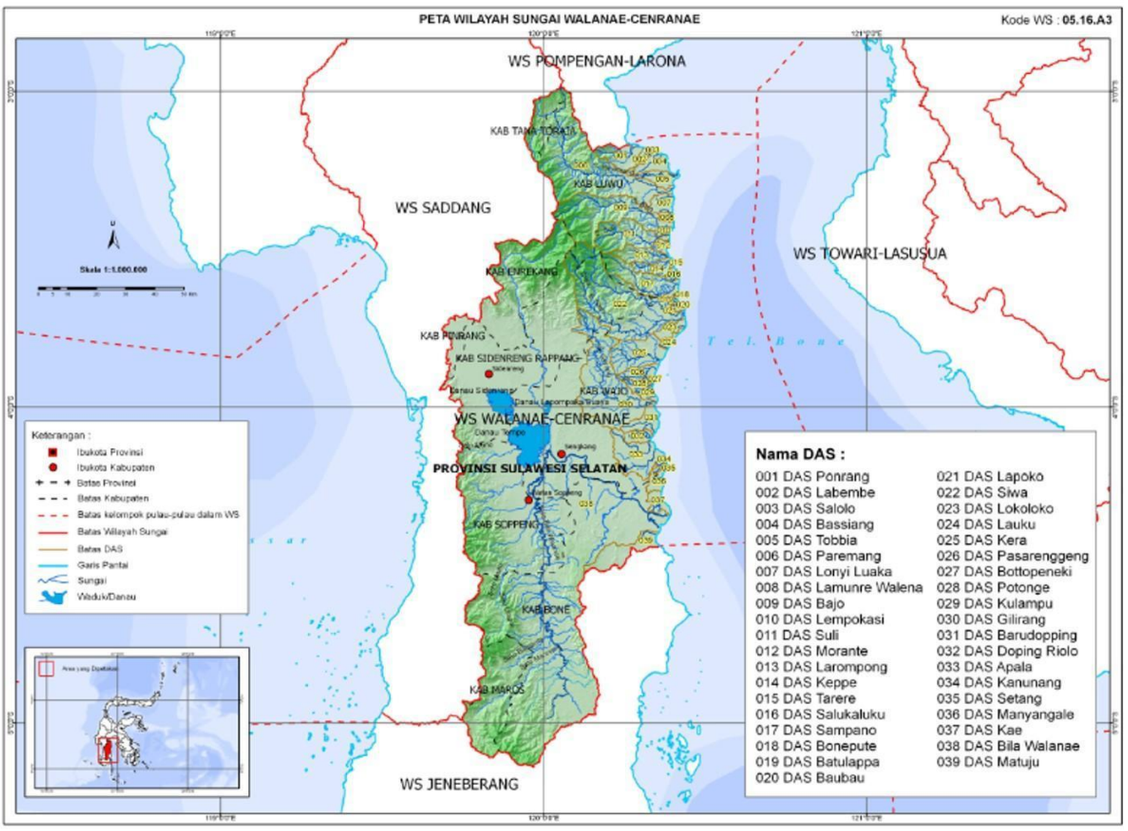


Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

2.1.2. Potensi Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air Kabupaten Wajo merupakan bagian dari Wilayah Sungai Walanae-Cenranae yang terletak di 9 (sembilan) kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros.

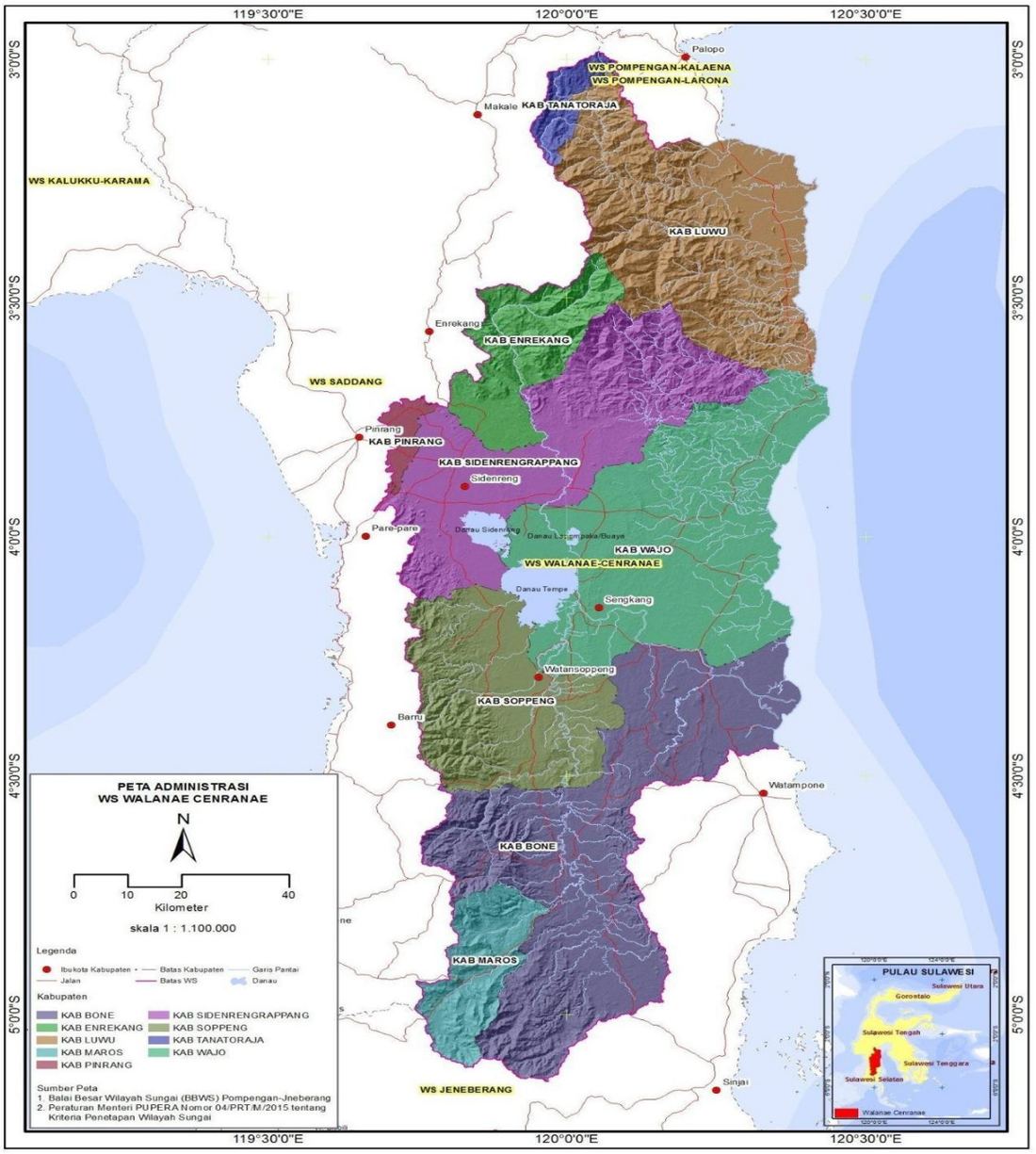
Gambar 2. 6
Peta Wilayah Sungai Walennae Cenranae



Sumber: BBWS Pompengan Jeneberang.Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018

Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo merupakan wilayah dengan luas terbesar dalam kawasan Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, masing-masing mencakup 22,94% dan 21,37% dari total luas Wilayah Sungai Walanae-Cenranae. Hal ini menunjukkan peran penting kedua kabupaten ini dalam sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Untuk lebih memahami cakupan wilayah dan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, dapat dilihat pada Peta Administrasi dan pembagian DAS yang ditampilkan pada Gambar 2.7.

Gambar 2. 7
Peta Wilayah Administrasi Wilayah Sungai Walanae-Cenranae



Sumber: BBWS Pompengan Jeneberang. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018

Sementara untuk luas dan persentase luasan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Walanae-Cenranae diuraikan dalam Tabel berikut ini.

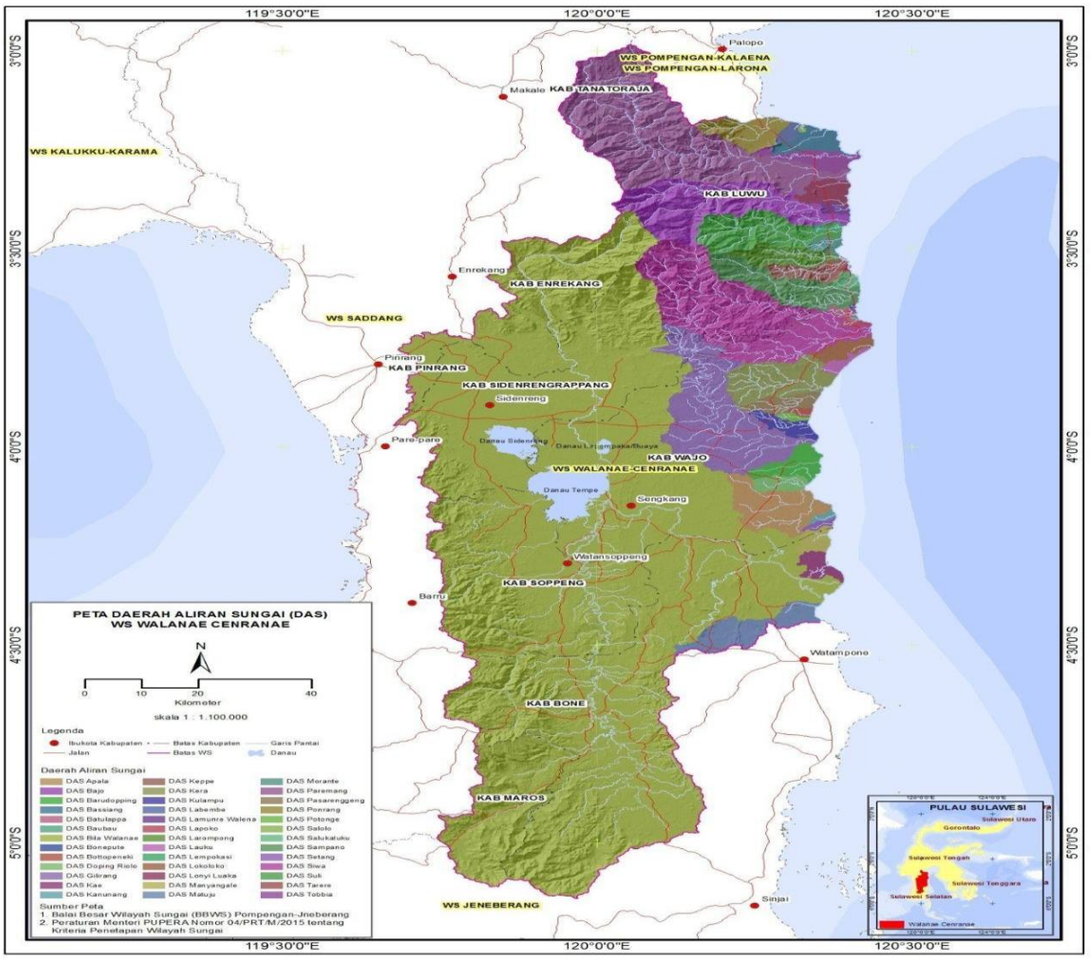
Tabel 2. 6
Sebaran Kabupaten dalam Wilayah Sungai Walanae-Cenranae

No	Kabupaten/Kota	Luas Total Kabupaten (km^2)	Luas dalam Wilayah Sungai (km^2)	Persentase terhadap Luas Total Kabupaten (%)	Persentase terhadap luas Wilayah Sungai Walanae - Cenranae (%)
1	Kabupaten Bone	4559,00	2.735,73	60,01	22,94
2	Kabupaten Enrekang	1.786,01	701,01	39,25	5,88
3	Kabupaten Luwu	3.000,25	1.980,48	66,01	16,61
4	Kabupaten Maros	1.619,12	618.45	31,79	4,32
5	Kabupaten Pinrang	1.961,17	103,74	5,29	0,87
6	Kabupaten Sidenreng Rappang	1.883,25	1.854,29	98,46	15,55
7	Kabupaten Soppeng	1.359,44	1.319,13	97,03	11,06
8	Kabupaten Tana Toraja	2.054,3	166,19	8,09	1,39
9	Kabupaten Wajo	2.506,2	2.548,38	101,68	21,37
	Wilayah Sungai Walanae-Cenranae	**20.728,74**	**11.923,66**	**43,97**	**100,00**

Sumber: BBWS Pompengan Jeneberang. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Walanae-Cenranae ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Wilayah ini mencakup 39 Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan DAS terbesar adalah DAS Bila Walanae, yang memiliki luas 7.777,00 km^2. Sungai Bila, yang bagian hilirnya berada di Kabupaten Wajo, berhulu di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Selain Sungai Bila, beberapa sungai lain seperti Sungai Siwa, Sungai Gilireng, Sungai Awo, dan Sungai Walanae juga melintasi wilayah ini, memberikan kontribusi penting terhadap sistem hidrologi Kabupaten Wajo. Pembagian DAS Wilayah Sungai Walanae-Cenranae dapat dilihat secara ilustratif pada gambar 2.9.

Gambar 2. 8
Gambar Peta Pembagian DAS Wilayah Sungai Walanae-Cenranae



Sumber :BBWS Pompengan Jeneberang; Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018

Wilayah Kabupaten Wajo sendiri terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang beragam, baik besar maupun kecil. Sebagian aliran sungai-sungai ini sepenuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Wajo, sementara sebagian lainnya melintasi batas-batas kabupaten. Di Kabupaten Wajo terdapat 18 DAS, yang terdiri dari satu DAS lintas kabupaten, yaitu DAS Bila Walanae, dan 17 DAS lainnya yang sepenuhnya berada di dalam wilayah Kabupaten Wajo.

Dengan demikian, keberadaan DAS lintas kabupaten dan DAS lokal di Kabupaten Wajo tidak hanya mempengaruhi kondisi hidrologi daerah ini, tetapi juga memerlukan koordinasi pengelolaan lintas wilayah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di seluruh Wilayah Sungai Walanae-Cenranae. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan DAS yang terpadu dan sesuai dengan kriteria nasional untuk

memaksimalkan potensi dan mengatasi tantangan hidrologi yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2. 7
Sebaran DAS di Kabupaten Wajo pada Wilayah Sungai Walanae Cenranae

No.	Nama DAS	Luas (Km²)	Kabupaten
1	Bonepute	2,10	Wajo
2	Batulappa	10,73	Wajo
3	Baubau	1,22	Wajo
4	Lapoko	9,40	Wajo
5	Lokoloko	39,41	Wajo
6	Lauku	18,58	Wajo
7	Kera	173,93	Wajo
8	Pasarenggeng	50,86	Wajo
9	Bottopeneki	9,69	Wajo
10	Potonge	8,40	Wajo
11	Kulampu	42,22	Wajo
12	Gilirang	513,57	Wajo
13	Barudopping	71,10	Wajo
14	Doping Riolo	37,65	Wajo
15	Apala	179,09	Wajo
16	Kanunang	9,08	Wajo
17	Setang	9,89	Wajo
18	Bila Walanae	1.361,46	Wajo

Sumber : BBWS Pompengan Jeneberang. Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae Tahun 2018 (Diolah)

Potensi hidrologi daerah aliran sungai ditunjukkan melalui rencana daerah irigasi dengan potensi luas 30.182 m2, di mana pengelolaannya terbagi atas 3 (tiga) kewenangan dan tanggung jawab. Pertama, kewenangan Pemerintah Pusat terhadap daerah irigasi Awo dan Kalola Kalosi, dengan luas irigasi 9.641 m2 dan berada pada wilayah Kecamatan Keera dan Maniangpajo. Kedua, kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap daerah irigasi Cilellang dan Cenranae, dengan luas irigasi 3.037 m2 pada wilayah Kecamatan Sabbangparu. Ketiga, kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap 126 daerah irigasi, dengan total luas 17.504 m2 yang tersebar pada 14 kecamatan. Rincian daerah irigasi di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Daerah Irigasi Luas Rencana menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Wajo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	**Wewenang / Tanggung Jawab Pusat**		**9756**		
	1	Awo	5324	Awo	Keera
	2	Kalola Kalosi	4317	Kalola	Maniangpajo
	Daerah Irigasi Air Tanah		115		
	1	Takkalalla Bola	115		
2	**Wewenang / Tanggung Jawab Provinsi**		**13025**		
	Daerah Irigasi		3037		
	1	Cilellang	732	Worongnge	Sabbangparu
	2	Cenranae	2305	Worongnge	Sabbangparu
	Daerah Irigasi Rawa/Daerah Irigasi Tambak		9988		
	1	DI Rawa Pammana	2050		Pammana
	2	DIT Akkotengeng	1000	Akkotengeng	Sajoanging
	3	DIT Doping	1000	Doping	Sajoanging
	4	DIT Putumpanua	1380		Pitumpanua
	5	DIT Sajoanging	2175		Sajoanging
	6	DIT Takkalalla	2383		Takkalalla
3	**Wewenang / Tanggung Jawab Kabupaten**		**17504**		
	1	Abbanderange	500	Abbanderangnge	Pitumpanua
	2	Amesangeng I	200	Tosora	Majauleng
	3	Amesangeng II	300	Tosora	Majauleng
	4	Bakke	80	Walanga	Penrang
	5	Bulupatila	240	Patila	Pammana
	6	Labawang	113	Labawang	Keera
	7	Lakatenni	300	Wele	Belawa
	8	Pabbelle	308	Lepangeng	Belawa
	9	Salampi	200	Abbanderangnge	Pitumpanua
3	10	Salo Mapejie	100	Awo	Pitumpanua
	11	Teppo Balanda	200	Lalliseng	Keera

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	12	Ugi I/Manyili	300	Mallusesalo	Sabbangparu
	13	Uraiyang	108	Uraiyang	Majauleng
	14	Wajo Wajo	200	Tosora	Majauleng
	15	Aluppang	100	Aluppang	Takkalalla
	16	Ana Saloe	130	Gilireng	Gilireng
	17	Atapangnge	100	Rumpia	Majauleng
	18	Bali Elo	70	Bali Elo	Bola
	19	Barangmamase	50	Barangmamase	Sajoanging
	20	Botto Tanre	250	Botto Tanre	Majauleng
	21	Botto Benteng	300	Botto Benteng	Majauleng
	22	Bulutekaci	260	Lamata	Gilireng
	23	Callaccu	30	Mattirowalie	Maniangpajo
	24	Cempalagi	70	Cempalagi	Tempe
	25	Cenranae	300	Abbanuangnge	Pammana
	26	Dori.Dori	30	Inalipue	Tanasitolo
	27	Geddongnge	275	Lagosi	Pammana
	28	Ire'E	50	Ire'E	Bola
	29	Jarakania	80	Tonralipue	Tanasitolo
	30	Kalidongnge	200	Macanang	Majauleng
	31	Karamae	100	Raddae	Penrang
	32	Labukkang	100	Uraiyang	Majauleng
	33	Labuangpatu	150	Mappadaelo	Tanasitolo
	34	Laceppung I	40	Inalipue	Tanasitolo
	35	Laceppung II	40	Inalipue	Tanasitolo
	36	Lakadaung	10	Dualimpoe	Maniangpajo
	37	Lamaggarang	60	Anabanua	Maniangpajo
	38	Lamalua	50	Tonralipue	Tanasitolo
	39	Lamara Awotarae	30	Kalola	Maniangpajo
3	40	Lamate	200	Anabanua	Maniangpajo
	41	Manessi	50	Minangatellue	Maniangpajo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	42	Lapatoleng	500	Macanang	Majauleng
	43	Lapoloaju	40	Sogi	Maniangpajo
	44	Laputeng	100	Mamminasae	Gilireng
	45	Lare'E	200	Pammana	Pammana
	46	Larukkaeto	30	Belawa	Belawa
	47	Limpomajang Lompo Labawi	120	Limpomajang	Majauleng
	48	Masara	80	Abbanderangnge	Pitumpanua
	49	Lompo Labojo	400	Liu	Sabbangparu
	50	Lompo Towesse	500	Walennae	Sabbangparu
	51	Macero	320	Macero	Belawa
	52	Malingmongeng	100	Lapaukke	Pammana
	53	Maminasae	200	Mamminasae	Gilireng
	54	Manri	200	Watang Rumpia	Majauleng
	55	Manurung	20	Manurung	Bola
	56	Maroanging	70	Macanang	Majauleng
	57	Maroanging	130	Cina	Pammana
	58	OngkoE	100	OngkoE	Belawa
	59	Palaguna	50	Lempa	Pammana
	60	Palolloi	350	Wele	Belawa
	61	Pangempangnge	160	Lamata	Gilireng
	62	Parigi	150	Parigi	Takkalalla
	63	Pasa.Pasa	70	Uraiyang	Majauleng
	64	Pasir Putih	60	Pasir Putih	Bola
	65	Patemma	500	Lapaukke	Pammana
	66	Peneki	100	Parigi	Takkalalla
	67	Salo Barue	100	Wage	Sabbangparu
	68	Salotengnga	50	Pallimae	Sabbangparu
	69	Sanreseng Ade	50	Sanreseng Ade	Bola
3	70	Soppae	500	Ongkoe	Belawa
	71	Tancung	50	Tancung	Tanasitolo

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	72	Teppo Batue	300	Tua	Majauleng
	73	Teppo Panasae	70	Uraiyang	Majauleng
	74	Teppo Waji	100	Macanang	Majauleng
	75	Tobatang	30	Tobatang	Pammana
	76	Tocule	250	Bola	Bola
	77	Ujung Tanah	200	Ujung Tanah	Bola
	78	Ujunge / Pajalele	350	Pajalele	Tanasitolo
	79	UkkeE	15	Dualimpoe	Maniangpajo
	80	Weccudai	100	Weccudai	Pammana
	81	Watangteppo	100	Wage	Sabbangparu
	82	Batue	150	Cinnong Tabi	Majauleng
	83	Timpalaja	40	Uraiyang	Majauleng
	84	Mabbucu Ulu Tanre	50	Uraiyang	Majauleng
	85	Lamasewanua	200	Tajo	Majauleng
	86	Labulo, Bulo	200	Cinnong Tabi	Majauleng
	87	Ladusa	40	Tajo	Majauleng
	88	Latappareng	100	Limpomajang	Majauleng
	89	Cingki	100	Watang Rumpia	Maje
	90	Labette	60	Tadangpalie	Penrang
	91	Kading	200	Penrang	Penrang
	92	Lonrae	60	Penrang	Penrang
	93	Amasaloe	150	Temmabarang	Penrang
	94	Mualla	50	Assorajang	Sajoanging
	95	Pappolo Lekko	200	Akkotengeng	Sajoanging
	96	Bulu Mallopie	300	Sakkoli	Sajoanging
	97	Ciromanie	100	Ciromanie	Keera
	98	Toboko	50	Keera	Keera
	99	Salo Pandang	100	Simpellu	Pitumpanua
3	100	Lacinde	125	Marannu	Pitumpanua
	101	Cekke	85	Marannu	Pitumpanua

No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (m2)	Desa / Kelurahan	Kecamatan
	102	Lompo Loang	65	Lompo Loang	Pitumpanua
	103	Bunga Jenne	65	Lompo Loang	Pitumpanua
	104	Tobaralla	70	Tobbarakka	Pitumpanua
	105	Aggattungeng	40	Pallimae	Sabbangparu
	106	Teppo Batue	50	Teppo Batue	Pammana
	107	Ulu Galung	50	Lempa	Pammana
	108	Lawarengnge	50	Taddangpalie	Pammana
	109	Lapao	80	Ujung Tanah	Bola
	110	Lakaluku	50	Lempong	Bola
	111	Ceppaga	150	Ceppaga	Takkalalla
	112	Lagoari	80	Lagoari	Takkalalla
	113	Lebongnge	40	Tancung	Tanasitolo
	114	Abbolongeng Katampue	40	Pincengpute	Tanasitolo
	115	Waroriaja	150	Wajoriaja	Tanasitolo
	116	Lajokka	30	Tonralipue	Tanasitolo
	117	Cirowalie	50	Waetuwo	Tanasitolo
	118	Teppoe	80	Tonralipue	Tanasitolo
	119	Salodua	40	Mattirowalie	Maniangpajo
	120	Ajutalie Appewalie	60	Mattirowalie	Maniangpajo
	121	Langkauttu	15	Mattirowalie	Maniangpajo
	122	Bulu Seppang	20	Abbanuangnge	Maniangpajo
	123	Makkalu	20	Dualimpoe	Maniangpajo
	124	Assorajang	60	Sogi	Maniangpajo
	125	Karamee Salotengnga	350	Ongkoe	Belawa
	126	OngkoE	350	OngkoE	Belawa

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Berdasarkan potensi hidrologi sungai, terdapat 33 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Wajo, memberikan kontribusi penting terhadap ketersediaan air dan kehidupan masyarakat. Sungai terpanjang adalah Sungai Gilireng/Akkotengeng yang mencapai panjang 77 km,

melintasi Kecamatan Sajoanging, Majauleng, dan Takkalalla. Di sisi lain, sungai terpendek adalah Sungai Laponggo, dengan panjang hanya 2 km, yang berada di Kecamatan Gilireng. Rincian lengkap mengenai sungai-sungai ini disajikan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2. 9
Sungai Menurut Panjang Lebar dan Kedalaman di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Siwa	20,5	70	0,85
2	Awo	43,5	85	0,65
3	Keera	27	65	0,6
4	Gilireng	61,5	40	0,35
5	Bila / Belawa	15	40	0,4
6	Cenranae	47	115	0,7
7	Walanae	28,5	95	0,55

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Tabel 2. 10
Sungai Menurut Panjang, Kecamatan dan Muara di Kabupaten Wajo

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan	Muara
1	Walanae	28.5	Sabbangparu	Teluk Bone
2	Cenranae, Menraleng – Wajo	74	Tempe, Majauleng, Pammana, Bola	Teluk Bone
3	Cenranae/Labulang	13	Sajoanging	Teluk Bone
4	Bulete / Awo	52	Pitumpanua	Teluk Bone
5	Gilireng/ Akkotengeng	77	Sajoanging, Majauleng, Takkalalla	Teluk Bone
6	Peneki	21	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
7	Campi	5	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
8	Doping	10	Penrang	Teluk Bone
9	Laliseng	16	Keera	Teluk Bone
10	Keera	27	Keera	Teluk Bone
11	Kulampu	18	Keera	Teluk Bone
12	Siwa	20.5	Pitumpanua	Teluk Bone
13	Buila / Kalola	17	Belawa, Tanasitolo	Teluk Bone
14	Laponggo	2	Gilireng	Teluk Bone
15	Batumanuk	6	Bola	Teluk Bone

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan	Muara
16	Bila	17	Belawa, Tanasitolo	Danau Tempe
17	Belawa	11	Belawa	Danau Sidenreng
18	Belle	13	Belawa	Danau Sidenreng
19	Bonge	5	Sajoanging	Teluk Bone
20	Laponggo	6	Sajoanging	Teluk Bone
21	Cilelang	9.5	Sabbangparu	Danau Tempe
22	Lapotta		Majauleng	
23	Labette		Penrang	
24	Cellue		Bola, Pammana, Takkalalla	
25	Polla		Majauleng, Sajoanging	
26	Salo Bakka		Sajoanging	
27	Ambo Dongi		Pammana	
28	Worongnge		Sabbangparu	
29	Kading		Penrang	
30	Lompo Lagau		Penrang	
31	Lompo Lajonga		Sabbangparu	
32	Mualla		Penrang	
33	Jangkali		Bola	

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Selain sungai, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi hidrologi berupa danau dan rawa yang berperan penting dalam menjaga ekosistem dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Terdapat 15 danau dan rawa di wilayah ini. Danau terbesar adalah Danau Tempe dengan luas mencapai 9.342 hektare, mencakup wilayah Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, dan Belawa. Sebaliknya, Danau Dorie adalah yang terkecil, dengan luas 6 hektare, terletak di Kecamatan Takkalalla. Informasi detail mengenai danau dan rawa ini dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

Tabel 2. 11
Danau Tempe Menurut Kedalaman dan Luas di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Kedalaman (m)	Luas (Km²)
1	Danau Tempe	0 – 1	35.9
		1 – 2	35.42
		2 . 2.5	20.9
		> 2.5	1.2

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Tabel 2. 12
Danau / Rawa Menurut Luas di Kabupaten Wajo

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Danau Tempe	9.342	Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Belawa
2	Danau Buaya	360	Takkalalla
3	Danau Lapongpakka	1.960	Maniangpajo / Belawa
4	Danau Lampulung	1.000	Tempe / Pammana
5	Danau Penrang Riawa	25	Tanasitolo
6	Danau Cenranae	24	Sajoanging
7	Danau Dorie	6	Takkalalla
8	Danau Lapapolo	37	Takkalalla
9	Danau / Rawa Sempangnge	343	Majauleng
10	Danau / Rawa Palisu	767	Bola
11	Danau / Rawa Baleng	620	Pammana
12	Danau / Rawa Bola	1.920	Bola
13	Danau / Rawa Salo	890	Bola
14	Danau / Rawa Penrang	726	Penrang
15	Danau / Rawa Palaguna	420	Pammana
Jumlah		**18.543**	

Sumber : BPS. 2023 (Diolah)

Dengan adanya sungai-sungai dan danau yang tersebar di berbagai kecamatan, potensi hidrologi Kabupaten Wajo menunjukkan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberadaan sumber daya air ini mendukung beragam kebutuhan mulai dari irigasi pertanian hingga penyediaan air bagi masyarakat. Potensi ini, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi aset berharga bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo.

2.1.3. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Selain beberapa indikator lingkungan di atas, Energi, Air dan Kemandirian Pangan menjadi bagian penting yang terkait dengan pengelolaan potensi geografis Kabupaten Wajo secara optimal dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai kondisi Kabupaten Wajo berdasarkan beberapa indikator diuraikan sebagai berikut.

2.1.3.1. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan energi di Kabupaten Wajo adalah Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), yang memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, yang mencapai 333 kWh per kapita pada tahun 2023. Begitu pula konsumsi listrik rumah tangga yang juga mengalami peningkatan menjadi 112,52 gWh pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya efisiensi energi di sektor rumah tangga, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan edukasi tentang penghematan energi di rumah tangga. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 13
Konsumsi Listrik Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024

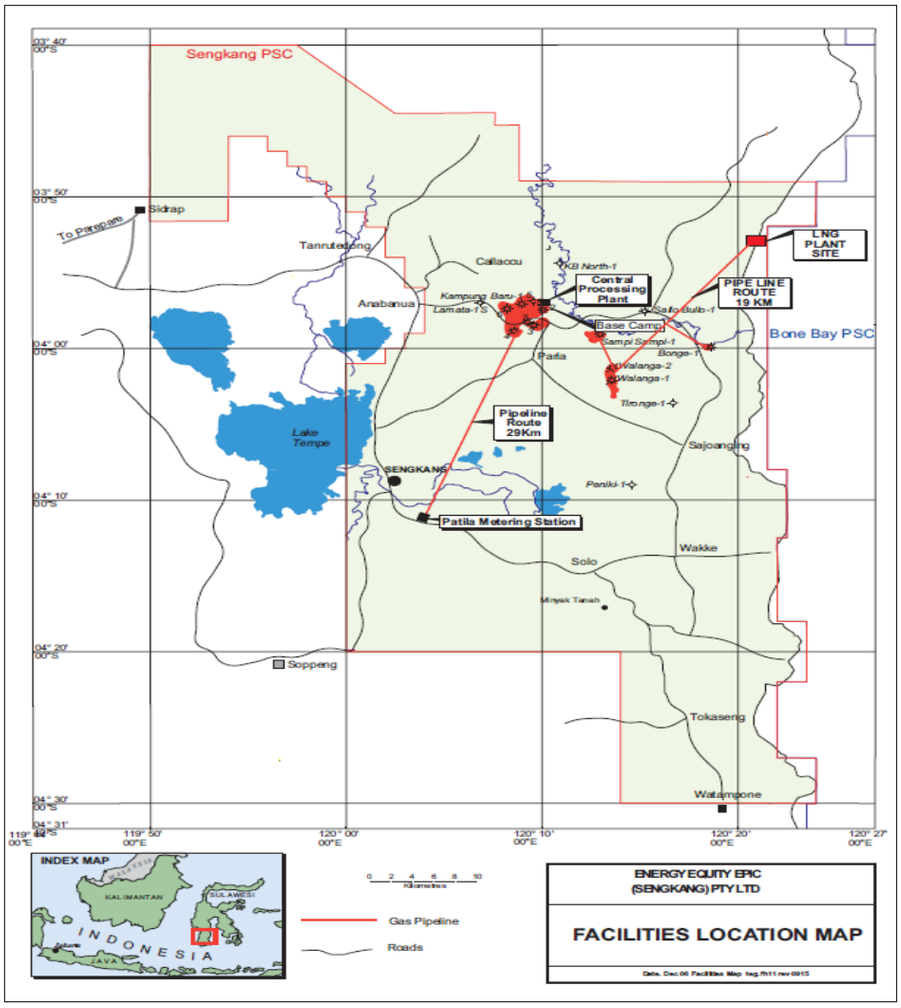
Tahun	Konsumsi Listrik Rumah Tangga (gWh)	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)
2021	103,11	317,40
2022	108,00	325,00
2023	112,52	333,00
2024		

Sumber : PLN Ranting Sengkang, PLN Ranting Paria

Peningkatan konsumsi listrik masyarakat tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi gas alam yang dimiliki oleh Kabupaten Wajo. Cadangan Gas Alam Blok Sengkang sebesar 2 *trillion cubic feet* dapat menjadi potensi energi yang dapat dioptimalkan. Saat ini volume gas alam yang tersertifikasi di Kabupaten Wajo sebesar 381 *billion of standard cubic feet* (BSCF), yang terdiri atas 210,3 BSCF di wilayah Kampung Baru dan

170,8 BSCF di wilayah Walanga, Sampi-sampi, dan Bonge (Wasambo). Gambaran Gas Alam Blok Sengkang disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2. 9
Peta Gas Alam Blok Sengkang



Sumber: Energi Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd

2.1.3.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Penyelesaian masalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah langkah krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketidakcukupan pangan tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi produktivitas kerja, perkembangan anak, serta kemampuan belajar generasi muda. Dengan mengatasi masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mencegah dampak negatif jangka panjang seperti malnutrisi, peningkatan angka kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selain itu, penyelesaian masalah ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional, menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam

memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung kestabilan ekonomi di tingkat nasional.

Tabel 2. 14
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	10,68	8,81	12,09	6,67	
Provinsi	10,14	7,93	10,79	7,84	
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, 2023.

2.1.3.3. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan pada suatu wilayah berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada tahun 2023, skor IKP Kabupaten Wajo sebesar 84,36 dan menempatkannya pada peringkat ke-73 dari 416 kabupaten di Indonesia. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 Kabupaten Wajo memiliki skor IKP sebesar 81,24 dan berada pada peringkat ke-33 secara nasional. Peningkatan skor dari 81,24 pada tahun 2018 menjadi 84,36 pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam ketahanan pangan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator yang menilai kualitas dan keragaman konsumsi pangan penduduk, dengan skor maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan seimbang gizi konsumsi pangan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, keragaman konsumsi pangan penduduk Kabupaten Wajo masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian.

Tabel 2. 15
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Wajo

No.	Kelompok Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-Padian	25,0	25,00	25,00	25,00	
2	Umbi-Umbian	0,7	0,80	0,70	0,60	
3	Pangan Hewani	23,6	24,00	19,40	20,80	
4	Minyak dan Lemak	4,5	4,60	5,00	5,00	
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,30	0,50	0,60	
6	Kacang-kacangan	6,9	7,20	3,60	4,90	

No.	Kelompok Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
7	Gula	1,1	1,10	1,90	2,30	
8	Sayur dan Buah	30,0	30,00	21,90	26,40	
9	Lain-Lain	-	-	-	-	
Total Skor PPH		**92,00**	**93,00**	**78,00**	**85,40**	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, 2024.

2.1.3.4. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku merujuk pada jumlah maksimum air yang tersedia untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi rumah tangga, pertanian, industri, dan kebutuhan lainnya. Kapasitas ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air di suatu wilayah, kualitas sumber air, dan teknologi pengolahan yang digunakan. Selain itu, faktor iklim, kondisi geografis, dan tingkat pertumbuhan populasi turut memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas dan ketersediaan air baku. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kapasitas air baku dapat memenuhi permintaan, mengingat tekanan yang semakin tinggi terhadap sumber daya air akibat perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan di berbagai sektor.

Kondisi ketahanan air di Kabupaten Wajo dapat dilihat melalui capaian indikator Kapasitas Air Baku (m^3/detik). Kabupaten Wajo menyediakan air baku untuk kebutuhan air minum penduduk dari delapan sumber air baku yang tersedia, dengan kapasitas total 1.552 liter per detik. Dari kapasitas tersebut, sekitar 250 liter per detik telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi kapasitas air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Perhitungan kebutuhan air di Kabupaten Wajo dibagi menjadi dua kategori utama: kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air untuk lahan didasarkan pada jenis penutupan lahan yang ada, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak, yang masing-masing memiliki kebutuhan air yang berbeda. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan per kapita untuk hidup layak, yaitu sebesar 43,3 m^3 per tahun. Pembagian ini membantu dalam memastikan bahwa alokasi air dapat disesuaikan dengan kebutuhan

spesifik setiap sektor dan mendukung pengelolaan sumber daya air secara efisien di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. 16
Kapasitas Air Baku Kabupaten Wajo Tahun 2023

Jenis Air Baku	Kapasitas (L/detik)	Kapasitas Terpakai (L/detik)
Sungai Cenranae 1	184	130
Sungai Walannae	184	10
Sungai Cenranae 2	184	10
Sungai Bila	340	20
Sungai Awo	184	20
Sungai Siwa	108	20
Sungai Cenranae 3	184	20
Sungai Cenranae 4	184	20
Total	**1.552**	**250**

Sumber: Aplikasi SIMSPAM

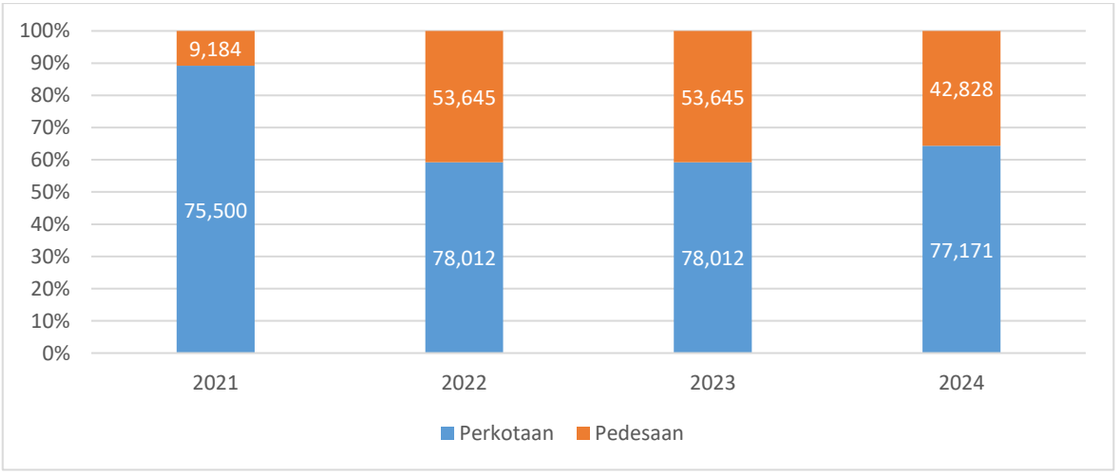
2.1.3.5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Pentingnya memastikan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sangat mendasar untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Air yang siap minum dan terdistribusi melalui jaringan perpipaan yang aman tidak hanya mengurangi risiko penyakit menular seperti diare dan kolera, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber air lain yang mungkin tidak terjamin kebersihannya. Selain itu, ketersediaan air siap minum perpipaan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendorong keberlanjutan lingkungan di perkotaan, karena mengurangi kebutuhan akan kemasan plastik dan air dalam botol. Akses ini juga menciptakan kondisi hidup yang lebih layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan air bersih.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah *(on premises);* c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan data SIMSPAM jumlah rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan di Kabupaten Wajo tahun 2023 sejumlah 29.827 sambungan rumah, sedangkan jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat melalui pengawasan kualitas air minum sejumlah 130 unit dari 134 unit sarana air minum sehingga jumlah Sambungan Rumah Aman sejumlah 28.937 atau 29,94% yang dikategorikan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan. Adapun gambaran akses air minum jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. 1
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten WajoTahun 2021-2023



Sumber: Aplikasi SIMSPAM

2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Beberapa aspek geografis diatas perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan informasi daya dukung dan daya tampung. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 2. 17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH Provinsi	71.74	73.23	74,17	74,30	
IKLH Nasional	70.27	71.43	72,42	72,54	
KABUPATEN WAJO					
IKLH	61.03	75	62,68	62,60	
IKA	60,00	58.75	53,57	54,44	
IKU	90,73	91,48	91,93	89,06	
IKT	39.27	23.75	23,75	27,65	

Sumber :Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, 2023 (Diolah)

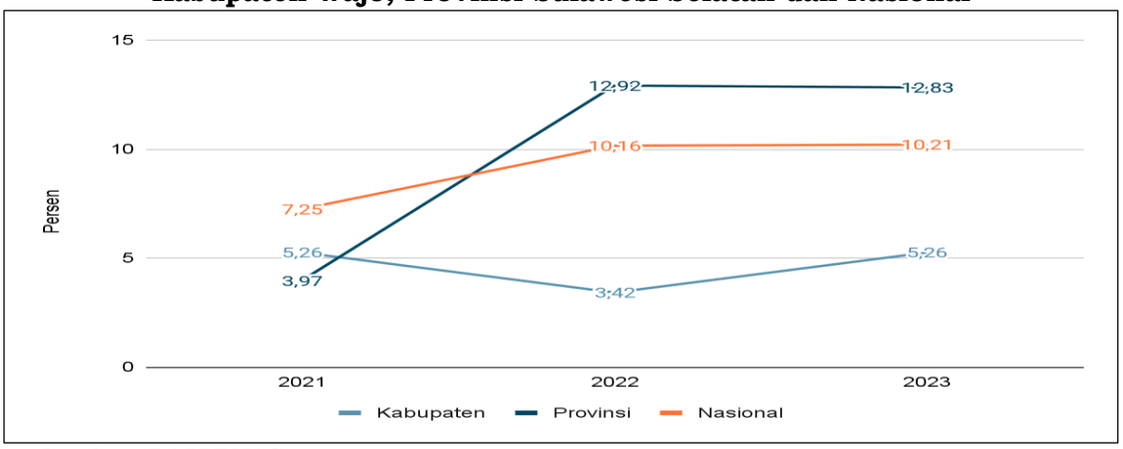
2.1.4.2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Gambaran lebih lanjut mengenai kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Wajo, juga dapat dilihat dari kondisi sanitasi dan persampahan.

Kondisi sanitasi di Kabupaten Wajo dapat diketahui dari Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**.** Akses aman yang dimaksud adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2020 Kabupaten Wajo telah berstatus ODF (*open defecation free*) atau bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarang (BABS). Kini pemerintah daerah tengah mengembangkan strategi percepatan pembangunan sanitasi aman. Capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 berada pada angka 5,26%. Berdasarkan arahan Roadmap Nasional Sanitasi Aman pada tahun 2030 Kabupaten Wajo ditargetkan harus mencapai 7,03% akses sanitasi aman dengan asumsi bahwa semua sarana terbangun berfungsi dengan optimal.

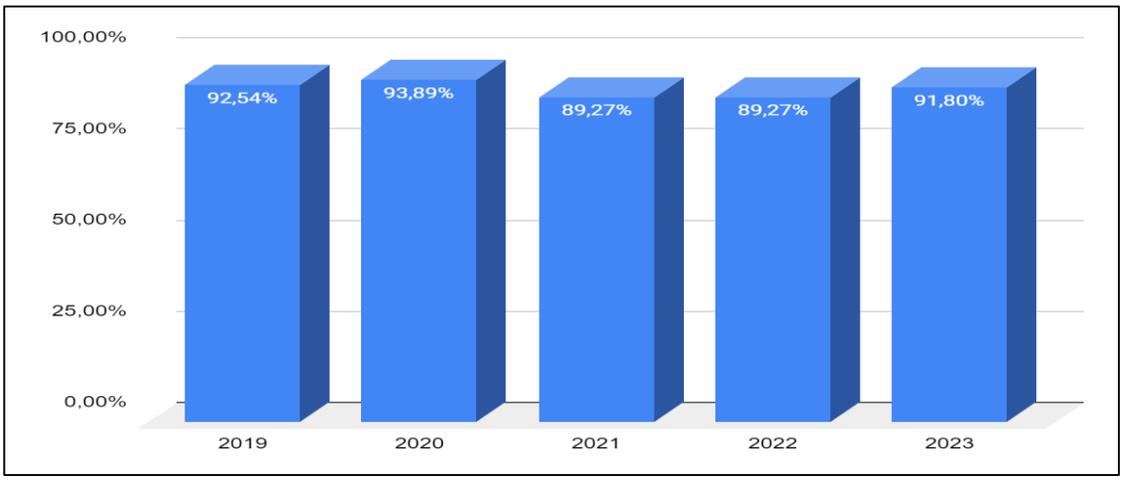
Grafik 2. 2
Akses Sanitasi Aman Rumah Tangga Pada Tahun 2021-2023
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BAPPENAS

Akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Wajo persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan telah mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, terdapat 92,54% rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2020, mencapai 93,89% yang menunjukan adanya perbaikan dalam infrastruktur dan layanan sanitasi, namun terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 89,27% dan angka ini tetap bertahan pada level yang sama di tahun selanjutnya, pada tahun 2023 terlihat adanya pemulihan, meningkat menjadi 91,80%, hal ini menunjukkan perbaikan dalam penyediaan layanan tersebut. Adapun untuk jumlah rumah tangga yang telah terlayani penyedotan lumpur tinja tahun 2023 sebanyak 49 rumah tangga yang kemudian diolah di IPLT. Di Kabupaten Wajo terdapat 5 unit IPAL Komunal yang terbangun namun belum dapat difungsikan secara maksimal.

Grafik 2. 3
Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Wajo
yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan



Sumber : Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, 2024

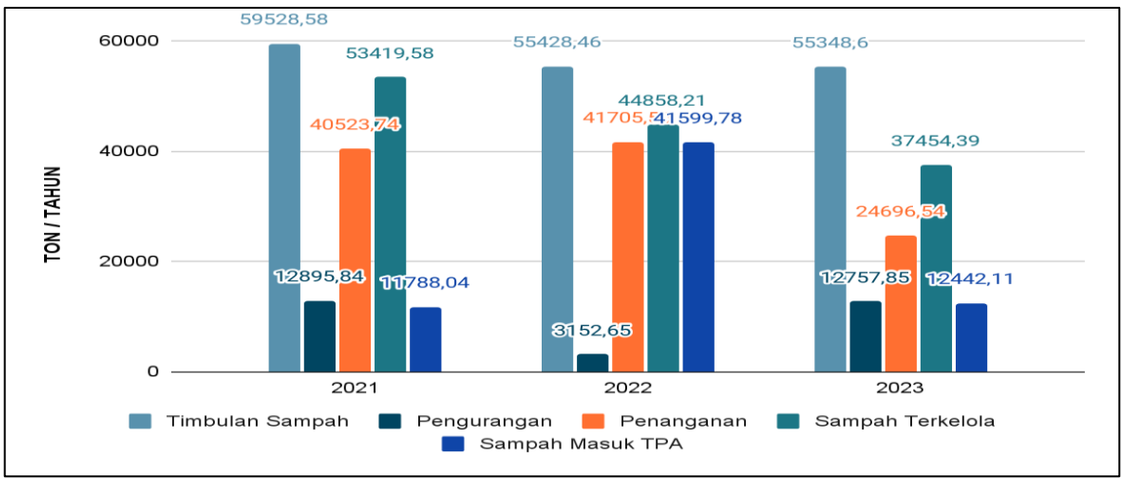
2.1.4.3. Persentase Timbulan Sampah Terkelola di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah sampah akibat urbanisasi dan gaya hidup modern, pengelolaan yang tepat dapat mencegah pencemaran tanah, air, dan udara yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Sistem pengelolaan yang baik, seperti daur ulang, pengurangan, dan pengolahan sampah, membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA dan meminimalkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengelolaan sampah yang bijak membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tahun 2021 hingga 2023, capaian pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah maupun pendaurulangan sampah mengalami tren fluktuatif. Pengelolaan sampah organik dan non organik dari rumah tangga merupakan faktor penting dalam peningkatan akses pengurangan sampah, karena mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA. Jumlah timbulan sampah yang mengalami peningkatan

setiap tahunnya, menunjukkan beban TPA semakin tinggi apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga tidak didaur ulang.

Grafik 2. 4
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023 (ton/tahun)



Sumber : SIPSN (data diolah)

Persentase timbulan sampah terkelola di fasilitas pengelolaan sampah termasuk sampah yang terdaur ulang tahun 2021 hingga 2023 mengalami tren peningkatan, meskipun kontribusi upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena penanganan sampah menggunakan pendekatan angkut dan buang ke TPA, sehingga belum terdapat upaya-upaya signifikan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Grafik 2. 5
Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : SIPSN (data diolah)

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah.

Indikator ini terdiri dari Rumah Tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Selain itu juga meliputi rumah tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Tahun 2023 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Wajo sebanyak 91.458 dari total 126.658 jumlah rumah tangga seluruhnya atau sebesar 72,21 persen. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 73,11 persen akibat berkurangnya rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah.

2.1.5. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Iklim merupakan unsur lingkungan yang penting dalam memahami potensi suatu daerah, terutama dalam mendukung pengelolaan kawasan sesuai kebutuhan air, baik untuk pertumbuhan tanaman maupun keperluan rumah tangga. Unsur iklim utama meliputi curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Curah hujan dan rata-rata hujan bulanan sering digunakan untuk menilai erosivitas hujan dan klasifikasi iklim, sedangkan suhu dan kelembaban udara digunakan dalam pemilihan jenis tanaman. Studi tentang iklim dalam sektor pertanian dikenal sebagai agroklimatologi.

Berdasarkan metode Oldeman, penentuan tipe iklim sangat dipengaruhi oleh banyaknya bulan basah dan bulan kering. Kriteria bulan basah ditandai dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan dan terjadi pada jumlah bulan secara berturut-turut/berurutan. Sedangkan kriteria bulan kering dapat ditandai pada jumlah bulan secara berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 100 mm/bulan. Keragaman curah hujan menjadi dasar dalam mengelompokkan tipe iklim di sebuah wilayah, termasuk di Kabupaten Wajo.

Menurut peta zona agroklimatologi skala 1:750.000 yang dibuat oleh Balai Informasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten

Wajo mempunyai tipe iklim C1, D1, D2, E2 dan E3 yang diuraikan sebagai berikut:

a. Zona Iklim C1 yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut adalah bagian timur laut Kabupaten Wajo meliputi sebagian Kecamatan Pitumpanua yang terletak di pinggir Teluk Bone.
b. Zona Iklim D1,yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 3-4 bulan dan jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut adalah wilayah bagian Timur Kabupaten Wajo meliputi bagian Kecamatan Takkalalla, Sajoanging, Majauleng, Pitumpanua dan Kecamatan Maniangpajo.
c. Zona Iklim D2, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah 3-4 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Wajo yang membujur arah utara selatan meliputi Kecamatan Majauleng, Maniangpajo dan Kecamatan Pammana.
d. Zona Iklim E2, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Wilayah yang termasuk dalam zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian barat Kabupaten Wajo atau sebagian dari Kecamatan Belawa, Tanasitolo, Tempe dan Kecamatan Sabbangparu.
e. Zona Iklim E3, yaitu zona iklim dengan jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan dan jumlah bulan kering 3-5 bulan. Wilayah yang termasuk zona iklim tersebut hanya sebagian kecil wilayah pada bagian barat Kabupaten Wajo yang terletak di sebelah utara dan selatan Danau Tempe atau sebagian dari wilayah Kecamatan Belawa dan Kecamatan Sabbangparu.

Kabupaten Wajo, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan suhu berkisar 27°C hingga 30°C. Iklim tersebut ditandai dengan adanya bulan kering/musim hujan dan bulan basah/musim kemarau. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa zona iklim Kabupaten Wajo sebagian besar masuk dalam zona iklim D1 yaitu tipe iklim 3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Luas wilayah yang masuk dalam zona iklim D1 mencapai 85.119,58 hektar atau 34,12% meliputi Kecamatan Bola, Gilireng, Keera, Majauleng, Maniangpajo, Penrang, Pitumpanua, Sajoanging

dan Takkalalla. Sedangkan zona iklim terkecil adalah zona iklim E3 dengan luas 18.747,71 hektar atau 7,51% terhadap luas kabupaten.

Tabel 2. 18
Luas Wilayah Tipe Iklim Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Klimatologi	Tipe	Luas (Ha)	(%)
1	Sabbangparu	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.473,18	92,36%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	948,92	7,64%
Luas Kecamatan Sabangparu				**12.422,10**	**100,00%**
2	Tempe	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	60,35	1,41%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	4.173,78	97,81%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	33,17	0,78%
Luas Kecamatan Tempe				**4.267,30**	**100,00%**
3	Pammana	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	8.877,35	59,22%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	6.113,71	40,78%
Luas Kecamatan Pammana				**14.991,06**	**100,00%**
4	Bola	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	7.804,43	44,06%
		3-bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	9.907,43	55,94%
Luas Kecamatan Bola				**17.711,86**	**100,00%**
5	Takkalalla	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	2.937,27	17,49%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	13.852,01	82,51%
Luas Kecamatan Takkalalla				**16.789,28**	**100,00%**
6	Sajoanging	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	702,40	4,06%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	16.612,17	95,94%
Luas Kecamatan Sajoanging				**17.314,57**	**100,00%**
7	Majauleng	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	19.737,83	89,48%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	2.288,84	10,38%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	32,32	0,15%
Luas Kecamatan Majauleng				**22.058,99**	**100,00%**
8	Tanasitolo	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	3.887,32	25,55%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.035,05	72,54%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	290,08	1,91%

No	Kecamatan	Klimatologi	Tipe	Luas (Ha)	(%)
Luas Kecamatan Tanasitolo				**15.212,45**	**100,00%**
9	Belawa	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	11.788,50	72,73%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	4.421,15	27,27%
Luas Kecamatan Belawa				**16.209,65**	**100,00%**
10	Maniangpajo	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	13.572,20	79,05%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	414,34	2,41%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	3.182,17	18,53%
Luas Kecamatan Maniangpajo				**17.168,71**	**100,00%**
11	Keera	3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	22.739,78	78,83%
		5-6 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	C1	6.108,23	21,17%
Luas Kecamatan Keera				**28.848,01**	**100,00%**
12	Pitumpanua	3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	520,72	2,84%
		5-6 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	C1	17.822,88	97,16%
Luas Kecamatan Pitumpanua				**18.343,60**	**100,00%**
13	Penrang	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	3.728,00	27,21%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	9.972,55	72,79%
Luas Kecamatan Penrang				**13.700,55**	**100,00%**
14	Gilireng	3-4 bulan basah dan 2-3 bulan kering	D2	11.571,07	56,77%
		3-4 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering	D1	8.811,64	43,23%
Luas Kecamatan Gilireng				**20.382,71**	**100,00%**
15	Danau Tempe	Kurang dari 3 bulan basah dan 2-3 bulan kering	E2	1.002,64	7,13%
		Kurang dari 3 bulan basah dan 3-5 bulan kering	E3	13.054,31	92,87%
Luas Danau Tempe				**14.056,95**	**100,00%**

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Setiap tahun, musim hujan berlangsung relatif lebih singkat yang rata-rata berlangsung pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Akan tetapi di bagian utara yaitu di Kecamatan Pitumpanua terdapat musim hujan yang serupa dengan musim hujan di Kabupaten Luwu. Adapun kondisi pada bulan-bulan selanjutnya adalah lembab.

Musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Antara bulan November sampai dengan Bulan Maret terdapat curah hujan yang cukup tinggi akibat pengaruh musim hujan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Curah hujan untuk 3 (tiga) tahun terakhir mencapai rata.rata 1.510 mm dan 128 hari hujan. Rincian mengenai curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Stasiun di Kabupaten Wajo Tahun 2022

Bulan	Stasiun Ongkoe/Menge		Stasiun Tingara Posi	
	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm^2)	Hari Hujan
Januari	110	7	36	5
Februari	180	7	20	0
Maret	182	6	7	1
April	278	12	32	4
Mei	391	14	124	15
Juni	545	13	73	8
Juli	160	7	29	4
Agustus	15	1	0	0
September	62	3	0	0
Oktober	11	1	0	0
November	162	11	3	1
Desember	50	3	7	2

Sumber: BPS. 2023 (Diolah)

Kabupaten Wajo memiliki beberapa potensi bencana alam, antara lain banjir, longsor, gempa bumi, abrasi, dan tsunami. Bencana banjir di wilayah ini sering terjadi akibat degradasi kawasan lindung di hulu dan hilir sungai. Di kawasan pedesaan, penurunan kualitas lahan sering kali memicu banjir, sedangkan di kawasan perkotaan, masalah banjir lebih disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah.

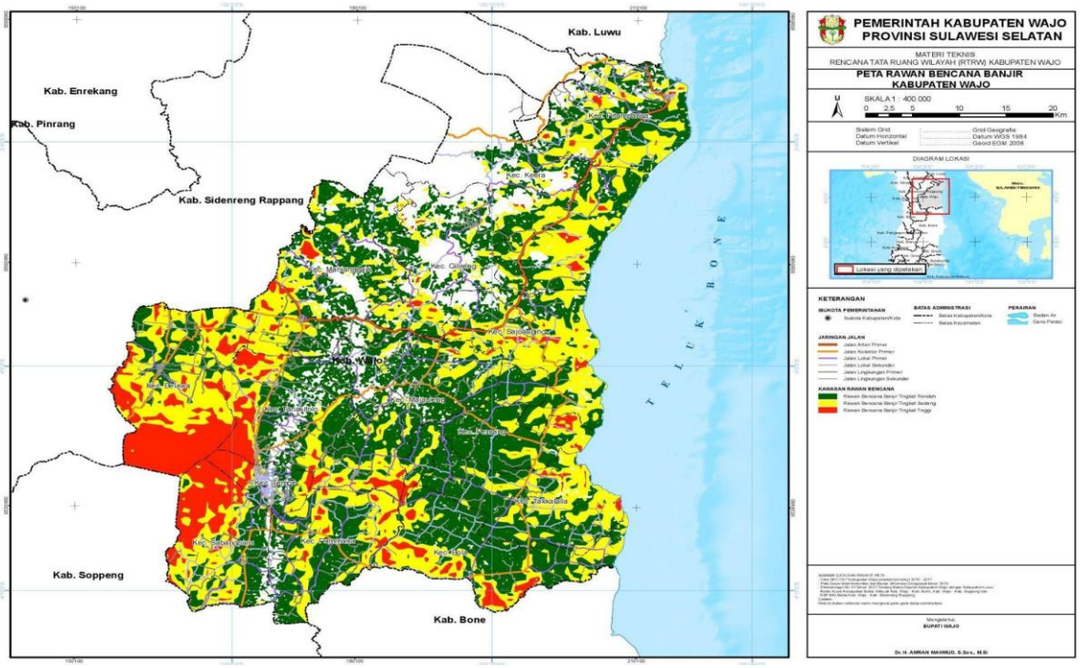
Selain banjir, Kabupaten Wajo juga berada di wilayah yang rawan gempa bumi. Berdasarkan sejarah geologis terbentuknya Pulau Sulawesi, terdapat garis sesar yang memanjang dari perairan di sekitar Pulau Selayar menuju utara, melintasi Kabupaten Bulukumba, Soppeng, dan Sidrap, hingga bercabang di Kabupaten Enrekang. Sesar ini mempengaruhi

wilayah-wilayah yang dilaluinya, dengan pusat kerawanan gempa di Kabupaten Wajo.

Potensi bencana lainnya adalah longsor, terutama di daerah dengan kerentanan gerakan tanah. Berdasarkan peta gerakan tanah Kabupaten Wajo, sebagian besar wilayahnya berada dalam zona kerentanan rendah hingga menengah. Namun, kerentanan ini dapat meningkat akibat aktivitas manusia, khususnya dalam pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pegunungan. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali di area ini meningkatkan risiko bencana longsor.

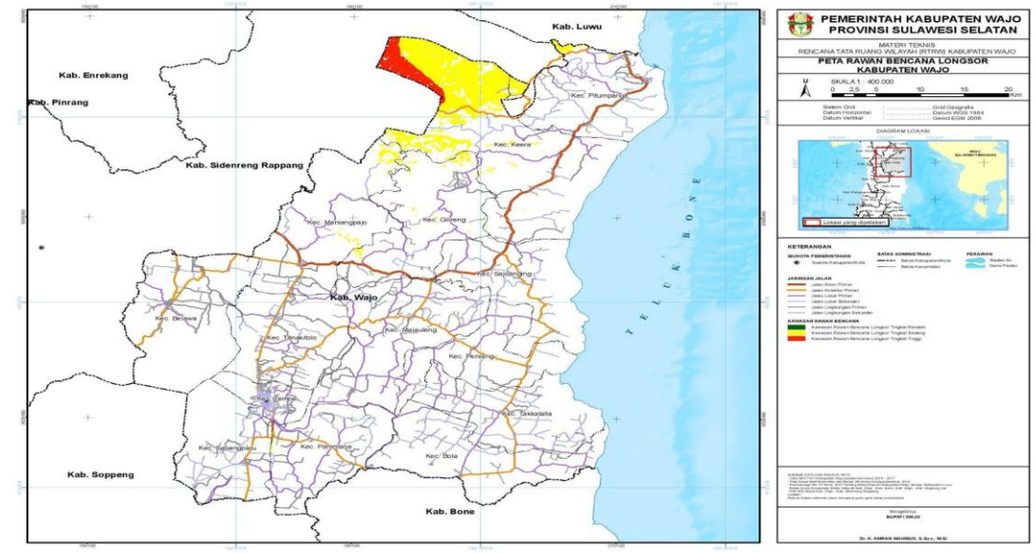
Dengan demikian, potensi bencana di Kabupaten Wajo menunjukkan perlunya upaya mitigasi yang terpadu, baik melalui pelestarian lingkungan di kawasan pedesaan maupun pengelolaan sistem drainase yang lebih baik di kawasan perkotaan. Selain itu, pemahaman mengenai risiko kegempaan dan longsor di area tertentu dapat menjadi dasar penting untuk perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.

Gambar 2. 10
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Wajo



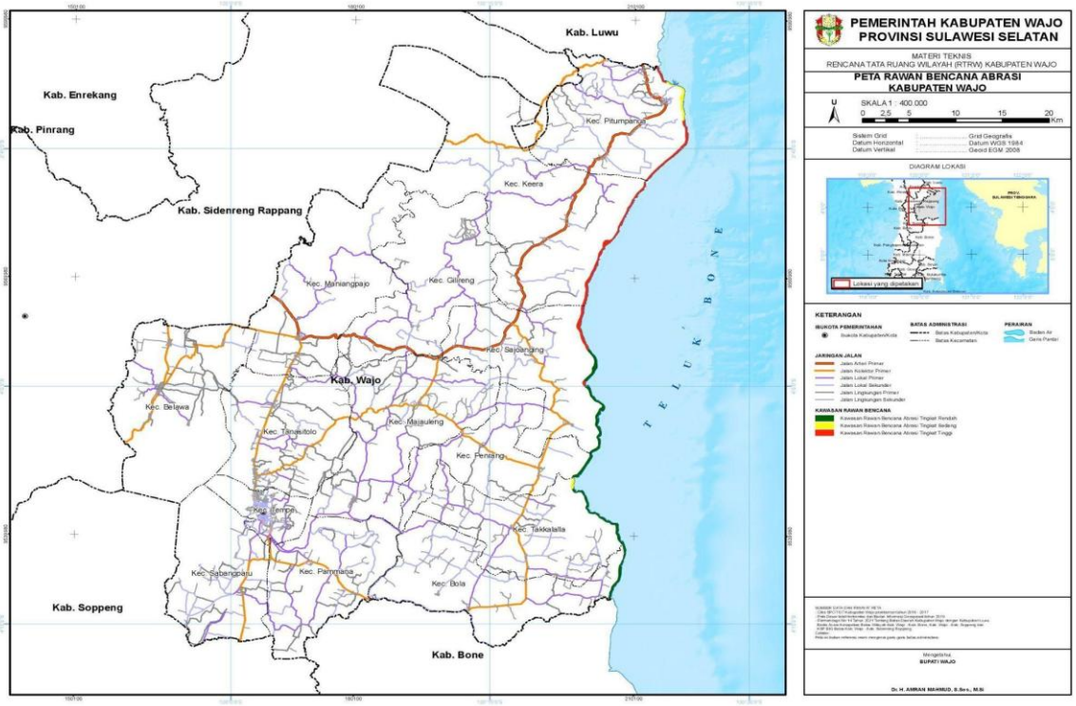
Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Gambar 2. 11
Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Wajo



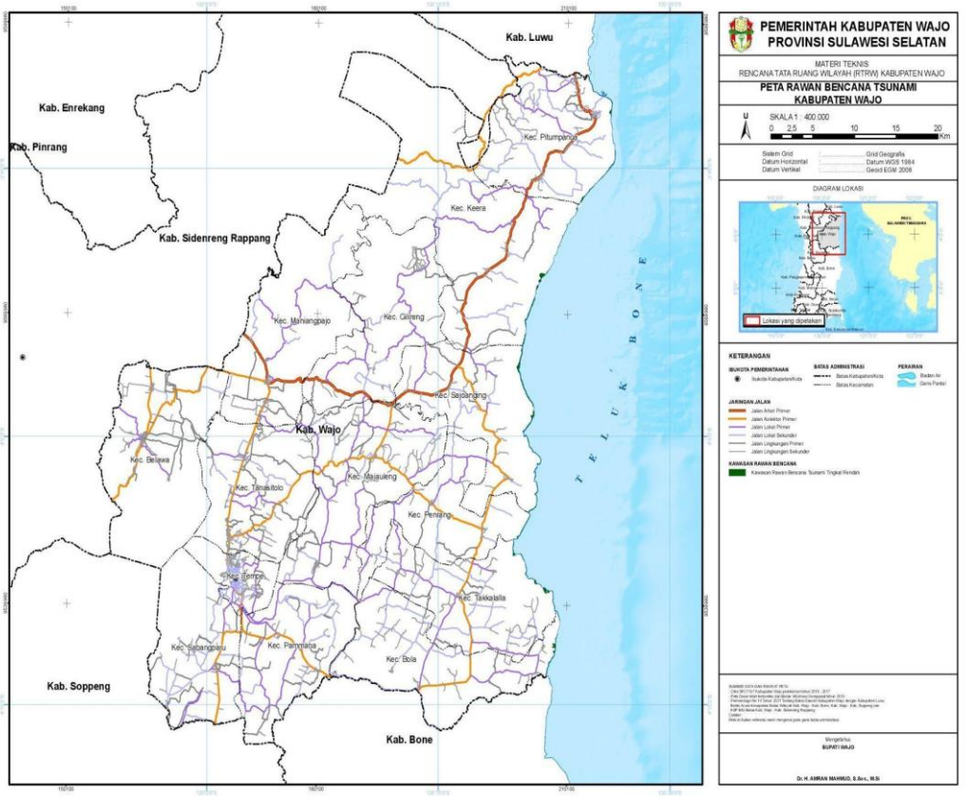
Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Gambar 2. 12
Peta Rawan Bencana Abrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042

Gambar 2. 13
Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-204

2.1.5.1. Indeks Risiko Bencana

Kondisi geografis seperti letak geografis, topografi, jenis tanah, dan iklim dapat menentukan jenis bencana alam yang mungkin terjadi di suatu wilayah, dan memungkinkan untuk melakukan pemetaan zona-zona rawan bencana. Bencana alam yang terjadi memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan. Indeks Risiko Bencana merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

Tabel 2. 20
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	179,20	179,20	179,20	156,96	141,09
Sulawesi Selatan	159,49	154,87	150,07	144,5	
Nasional	141,65	138,81	135,56	132,25	

Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/-irbi

Kabupaten Wajo memiliki risiko bencana tinggi karena berada pada Sesar Walanae, yang merupakan patahan besar yang membentang di sepanjang bagian barat daya Sulawesi. Keberadaan tersebut menempatkan Kabupaten Wajo memiliki risiko terhadap bencana gempa bumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dan likuifaksi akibat aktivitas tektonik dan seismik di Sesar Walanae.

Bencana banjir yang terjadi setiap tahun juga berisiko terhadap penurunan daya dukung lingkungan berupa sedimentasi Danau Tempe. Sedimentasi tersebut terjadi akibat erosi tanah di daerah tangkapan air dan aliran sungai yang membawa lumpur mengurangi kapasitas tampung danau, sehingga lebih mudah meluap saat volume air meningkat. Hal ini diperparah dengan maraknya alih fungsi lahan dan meningkatnya lahan kritis yang disertai dengan kondisi topografi yang cenderung datar di beberapa kawasan sehingga berpotensi terhadap terjadinya genangan air terutama di musim hujan.

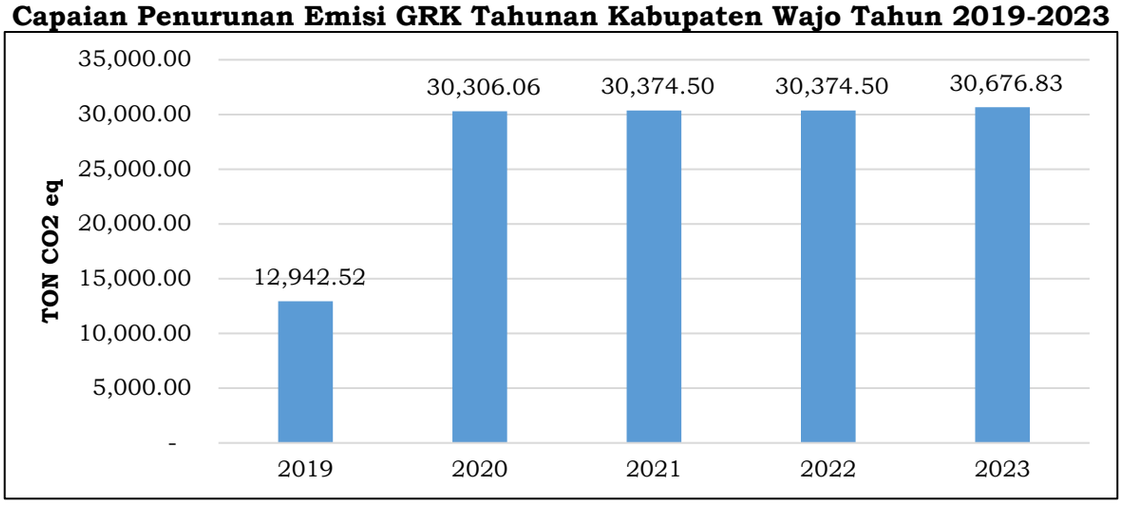
2.1.5.2. Penurunan Emisi GRK Tahunan

Selain risiko bencana akibat kondisi geografi dan topografi, Kabupaten Wajo juga rentan terhadap peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim. Perubahan iklim ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu diantaranya adalah aspek kesehatan berupa peningkatan kasus penyakit melalui vektor air, udara dan/atau peningkatan suhu. Selain itu adanya dampak peningkatan air laut di sepanjang garis pantai yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan produktif, kerusakan habitat ekosistem pesisir, dan bahkan mengancam permukiman dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir.

Perubahan iklim tersebut disebabkan oleh Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator yang menggambarkan emisi tersebut adalah Penurunan Emisi GRK Tahunan dimana capaian Kabupaten Wajo berdasarkan aplikasi AKSARA menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 12.942,52 ton CO2 eq, menjadi 30.676,83 ton CO2 eq pada tahun 2023. Penurunan emisi GRK tersebut merupakan hasil laporan aktif Kabupaten Wajo mengenai aksi mitigasi GRK pada sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi, dan sektor blue carbon, dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi yang dilaksanakan sebanyak

25 kegiatan. Gambaran capaian penurunan emisi GRK tahunan Kabupaten Wajo disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. 6
Capaian Penurunan Emisi GRK Tahunan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023



Sumber: Aplikasi AKSARA Tahun 2024

2.1.5.3. Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Kondisi keberlanjutan keanekaragaman hayati digambarkan melalui sektor pertanian dan perikanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wajo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks pertanaman (IP) padi (kali)	2	2	2	2	
Proporsi sawah irigasi (%)	30,72	29,69	29,98	29,92	
Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	500.590,99	505.573,38	509.656,93	514.033,59	519.186,77
Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	71,08	68,96	67,43	66,48	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Dinas Perikanan Kabupaten Wajo Tahun 2024 (Diolah)

2.1.6. Aspek Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Wajo ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

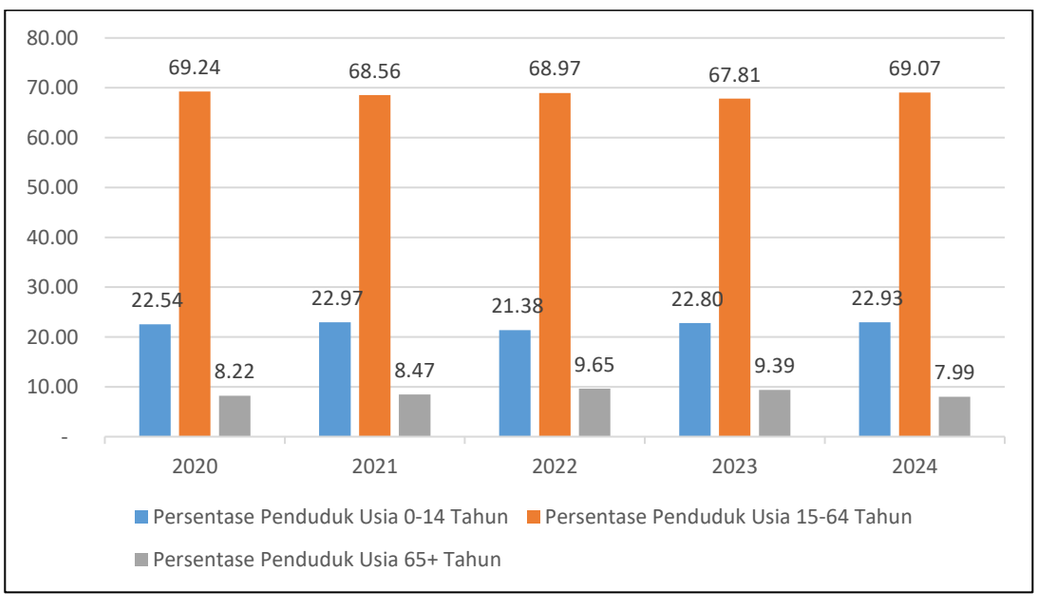
Tabel 2. 22
Kondisi Demografi Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk*)	378.024	392.437	402.066	407.873	400.699
Laju Pertumbuhan Penduduk	-0,15	0,75	0,73	0,71	-1,25
Kepadatan Penduduk per Km^2	151,00	152,00	146,00	148,00	261,73
Rasio Jenis Kelamin	94,37	94,52	94,62	94,70	95,60

*Sumber : *) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2025, Diolah*
BPS Kabupaten Wajo 2024

Rasio ketergantungan yang semakin tinggi ini mengindikasikan bahwa beban bagi penduduk usia produktif akan semakin besar, karena407.873 mereka harus mendukung populasi nonproduktif yang semakin besar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi perencanaan ekonomi dan sosial untuk mempersiapkan dukungan yang memadai bagi penduduk usia lanjut dan populasi yang tidak produktif secara ekonomi. Gambaran demografi Kabupaten Wajo selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 7
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Wajo



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024, Diolah

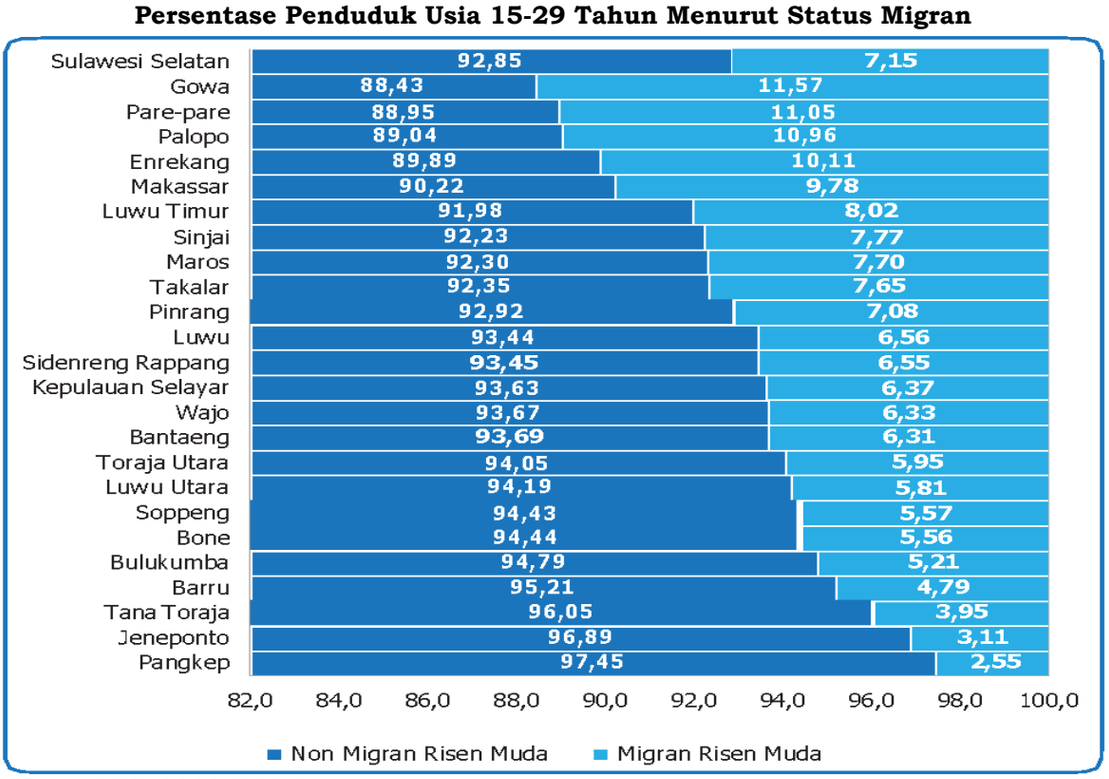
Kondisi kependudukan di Kabupaten Wajo juga dapat dilihat dari pola migrasi penduduknya. Pada tahun 2024, tercatat bahwa 93,67% penduduk usia 15-29 tahun berstatus sebagai non-migran risen, yaitu penduduk yang

telah tinggal di Kabupaten Wajo selama lima tahun terakhir. Sementara itu, 6,33% sisanya berstatus sebagai migran risen, yang berarti mereka adalah pendatang baru dalam kurun waktu tersebut.

Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pola migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah menciptakan keunggulan ekonomi yang menarik mobilitas penduduk. Banyak orang memilih pindah ke wilayah lain untuk mencari peluang atau sumber daya yang tidak tersedia di daerah asal mereka, umumnya dengan alasan ekonomi. Biasanya, penduduk akan melakukan migrasi ke wilayah yang lebih dekat dengan pusat-pusat ekonomi yang unggul.

Di Sulawesi Selatan, fenomena migrasi penduduk berdasarkan usia produktif dapat dilihat dengan jelas pada grafik berikut, yang menunjukkan pola perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Fenomena ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana daya tarik ekonomi suatu wilayah dapat memengaruhi pola migrasi, terutama di kalangan penduduk usia produktif.

Grafik 2. 8
Persentase Penduduk Usia 15-29 Tahun Menurut Status Migran



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi Kabupaten Wajo dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, produktivitas padi, dan jumlah produksi perikanan.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Wajo menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu pertumbuhan sebesar 2,38 persen di tahun 2022 menurun menjadi 1,43 persen pada tahun 2023. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Wajo berada pada posisi terendah di antara 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.

Tabel 2. 23
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%)

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2020	-1,17	-0,25	2,19	-0,71	-2,07
2021	6,77	5,53	6,15	4,64	3,7
2022	2,38	5,23	6,18	5,09	5,31
2023	1,43	3,77	3,33	4,51	5,05
2024	4,52				

Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

2.2.1.2. Pendapatan Per Kapita

Jumlah pendapatan yang diperoleh setiap penduduk di Kabupaten Wajo tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi, dan berada pada urutan kelima tertinggi setelah Makassar, Luwu Timur, Pangkep dan Maros. Adapun perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Wajo dan perbandingannya dengan kabupaten tetangga dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 24
Pendapatan Per kapita
Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, dan Provinsi Sulawesi Selatan
(Juta Rupiah/Orang/Tahun)

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI
2020	52,16	45,68	48,42	55,67
2021	58,55	48,67	52,67	59,65
2022	63,43	53,48	57,95	65,59
2023	63,61	57,02	62,58	69,70
2024	63,61			

Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, pendapat per kapita menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) per kapita mencapai Rp 63,61 juta, lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Soppeng mencatat PDRB per kapita sebesar Rp62,58 juta pada tahun yang sama.

2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan kondisi dimana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dapat menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membatasi partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Wajo pada tahun 2024 adalah 6,47%, mengalami penurunan sebesar 0,26% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,73%.

Tabel 2. 25
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (%)

TAHUN	WAJO	PROVINSI	NASIONAL
2020	6,95	8,72	9,82
2021	6,46	8,78	10,14
2022	6,57	8,63	9,54
2023	6,73	8,7	9,36
2024	6,47	7,77	

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Wajo pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,362, menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif moderat. Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki Indeks Gini sebesar 0,377 pada September 2024, Kabupaten Wajo memiliki tingkat ketimpangan yang hampir setara dengan rata-rata provinsi.

Tabel 2. 26
Indeks Gini Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2020	0,355	0,404	0,403	0,389	0,385
2021	0,361	0,383	0,406	0,382	0,381
2022	0,375	0,376	0,386	0,377	0,381
2023	0,362	0,389	0,390	0,377	0,388
2024					

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Peningkatan atau penurunan TPT menjadi pengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka semakin rendah tingkat kesempatan kerja yang tersedia, dan sebaliknya.

Berdasarkan data yang tersedia, TPT di Kabupaten Wajo menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2023, namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2024. Penurunan signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dengan TPT berkurang hampir setengahnya. Namun, pada tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar 0,21% dibandingkan tahun

sebelumnya. Bahkan TPT Kabupaten Wajo pada tahun 2023 (2,1%) lebih rendah dibandingkan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, serta berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Tabel 2. 27
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

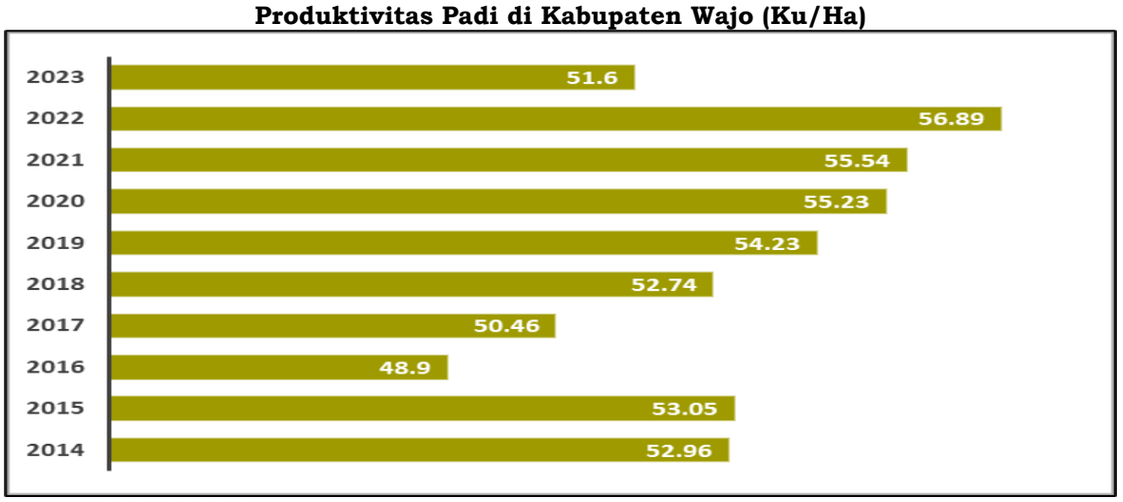
TAHUN	WAJO	BONE	SOPPENG	PROVINSI	NASIONAL
2020	4,33	3,2	4,42	6,31	7,07
2021	4,32	4,15	3,92	5,72	6,49
2022	2,54	2,27	3,4	4,51	5,86
2023	2,1	2,88	4,34	4,33	5,32
2024	2,31				

Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

2.2.1.6. Produktivitas Padi

Indikator aspek kesejahteraan ekonomi lainnya yang perlu diperhatikan adalah Produktivitas Padi yang menunjukkan rata-rata hasil produksi padi per satuan luas dalam satu tahun. Sejak tahun 2014, produktivitas padi Kabupaten Wajo bergerak dari 48,9 kuintal per hektar hingga 56,89 kuintal per hektar. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang meningkat sebanyak 5,29 kuintal per hektar dari tahun 2021. Peningkatan produktivitas tersebut terjadi karena meningkatnya luas areal tanam pada tahun 2022 menjadi 67 hektar, sebagai dampak dari curah hujan yang mendukung, adanya penambahan bantuan benih padi dari pemerintah provinsi, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian baik dari provinsi maupun pusat.

Grafik 2. 9
Produktivitas Padi di Kabupaten Wajo (Ku/Ha)



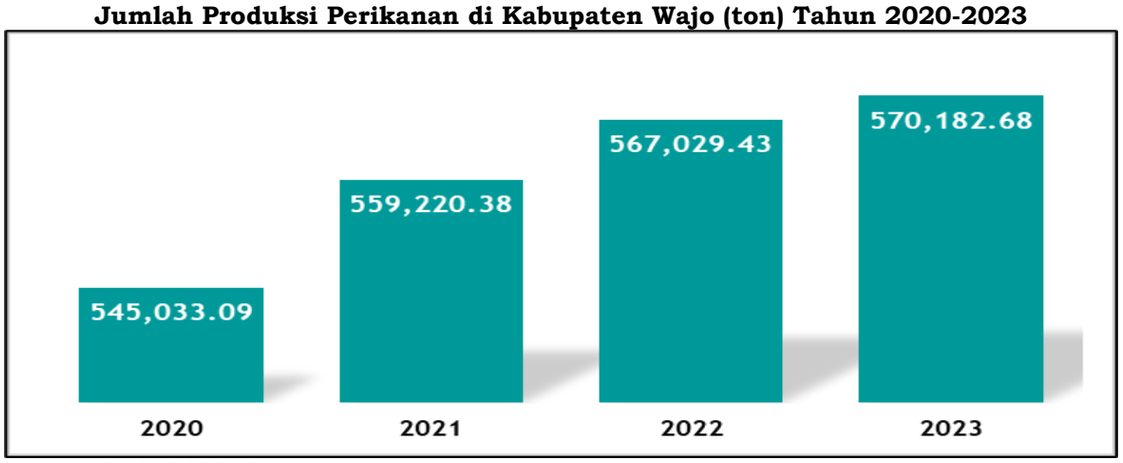
Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.1.7. Jumlah Produksi Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jumlah produksi perikanan merupakan nilai total produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Produksi perikanan di Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, yaitu dari 545.033,09 ton menjadi 570.182,68 ton atau terjadi bertumbuh sebesar 4,41 persen. Hal ini terjadi karena dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, antara lain pelaksanaan *restocking* atau penebaran benih ikan setiap tahun yang bertujuan untuk menyeimbangkan populasi perikanan, peningkatan produksi udang vaname, peningkatan minat budidaya kolam dan minapadi, pengembangan budidaya sistem bioflok pada lahan yang terbatas, serta tersedianya sarana penangkapan yang memadai.

Grafik 2. 10
Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Wajo (ton) Tahun 2020-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo dapat diketahui dari kesejahteraan sosial budaya yang ditunjukkan oleh beberapa kondisi bidang kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender.

Gambaran kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Wajo dapat diketahui dengan melihat usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak, penanganan Tuberkulosis serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesehatan ibu dan anak diwakili oleh beberapa indikator, yaitu persentase persalinan di fasilitas kesehatan, jumlah kematian ibu, dan prevalensi stunting pada balita. Sedangkan penanganan Tuberkulosis diwakili oleh cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, serta angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis. Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Wajo disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Wajo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,49	72,62	72,97	73,25	
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	96,9	100	100	99	89,40
Prevalensi Stunting pada Balita (%)	36,6	22,6	28,6	27,4	
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)* (%)	44.87	62,29	78.62	71,27	

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)* (%)	88,64	89,24	93.81	89,07	89,90
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	82,32	84,85	88,63	81,73	80,22

Sumber: BPS, 2025 (Diolah); Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2023

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional juga dapat menjadi indikator untuk menggambarkan aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap penduduk secara menyeluruh, agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Jaminan Kesehatan Nasional diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya *(managed care).*

Kepesertaan JKN Kabupaten Wajo meningkat dari 82,32 persen di tahun 2020 menjadi 88,63 persen di tahun 2022. Beberapa faktor yang memberikan peluang terjadinya peningkatan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, aksesibilitas terhadap fasilitas pendaftaran dan layanan kesehatan termasuk di wilayah perdesaan, implementasi kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan terhadap perluasan cakupan jaminan kesehatan, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Meskipun demikian, berdasarkan capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2020 hingga 2023, Kabupaten Wajo belum mampu mencapai *universal health coverage.*

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yang mengukur tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa lama individu-individu dalam suatu populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa

depan. Angka Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sedangkan angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 10 tahun mengalami tren peningkatan, dari angka 6,33 tahun pada 2013 menjadi 7,45 tahun di tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Wajo yang berusia 25 ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII. Angka tersebut masih berada di bawah provinsi dan nasional tahun 2023, yang telah mencapai angka 8,76 tahun dan 8,77 tahun. Bahkan dalam konteks global, standar pendidikan yang tinggi di beberapa negara maju seperti Jepang atau negara-negara Eropa dapat memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 12 tahun.

Tabel 2. 29
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun)

TAHUN	WAJO	PROVINSI	NASIONAL
2020	6,81	8,38	8,48
2021	7,05	8,46	8,54
2022	7.16	8.63	8,69
2023	7,45	8,76	8,77
2024	7,46		

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Salah satu indikator yang mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah adalah Anak Tidak Sekolah (ATS). ATS merujuk pada anak-anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang tidak atau belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA sederajat.

Jumlah ATS di suatu daerah dapat berkontribusi pada penurunan rata-rata lama sekolah dalam populasi. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang ditempuh oleh seluruh individu dalam populasi dengan jumlah total individu. Jika banyak anak yang tidak sekolah, mereka akan memberikan kontribusi nol terhadap total tahun

sekolah, yang pada akhirnya menurunkan rata-rata lama sekolah secara keseluruhan.

Data ATS dapat dilihat secara agregat di berbagai sektor berdasarkan kelompok masyarakat, misalnya penerima bantuan sosial. Namun, data ini belum memberikan gambaran menyeluruh karena terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama UNICEF mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID). Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF untuk memperkenalkan dan memberikan pendampingan kepada kabupaten dalam pengumpulan data ATS melalui aplikasi SIPBM. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah ATS di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 tercatat sebanyak 413 anak, yang terdiri atas 40 anak usia 7-12 tahun, 209 anak usia 13-15 tahun, dan 164 anak usia 16-18 tahun. Data ini memberikan pandangan lebih detail mengenai populasi ATS dan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi pendidikan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Tabel 2. 30
Anak Tidak Sekolah Kabupaten Wajo Tahun 2023

No	KECAMATAN	ATS (ANAK TIDAK SEKOLAH)		
		Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
1	PENRANG	0	0	0
2	MANIANGPAJO	5	27	33
3	SAJOANGING	5	36	17
4	KEERA	1	30	4
5	BOLA	2	0	0
6	TAKKALALLA	1	0	0
7	SABBANGPARU	2	3	5
8	BELAWA	4	73	68
9	TANASITOLO	3	4	4
10	PITUMPANUA	9	16	25
11	PAMMANA	6	17	6
12	MAJAULENG	2	3	2
13	GILIRENG	0	0	0
14	TEMPE	0	0	0
	TOTAL	**40**	**209**	**164**

Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Mendorong harapan lama sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Wajo, karena semakin lama individu mengenyam pendidikan, semakin besar pula pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang mereka miliki. Pendidikan yang berkepanjangan membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademik, keterampilan berpikir kritis, serta sikap yang positif terhadap pembelajaran seumur hidup. Hal ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompleks, serta berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Dengan harapan lama sekolah yang tinggi, SDM di Kabupaten Wajo lebih siap menghadapi persaingan, baik secara nasional maupun internasional.

Data harapan lama sekolah di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten. Secara khusus, Kabupaten Wajo mengalami kenaikan dari 12,51 tahun pada tahun 2013 menjadi 13,31 tahun di tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Wajo cenderung berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional. Sulawesi Selatan memulai dengan angka 12,1 taun pada tahun 2013 dan mencapai 13,14 tahun pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan bertahap yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Wajo. Sementara itu, tingkat nasional secara konsisten memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Wajo dan Sulawesi Selatan, mulai dari 12,39 tahun pada tahun 2014 hingga mencapai 13,15 tahun pada tahun 2023.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Wajo dan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, keduanya belum sepenuhnya menyamai tingkat nasional. Peningkatan di Wajo relatif stabil tetapi dengan laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan peningkatan rata-rata nasional, yang bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam meningkatkan akses atau kualitas pendidikan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, tren positif ini mengindikasikan adanya kemajuan, namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis agar Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih kompetitif dengan standar pendidikan nasional di masa depan.

Tabel 2. 31
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun)

TAHUN	WAJO	PROVINSI	NASIONAL
2020	13,14	13,45	12,98
2021	13,15	13,52	13,08
2022	13,3	13,53	13,1
2023	13,31	13,54	13,15
2024	13,32		

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.3.3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Rendahnya angka rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap indikator proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Meningkatkan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sangat penting untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Wajo. Pendidikan tinggi memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam berbagai sektor, termasuk industri, teknologi, dan layanan publik. Dengan jumlah tenaga kerja berkualifikasi tinggi yang lebih besar, Kabupaten Wajo dapat meningkatkan daya saingnya, mendorong inovasi, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian daerah.

Dalam tiga tahun terakhir, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan. Tahun 2021, dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wajo, 8-9 orang diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi. Meski sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 8,41%, tapi di tahun 2023 bertambah dua kali lipat menjadi 8,63%.

Grafik 2. 11
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2023



Sumber: BPS

Kenaikan tersebut menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah, namun angkanya masih terlalu rendah. Walau tak ada standar ideal terkait proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi, tapi dalam konteks negara berkembang, angka 20-30% dinilai sebagai kebutuhan standar karena negara butuh lebih banyak penduduk yang punya kualifikasi pendidikan tinggi untuk mendorong pembangunan nasional dan daerah.

Meningkatkan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di sebuah daerah menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah akses terbatas ke perguruan tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, jarak yang jauh ke lembaga pendidikan tinggi, dan terbatasnya lembaga pendidikan berkualitas menjadi kendala besar. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup di kota besar, membuat pendidikan tinggi sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Meski ada program beasiswa atau subsidi, belum semua penduduk mampu mengaksesnya dengan mudah, sehingga banyak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Selain akses dan biaya, tantangan lain datang dari kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja lokal. Di beberapa daerah, pandangan tradisional dan kondisi ekonomi keluarga membuat generasi muda lebih memilih langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Hal ini juga diperparah dengan keterbatasan tenaga pengajar berkualitas dan fasilitas pendidikan yang

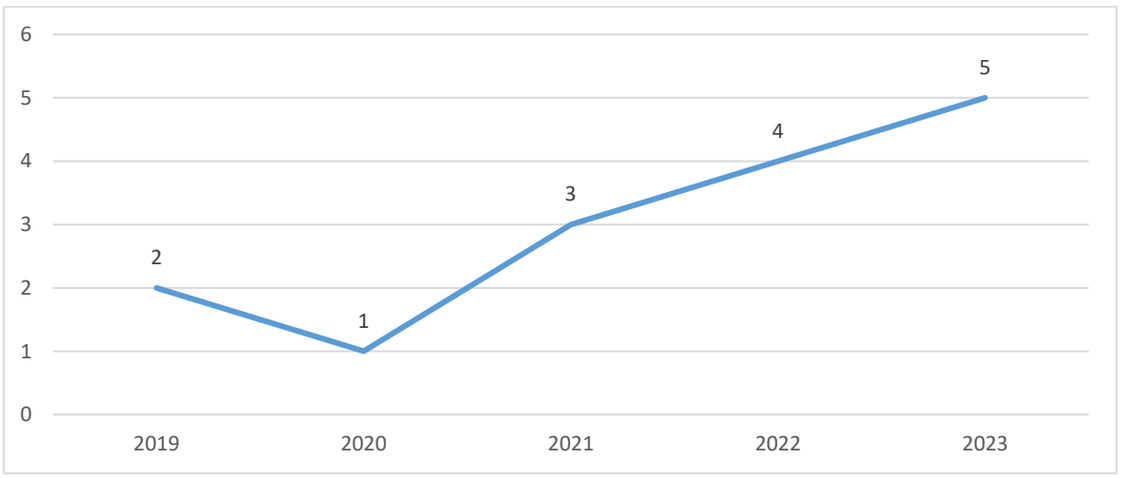
minim, yang menurunkan daya tarik pendidikan tinggi. Di beberapa daerah pula, norma budaya dan kendala gender bisa membatasi akses pendidikan, terutama bagi perempuan. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, serta relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja lokal agar pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan daerah.

2.2.4. Perlindungan Sosial Adaptif

2.2.4.1. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal penting untuk diketahui, karena hal ini mencerminkan inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan implementasi dari hak asasi manusia dan kesetaraan, sekaligus membantu mengurangi stigma dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas, sekaligus mendorong perubahan budaya organisasi menuju lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Selain itu, keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi dan kontribusi mereka dalam pasar kerja. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Wajo tahun 2020 hanya satu persen, yang selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai angka 5 persen.

Grafik 2. 12
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

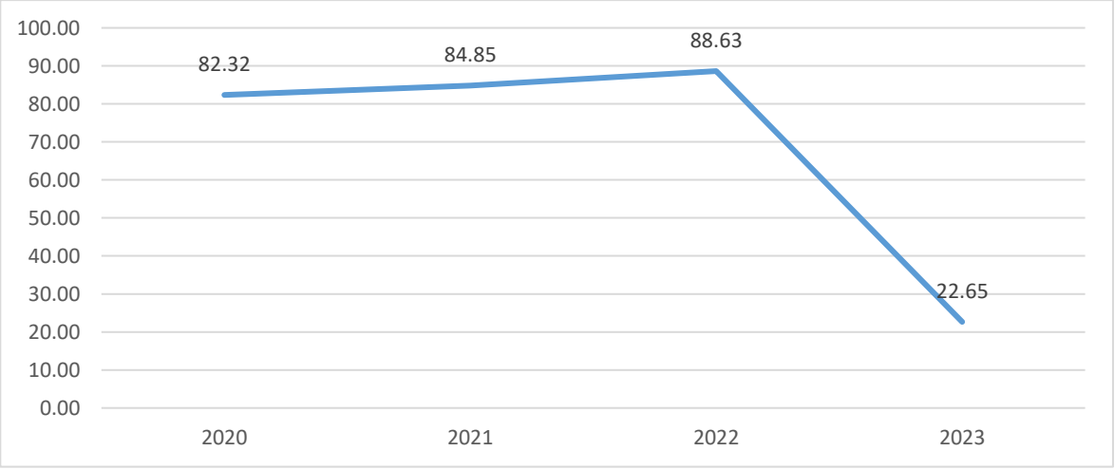
2.2.4.2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi individual dan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah program jaminan sosial yang menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, tingkat formalitas pekerjaan, serta dukungan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 23.419 peserta Jamsostek yang mencakup beberapa pekerjaan diantaranya yaitu sektor industri, sektor jasa, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor

lainnya. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Wajo mengalami tren peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Tahun 2020, peserta program Jamsostek sebesar 82,32 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 88,63 persen. Akan tetapi pada tahun 2023, peserta program BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan menjadi 22,65 persen akibat bertambahnya pekerja atau buruh yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek pada sektor formal tempat mereka bekerja.

Grafik 2. 13
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kondisi bidang keagamaan dan kebudayaan menjadi gambaran aspek kesejahteraan bidang sosial budaya, yang diukur melalui persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, serta persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah.

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang berada di darat dan/atau di air.

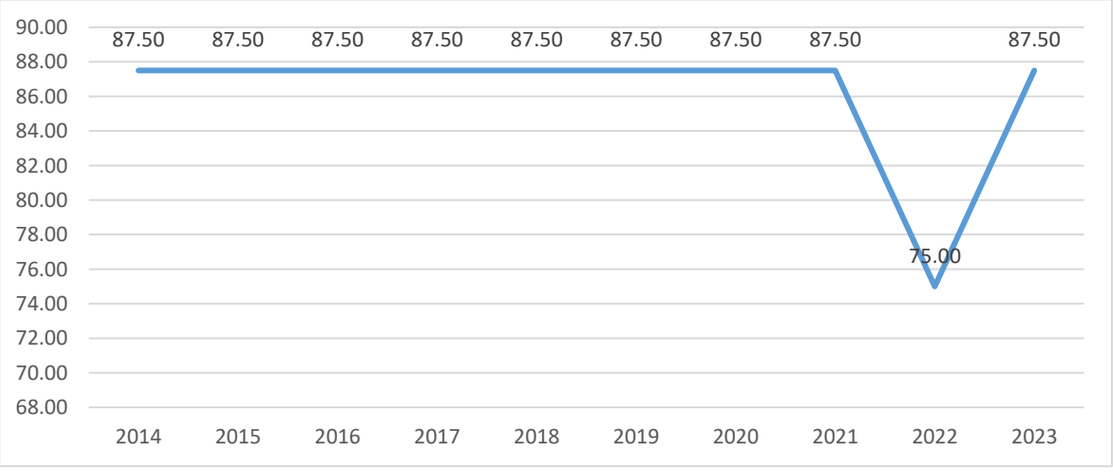
Tujuan pelestarian cagar budaya adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat kepribadian bangsa. Saat ini di Kabupaten Wajo persentase benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs cagar budaya

yang telah ditetapkan sudah 21 persen terhadap total yang sudah diregistrasi.

Adapun untuk kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi sebagai berikut:

- Kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Kegiatan Hari Raya Idul Fitri
- Kegiatan Hari Raya Idul Adha
- Pawai Tahun Baru Islam
- Maulid Nabi Muhammad SAW
- STQH (Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits)
- MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran)
- Penataran Mubaligh

Grafik 2. 14
Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi Kabupaten Wajo (Persen)



Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo, 2023 (Diolah)

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Wajo dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, dan indeks ketimpangan gender.

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dipengaruhi oleh dimensi kualitas legalisasi dan struktur, dimensi kualitas

ketahanan fisik, dimensi kualitas ketahanan ekonomi, dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, dan dimensi kualitas ketahanan sosial budaya. Selama ini, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengukuran IKK terhadap provinsi, namun tidak untuk kabupaten/kota, sehingga tidak terdapat data terkait indikator ini.

2.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator untuk mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Indikator ini dibentuk dari indeks perlindungan khusus anak dan indeks perlindungan hak anak. Indeks perlindungan anak Kabupaten Wajo tahun 2023 berada di angka 57,2, namun angka tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 60,37.

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2. 32
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Tahun	Wajo	Sulawesi Selatan	Nasional
2020	0,467	0,427	0,472
2021	0,391	0,41	0,465
2022	0,428	0,39	0,459
2023	0,475	0,366	0,447
2024			

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Dalam Literasi Membaca Dan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional

Daya saing sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja dan dalam ekonomi secara keseluruhan. Tingginya daya saing sumber daya

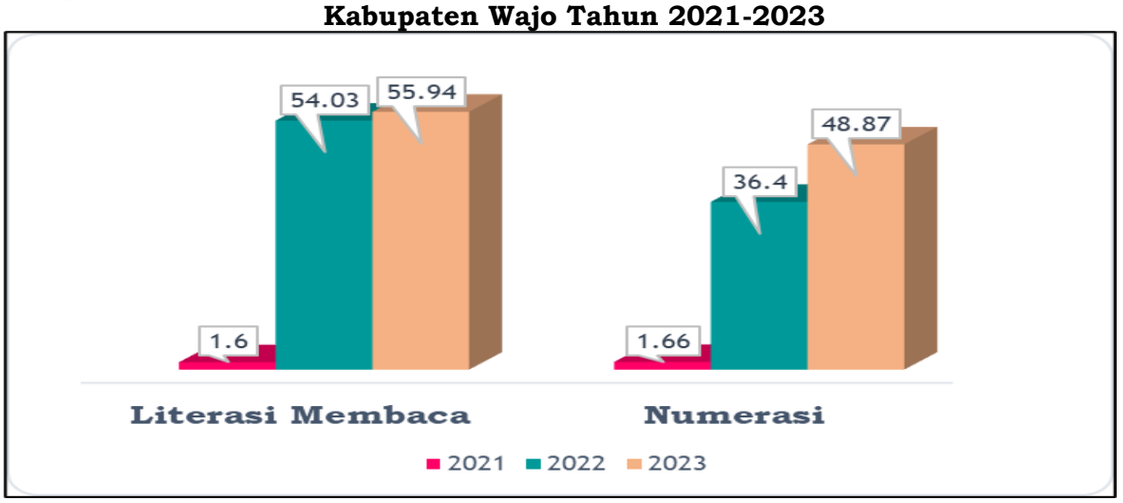
manusia berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing ini di tingkat nasional maupun daerah. Di Kabupaten Wajo, gambaran daya saing sumber daya manusia dapat dilihat melalui beberapa indikator pendidikan.

Salah satu indikator utama untuk menilai kemajuan sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan, yang tercermin dari hasil capaian literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuannya dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik informasional maupun fiksi. Sementara itu, kemampuan numerasi mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuannya berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan.

Di Kabupaten Wajo, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca dan numerasi pada asesmen tingkat nasional mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, kemampuan literasi membaca meningkat secara signifikan, dari hanya 1,6 persen menjadi 54,03 persen, atau naik sebesar 52,43 persen. Kemajuan ini berlanjut dari tahun 2022 ke 2023, dengan peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar minimum literasi membaca dari 54,03 persen menjadi 55,94 persen.

Kemajuan serupa terlihat dalam kemampuan numerasi. Pada tahun 2022, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi sebesar 36,4 persen, meningkat menjadi 48,87 persen pada tahun 2023. Namun, meskipun terjadi peningkatan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo masih belum mencapai standar kompetensi minimum nasional yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam aspek literasi dan numerasi, untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia di wilayah ini.

Grafik 2. 15
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023



Sumber: Kemendikbud

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Daya saing ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi, yang diindikasi melalui kondisi PDRB industri pengolahan, kepariwisataan, kewirausahaan dan koperasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, ekspor barang dan jasa, pajak dan retribusi, serta inflasi.

Tabel 2. 33
Kondisi Capaian Indikator Produktivitas Ekonomi Kabupaten Wajo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4.02	3,83	3,90	4,15	
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,36	0,36	0,38	0,40	
Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	26.975	29.222	39.392	347.416	
Jumlah industri kecil dan menengah (industri)	13.009	13.877	15.175	15.928	
Persentase koperasi sehat (%)	3.36	4,69	6,00	6,21	5,76
Return on Asset (ROA) BUMD (%)	9,41	15,12	19,32	16,73	

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah ekonomi pada suatu wilayah, yang berasal dari kegiatan pengolahan barang, konstruksi dan sektor-sektor manufaktur lainnya. Pengembangan sektor industri pengolahan dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi sekaligus membuka lapangan kerja. Perkembangan industri pengolahan Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan rasio PDRB industri pengolahan dari 0,04 persen di tahun 2019 menjadi 4,15 persen pada tahun 2023.

2.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator sektor pariwisata yang menggambarkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Jasa akomodasi makan dan minum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek wisata dan wisatawan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Wajo menunjukkan tren peningkatan selama 2019 hingga tahun 2023, yaitu dari 0,36 persen di tahun 2019 menjadi 0,40 di tahun 2023. Akan tetapi pertumbuhannya tidak signifikan, karena rasio PDRB tersebut konsisten pada angka 0,36 persen sejak tahun 2019 sampai 2021.

2.3.2.3. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Indikator lain yang menggambarkan kondisi sektor pariwisata adalah Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara. Sejak tahun 2019, terjadi penurunan jumlah tamu wisatawan dari 83.006 orang menjadi 26.975 orang di tahun 2020, atau berkurang sebesar 67,5 persen. Penurunan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara tersebut terjadi akibat pandemi Covid-19, sebagai dampak pemberlakuan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun peningkatan signifikan terjadi tahun 2023, dari 39.392 orang wisatawan di tahun sebelumnya menjadi 347.416 orang di tahun 2023 atau bertumbuh sebesar 88,66 persen.

2.3.2.4. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Persentase Koperasi Sehat

Kondisi sektor kewirausahaan dan koperasi diindikasikan melalui jumlah industri kecil dan menengah, serta persentase koperasi sehat. Gambaran kewirausahaan di Kabupaten Wajo sejak tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Sektor ini diindikasi oleh Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2021 yang mencapai 13.877 IKM, lalu meningkat menjadi 15.928 IKM di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah IKM sebanyak 1.298 IKM atau pertumbuhan industri sebesar 8,55 persen. Adapun kondisi koperasi di Kabupaten Wajo juga terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh Persentase Koperasi Sehat yang bertumbuh dari 3,36 persen di tahun 2019 menjadi 6,21 persen di tahun 2023. Koperasi sehat merupakan koperasi yang mampu memenuhi aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

2.3.2.5. *Return on Asset* (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) BUMD merupakan alat ukur seberapa efektif BUMD dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sementara capaian RoA yang rendah mengindikasikan bahwa BUMD perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. RoA BUMD Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sebesar 3,18 persen, meningkat menjadi 19,32 persen di tahun 2022, namun menurun di tahun 2023 menjadi 16,73 persen. Daya saing ekonomi yang telah diuraikan dalam beberapa indikator tersebut perlu dibangun dalam kerangka keberlanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau.

2.3.2.6. Indeks Kapabilitas Inovasi

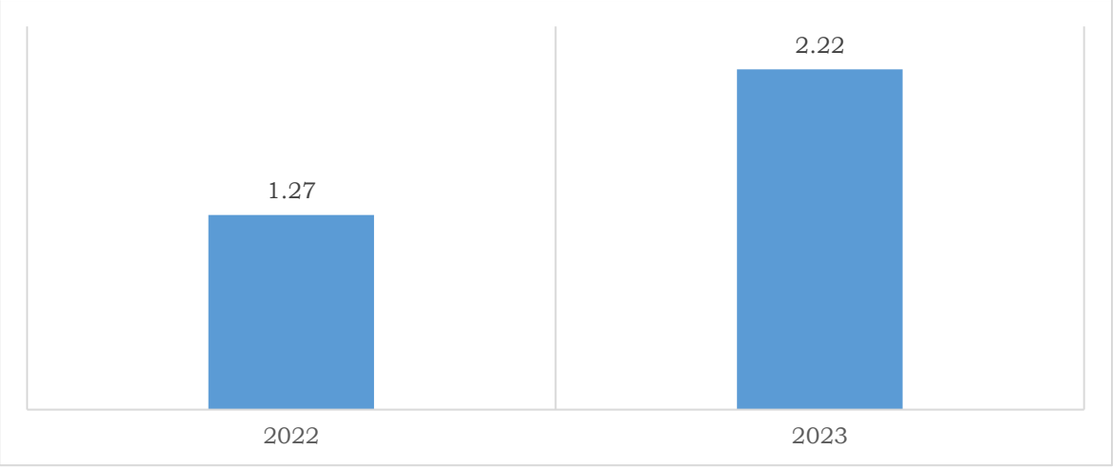
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, satu-satunya instrumen yang dibutuhkan adalah inovasi karena jika hanya mengandalkan sumber daya alam, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring habisnya cadangan sumber daya alam. Inovasi akan terus menghasilkan nilai tambah dalam struktur perekonomian daerah meski sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu penting bagi Kabupaten Wajo

untuk meningkatn kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah adalah indeks kapabilitas inovasi. Kapabilitas Inovasi merupakan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di suatu daerah. Selain Itu, menggambarkan ruang lingkup lingkungan lokal dalam mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas dan kemampuan daerah untuk mentransformasikan ide menjadi barang dan jasa baru, serta mengimplementasikan perubahan yang signifikan dan berdampak positif.

Karena nilai indeks kapabilitas inovasi baru tersaji dalam dua tahun terakhir, maka kondisi indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo yang bisa diamati hanya di tahun 2022 dan 2023. Nilai kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo pada tahun 2023 mencapai 2,22, capaian ini meningkat dibandingkan nilai tahun tahun 2022 yang hanya mencapai 1,27. Meski mengalami kenaikan, skor indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo masih tergolong rendah.

Grafik 2.16
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Wajo Tahun 2022-2023

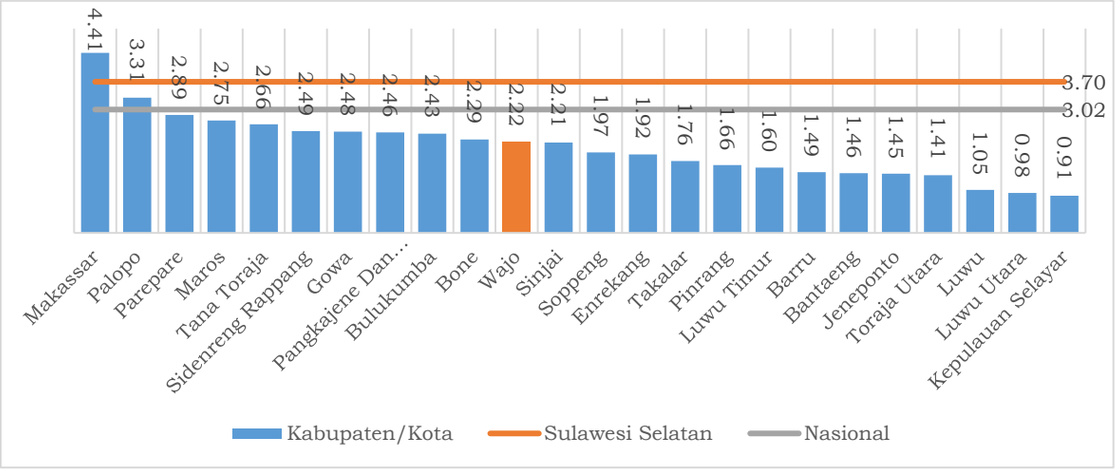


Sumber: BRIN

Jika Kabupaten Wajo dikomparasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat angka tersebut masih relatif rendah. Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapat nilai indeks sebesar 3,70, sementara nasional angkanya 3,02. Nilai indeks Kabupaten Wajo menempati urutan ke-11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,

masih cukup rendah. Masih rendahnya indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Wajo disebabkan karena masih ada beberapa variabel pembentuk indeks yang rendah seperti publikasi ilmiah, Aplikasi kekayaan intelektual (KI), Belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dll

Grafik 2.17
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: BRIN

2.3.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati. Jika disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja maka TPAK tinggi menunjukkan partisipasi yang baik. Namun jika TPAK tinggi disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Tabel 2. 34
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Kabupaten Wajo	65,99	64,58	61,13	65,78	67,75
TPAK Perempuan	47,88	45,78	39,65	47,64	
TPAK Laki-Laki	86,33	85,69	85,22	85,46	

Sumber: BPS, 2023 (Diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja perempuan yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dibandingkan penduduk laki-laki. Berdasarkan

jenis kelamin, pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,46 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 47,46 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 7.99 poin. Kondisi ini berbeda di tingkat provinsi, dimana tahun 2023 justru turun menjadi 49,62 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 50,46 persen.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Kondisi di Kabupaten Wajo, dari waktu ke waktu TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. TPAK tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, terdapat 85 orang di antaranya yang termasuk angkatan kerja, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 47 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menggambarkan bahwa laki-laki masih mendominasi dunia kerja.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

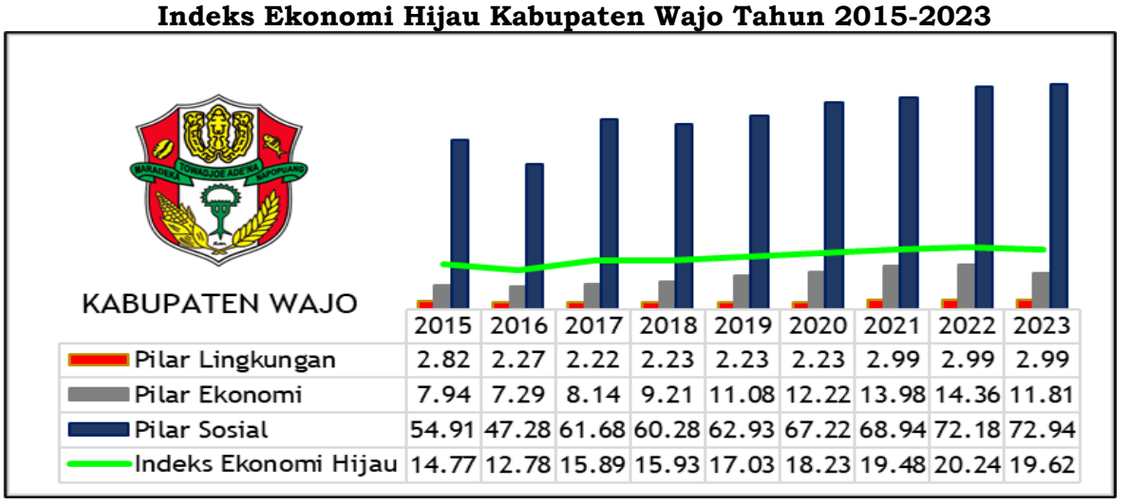
Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks komposit ini terdiri dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, dengan skala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Indeks ekonomi hijau Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2015 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan, tetapi

kembali meningkat di tahun 2017 bahkan melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2018, Indeks Ekonomi Hijau terus meningkat hingga tahun 2022 dengan capaian 20,24, lalu kembali menurun menjadi 19,62 di tahun 2023.

Capaian indeks ini selama kurun waktu 9 tahun berada pada kisaran 12,78 hingga 20,24 dan sangat dipengaruhi oleh pilar sosial. Akan tetapi, capaian tersebut masih berada di bawah angka 25 atau level kurang, yang berarti bahwa Kabupaten Wajo belum bertransformasi menuju ekonomi hijau.

Grafik 2. 18
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Wajo Tahun 2015-2023



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pilar Lingkungan	2.82	2.27	2.22	2.23	2.23	2.23	2.99	2.99	2.99
Pilar Ekonomi	7.94	7.29	8.14	9.21	11.08	12.22	13.98	14.36	11.81
Pilar Sosial	54.91	47.28	61.68	60.28	62.93	67.22	68.94	72.18	72.94
Indeks Ekonomi Hijau	14.77	12.78	15.89	15.93	17.03	18.23	19.48	20.24	19.62

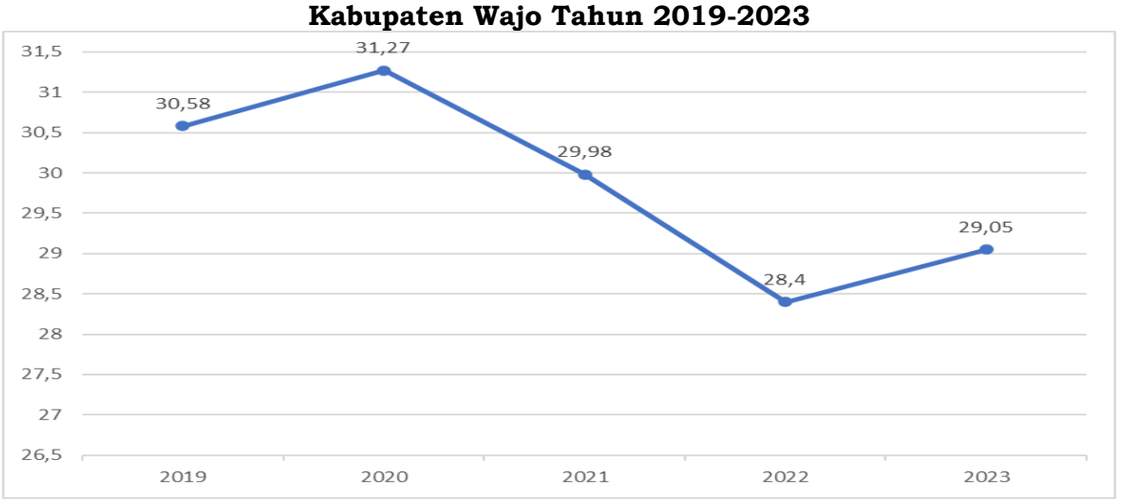
Sumber: Bappelitbangda Provinsi Sulsel

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen dalam PDRB dari sisi pengeluaran yang memberikan indikator untuk mengetahui pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Datam menunjukkan PMTB Kabupaten Wajo mengalami fluktuasi dengan tren yang menurun dari 30,58 persen di tahun 2019 menjadi 29,05 persen di tahun 2023. Meskipun sedikit menurun, peran PMTB di Kabupaten Wajo masih tetap signifikan karena hampir sepertiga dari PDRB berasal dari komponen tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan investasi punya daya ungkit yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2. 19
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2019-2023 (Diolah)

2.3.4.2. Net Ekspor Barang dan Jasa

Daya saing ekonomi daerah juga dapat ditunjukkan melalui Net Ekspor Barang dan Jasa melalui kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu daerah sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

Tabel 2. 35
Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (% PDRB)

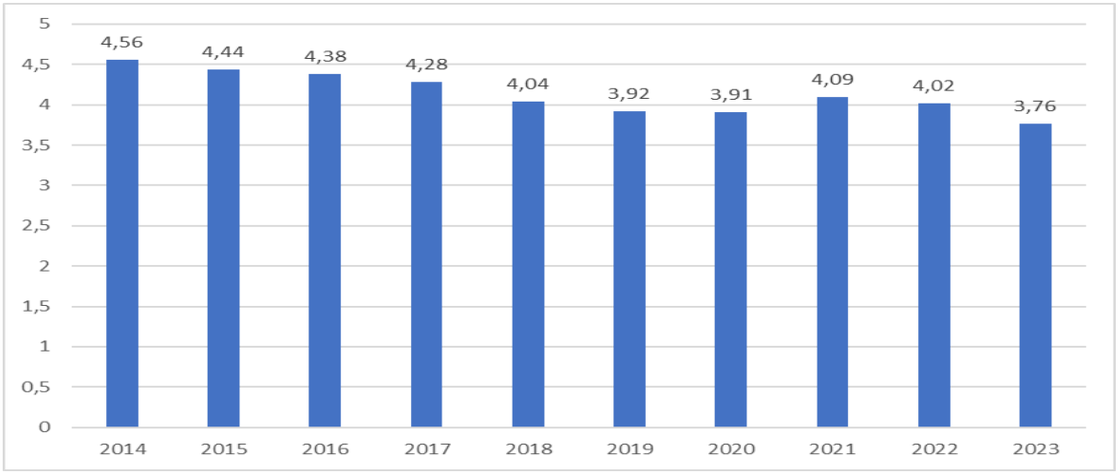
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	-3,26	-0,7	1,93	-1,14	
Provinsi	16,09	-3,05	-0,35		
Nasional	15,64	18,79	20,9		

Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

2.3.4.3. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi

Hal penting lainnya yang perlu dicermati untuk menggambarkan daya saing daerah adalah **Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi.** Data menunjukkan Kontribusi PDRB Kabupaten Wajo terhadap terhadap rovinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,76 persen di tahun 2023. Angka ini turun dari posisi 4,56 persen di tahun 2014, sekaligus mencerminkan bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Wajo masih relatif lambat dibanding rata-rata peningkatan PDRB kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2. 20
Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Wajo terhadap Provinsi
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

Daya saing ekonomi daerah terkait erat dan dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro daerah. Daya saing ekonomi daerah yang baik dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ini, jika berkelanjutan dan stabil, dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah. Stabilitas ekonomi makro berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, seperti inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang konsisten, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan daya saing ekonomi daerah.

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

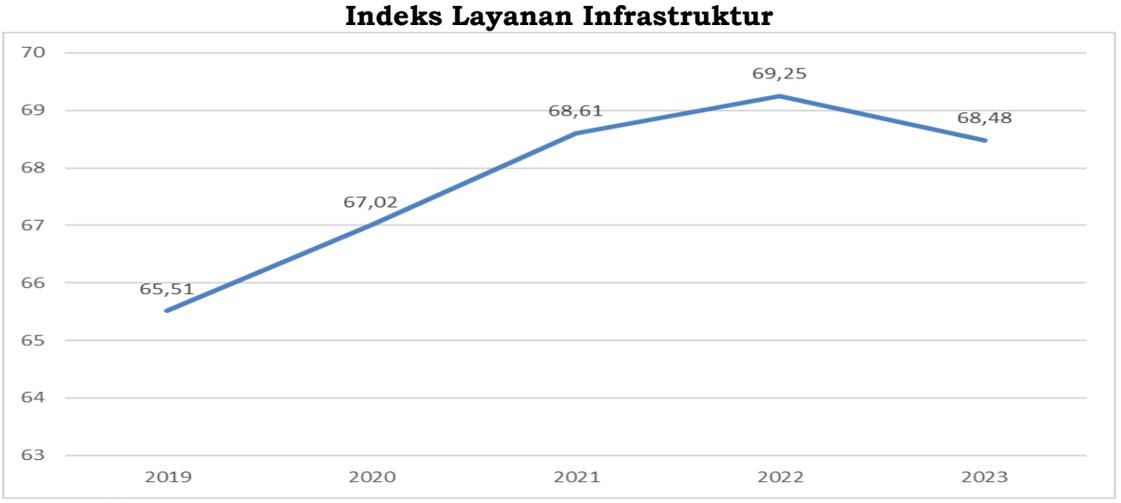
Aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di wilayah Kabupaten Wajo digambarkan dari capaian indeks infrastruktur dan hunian penduduk.

2.3.5.1. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan alat ukur untuk menilai kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik infrastruktur tersedia dan dimanfaatkan, serta bagaimana hal itu mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Wajo selama lima

tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan nilai indeks yang mencapai 68,48 poin pada tahun 2023.

Grafik 2. 21
Indeks Layanan Infrastruktur



Sumber: BPS, 2019 – 2023 (diolah)

2.3.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Tahun 2018 hingga 2022 capaian akses rumah tangga dengan hunian layak mengalami tren peningkatan serta lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasional. Pemenuhan akses hunian layak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui peningkatan RTLH khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan hunian layak dilakukan dengan upaya kemudahan dalam akses pembiayaan (KPR) serta mendorong pengembang perumahan untuk penyedian prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai khususnya akses air minum dan sanitasi layak.

Tabel 2. 36
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	73,85	75,00	72,68		
Provinsi	64,24	69,11	69,90		
Nasional	59,54	60,90	60,66		

Sumber: BPS, 2018 – 2022 (diolah)

2.3.5.3. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan perdesaan di Kabupaten Wajo, dengan melakukan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa. Indikator ini ditentukan dengan mengelompokkan desa menjadi 5 klasifikasi status, yaitu status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Desa mandiri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang kuat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan.

Dari hasil verifikasi tingkat kabupaten, hasil pengukuran **Indeks Desa Membangun** (IDM) Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Wajo

Status Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat tertinggal	0	0	0	0	
Tertinggal	6	3	0	0	
Berkembang	119	110	96	82	
Maju	17	27	40	52	
Mandiri	0	2	6	8	
Jumlah Desa	142	142	142	142	142
Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,41	4,23	5,63	10,56

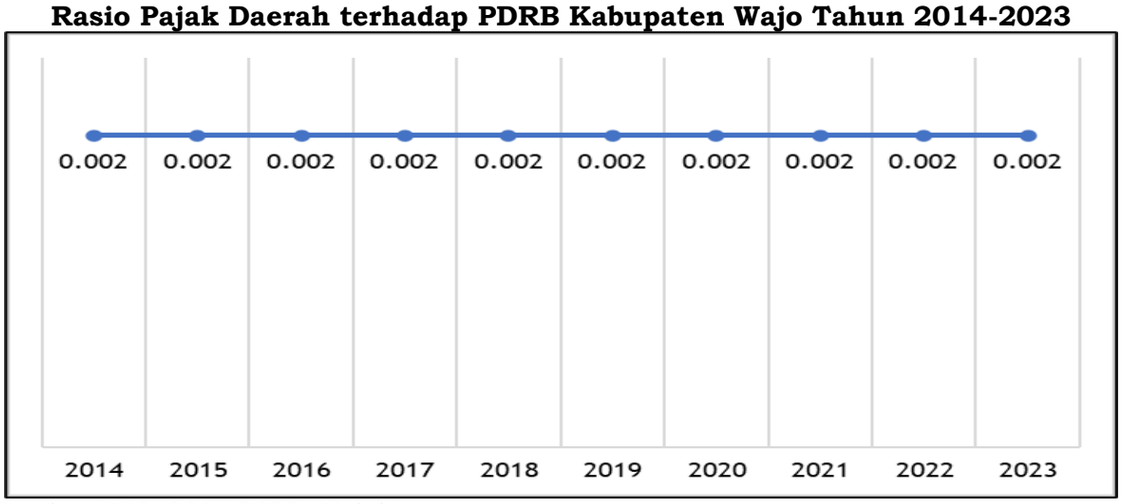
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, 2025

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan kinerja penerimaan pajak daerah untuk membiayai keperluan daerah melalui sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka ketergantungan terhadap pembiayaan melalui hutang akan semakin berkurang. Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Wajo sejak tahun 2014 hingga 2023 konsisten di angka 0,002.

Grafik 2. 22
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Wajo Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

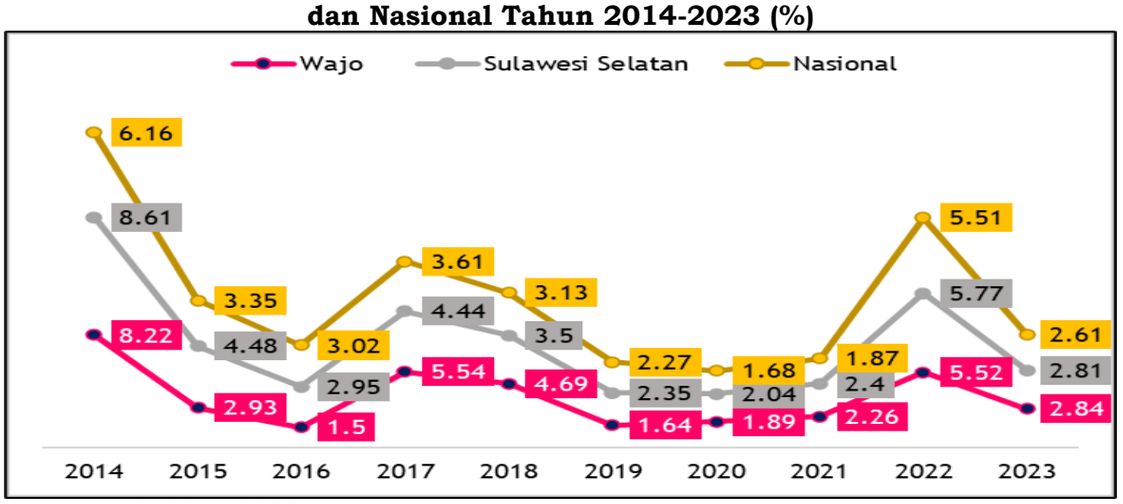
2.3.6.2. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi adalah ukuran yang penting untuk memahami tingkat perubahan daya beli uang dan stabilitas ekonomi yang mengacu pada tingkat pertumbuhan harga-harga umum barang dan jasa di suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi di Kabupaten Wajo menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2023. Laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,27 persen namun dapat terkendali hingga mengalami penurunan menjadi 2,93 persen di tahun 2015. Tingkat inflasi yang fluktuatif di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional di beberapa tahun selanjutnya cenderung memiliki pergerakan yang hampir sama.

Pencatatan indeks harga konsumen (IHK) Kabupaten Wajo merujuk pada wilayah Watampone. Berdasarkan BPS, tahun 2023 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba,

Watampone, Makassar, Parepare, dan Palopo) sebesar 2,81 persen dengan IHK sebesar 117,35. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi *(y-on-y)* tertinggi terjadi di Makassar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 117,49. Sedangkan inflasi *(y-on-y)* terendah terjadi di Palopo sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Komoditas utama penyumbang inflasi *(y-on-y)* pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang.

Grafik 2. 23
Tingkat Inflasi Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2023 (%)



Sumber: BPS, 2014-2023 (Diolah)

Pembangunan perdesaan memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing ekonomi daerah, karena perdesaan merupakan bagian integral dari ekosistem ekonomi suatu daerah. Pembangunan perdesaan yang terarah dan terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

2.3.7. Daya Saing Iklim Investasi

Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari iklim investasi. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang

transparan, stabilitas politik dan ekonomi serta infrastruktur yang memadai.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Wajo. Pelayanan umum ini diarahkan untuk melayani berbagai kepentingan publik, yang diwujudkan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengembangan inovasi daerah. Melalui pendekatan-pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan layanan yang lebih responsif, transparan, dan efektif bagi masyarakat.

Namun, dalam perjalanan pelaksanaan reformasi di Indonesia, muncul tantangan yang cukup signifikan, terutama pada gelombang pertama reformasi. Reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Menyadari hal tersebut, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government dan good governance*. Prinsip-prinsip ini diyakini secara universal sebagai fondasi utama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, indeks reformasi hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Wajo sebesar 96,56, dimana angka ini meningkat signfiikan dari posisi di tahun 2022, yang hanya sebesar 71,85. Peningkatan ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi yang meningkat dari 80,25 di tahun 2022 menjadi 87,77 di tahun 2023.

Tabel 2.38
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan

URAIAN	2022	2023	2024
Kabupaten	71,85	87,58	96,56
Provinsi	80,25	87,77	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo, 2025

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah meluncurkan program utama berupa reformasi birokrasi yang bertujuan membangun aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Reformasi birokrasi tidak hanya berarti perubahan prosedural, tetapi juga mengacu pada perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Program ini menjadi langkah besar dan sebuah pertaruhan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global pada abad ke-21.

Perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Wajo menunjukkan hasil yang positif. Selama periode 2019-2023, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Wajo meraih kategori B dengan nilai 60,69. Pada tahun 2023, indeks tersebut meningkat menjadi 65,06, menjadikan Kabupaten Wajo sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil mencapai kategori ini. Capaian ini menggambarkan komitmen Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 39
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	60,02	60,69	60,69	65,06	
Provinsi	60,07	61,18	66,16		

Sumber: Kementerian Menteri Dalam Negeri, 2023 (Diolah).

Selain dari sisi pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja pemerintah dalam pelayanan umum juga tercermin pada kinerja pemerintah dalam administrasi publik dan pemerintahan yang diukur pada indikator - indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 40
Capaian Indikator Pelayanan Publik, SPBE, Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,11	2,87	2,86	2,67	2,70
Indeks Inovasi Daerah	115	32,44	40,79	43,47	
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1,41	2,42	2,51	2,67	2,77
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,76	54,31	78,16	78,16	

Sumber: Kementerian Menteri Dalam Negeri, 2023 (Diolah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Pengukuran ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi. Melalui aspek-aspek ini, pemerintah dapat menilai efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Wajo, IPP mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, indeks pelayanan publik berada pada angka 3,11, kemudian menurun menjadi 2,87 pada tahun 2021, dan sedikit menurun lagi menjadi 2,86 pada tahun 2022. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 2,67. Ketika dibandingkan dengan indeks pelayanan publik di tingkat provinsi, terlihat bahwa indeks provinsi berada pada nilai yang lebih tinggi, yaitu 4,34 pada tahun 2023. Perbandingan ini menunjukkan adanya ruang bagi Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya agar setara dengan standar provinsi.

Selain IPP, Indeks Inovasi Daerah juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai kemajuan daerah. Indeks Inovasi Daerah mengukur pembaruan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki. Pemeringkatan inovasi daerah ini memberikan gambaran mengenai tingkat

kreativitas dan adaptasi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan lokal. Selain sebagai alat pemetaan inovasi, pemeringkatan ini juga menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi signifikan, diantaranya:

a. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau
b. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penghargaan pemerintah daerah inovatif, yang didasarkan pada Indeks Inovasi Daerah, diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berhasil menciptakan inovasi daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan mulai menghitung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2019 sebagai langkah awal untuk mengukur dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Kabupaten Wajo pada tahun 2019 hingga 2020 tergolong dalam kategori "kurang inovatif." Namun, pada periode 2021 hingga 2023, Kabupaten Wajo menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai kategori "inovatif" pada tahun 2023, dengan skor 43,47. Capaian ini menandakan kemajuan yang menggembirakan dan menjadi dorongan bagi pemerintah Kabupaten Wajo untuk terus menyosialisasikan serta mendorong pengembangan inovasi di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain Indeks Inovasi, Kabupaten Wajo juga berfokus pada peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2019, capaian SPBE Kabupaten Wajo berada di angka 1,26 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,67 pada tahun 2023. Meski demikian, capaian ini masih berada di bawah capaian SPBE tingkat provinsi dan nasional, yang masing-masing mencatatkan angka 3,09 dan 2,79 pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Wajo perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem berbasis elektronik untuk mencapai standar provinsi dan nasional.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadi indikator lain yang digunakan untuk menilai tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengukuran IPKD didasarkan pada analisis dokumen perencanaan pembangunan daerah, anggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) dari tahun sebelumnya. Kabupaten Wajo mengalami fluktuasi dalam IPKD selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPKD Kabupaten Wajo tercatat sebesar 62,07, namun mengalami penurunan hingga 54,13 pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022, IPKD kembali meningkat signifikan menjadi 78,16 dan bertahan pada angka tersebut hingga tahun 2023.

Capaian dari ketiga indeks ini—Indeks Inovasi Daerah, Indeks SPBE, dan IPKD—menunjukkan bahwa Kabupaten Wajo telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Meski terdapat peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek, masih ada tantangan yang harus dihadapi agar Kabupaten Wajo dapat mencapai standar yang setara dengan tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2. 41
Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas, Nilai MCP KPK dan Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023	2024
Indeks Survey Penilaian Integritas	74.64	79.72	74.60	61,59
Nilai MCP KPK	65	78	55	57
Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Wajo, 2024

Selain parameter tata kelola pemerintahan yang telah dibahas sebelumnya, Kabupaten Wajo juga menunjukkan kinerja yang baik pada beberapa indikator lain yang berfokus pada penerapan prinsip clean government. Salah satu indikator tersebut adalah Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dirancang untuk mengukur risiko korupsi di berbagai lembaga dan pemerintah daerah, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Pada tahun 2023, skor SPI Kabupaten Wajo tercatat sebesar 74,60, namun mengalami penurunan sebesar 5,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian pemerintah daerah

untuk lebih meningkatkan upaya dalam meminimalkan risiko korupsi dan menjaga integritas lembaga.

Indikator lain yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Wajo adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program MCP ini bertujuan mendorong pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi. Pada tahun 2023, nilai MCP Kabupaten Wajo mencapai 55, mengalami penurunan dari nilai 78 pada tahun sebelumnya. Angka ini menandakan perlunya optimalisasi lebih lanjut dalam penerapan program MCP agar kinerja pencegahan korupsi di Kabupaten Wajo dapat kembali meningkat.

Selain SPI dan MCP, indikator penting lainnya adalah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maturitas SPIP mengukur tingkat kematangan pengelolaan SPIP di suatu organisasi dengan memperhatikan karakteristik dasar yang menunjukkan keberlanjutan dan struktur yang baik. Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Wajo mencapai level 3 dalam maturitas SPIP, yang dikenal sebagai tingkat "terdefinisi." Level ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan dan mengintegrasikan strategi kinerja dengan baik, meskipun pengendalian yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif. Pencapaian ini menunjukkan adanya pondasi yang kuat, tetapi Kabupaten Wajo perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya.

Secara keseluruhan, ketiga indikator—SPI, MCP, dan Maturitas SPIP—menggambarkan upaya Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meskipun terdapat beberapa penurunan pada capaian tertentu, indikator-indikator ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan tata kelola dan mencegah korupsi.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan, serta demokrasi substansial bisa berpengaruh terhadap daya saing investasi. Faktor-faktor ini termasuk dalam kategori institusi, dimana faktor ini menjadi salah satu

yang dipertimbangkan oleh calon investor dalam melakukan investasi. Beberapa indikator seperti persentase penegakan hukum, persentase tindak kriminal yang ditangani, dan persentase perempuan terhadap total anggota DPRD.

Tabel 2. 42
Kondisi Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial Kabupaten Wajo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Peraturan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase tindak kriminal yang ditangani	78,8%	63,1%	88,8%	75,6%	84,5%
Persentase Perempuan terhadap total anggota DPRD	10	10	10	10	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Wajo dan Kepolisian Resort Wajo, 2023

Indikator **Persentase Penegakan Hukum PERDA** adalah perbandingan antara jumlah penegakan PERDA yang diselesaikan dengan jumlah pelanggaran yang ada, dimana capaiannya sebesar 100 persen, yang berarti semua pelanggaran Perda dapat diselesaikan. Sementara itu, jumlah pelanggaran juga selalu menurun, dimana pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Sementara itu, **persentase tindak kriminal yang ditangani** berdasarkan data dari Polres Wajo karena terkait tindak pidana umum yang ditangani oleh pihak kepolisian dan diolah oleh bidang Trantibum Satpol Damkar. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 sampai 2023, tindak kriminalitas yang ditangani mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2021, tindak kriminal yang ditangani menurun dari 78,8 persen menjadi 63,1 persen, namun di tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 88,8 persen dan di tahun 2023 turun menjadi 72,7 persen.

Lebih lanjut, **persentase Perempuan terhadap total anggota DPRD** mengukur kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dimana hal ini bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar

kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan. Dengan berkembangnya demokrasi, tuntutan keterlibatan perempuan dalam politik semakin kuat. Persentase keterwakilan perempuan di Kabupaten Wajo dalam periode pemilu 2019-2024 yang duduk di parlemen semakin menurun hingga menjadi sekitar 10 %. Hal ini berarti pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah belum maksimalnya pendidikan demokrasi di kalangan perempuan dan juga masih kentalnya budaya patriarki, sehingga kuota 30% perempuan belum tercapai secara maksimal, meskipun pada saat penyusunan Calon Anggota Legislatif Kuota 30% perempuan terpenuhi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya membangun Budaya Politik Perempuan dalam memenuhi Hak-Hak Politiknya adalah Kaum Perempuan perlu mengetahui mengenai masalah budaya politik di Indonesia. Tingkatkan pengetahuan mengenai konsep memahami diri.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

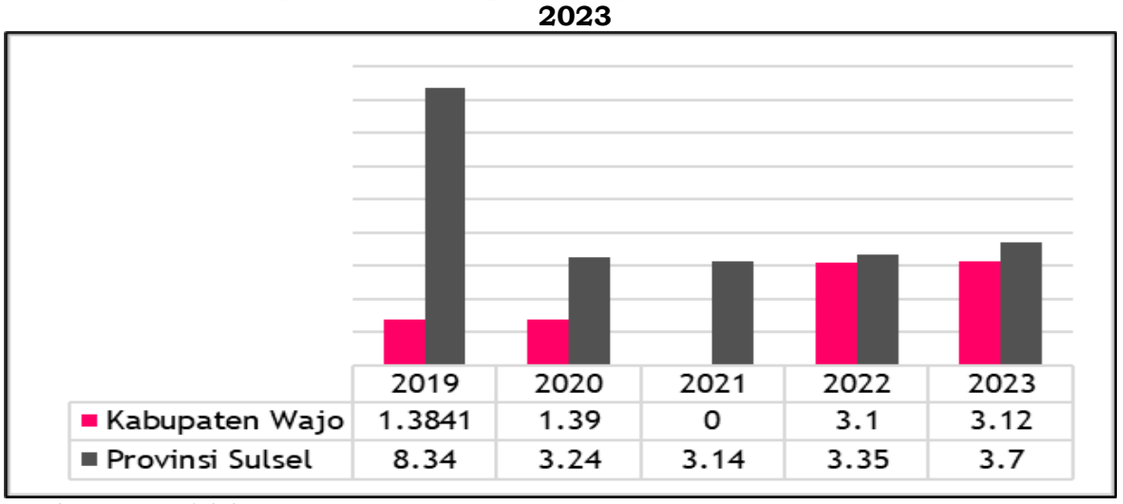
Peningkatan daya saing daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Indikator untuk mengukur daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah, dimana pengukurannya dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wajo sejak 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan namun belum setara dengan daya saing provinsi. IDSD terendah dicapai pada tahun 2020 sebesar 1,39 sementara indeks tertinggi sebesar 3,29 yang diperoleh tahun 2024.

IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi. Keempat komponen tersebut diterjemahkan menjadi 12 pilar daya saing, meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan skor 12 pilar pembangun daya saing daerah, capaian pilar terendah tahun 2024 adalah pilar ke-9 (sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian) yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 1,77 menjadi 1,50 pada tahun 2024, diikuti pilar ke-12 (kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah) dengan skor 2,23, dan pilar ke-8 (pasar tenaga kerja) dengan skor 2,39. Adapun capaian tertinggi pada pilar ke-3 (adopsi TIK) yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0 dengan skor 4,63.

Grafik 2. 24
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulsel Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Wajo	1.3841	1.39	0	3.1	3.12
Provinsi Sulsel	8.34	3.24	3.14	3.35	3.7

Sumber: BRIN (Diolah)

2.5. Indikator Kenrja Kunci

Tabel 2. 43
Indikator Kinerja Kunci

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan						
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	87	101	107	98,16	99,58
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	61	81	95	87,75	85,96
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	%	6700	6773	6562	6988	6733
Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP	%	6090	6107	5854	5613	5555
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,10	101,05	92,25	98.20	93,71
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	61.00	81,43	65,34	82,04	75,37
Angka partisipasi sekolah (APS) PAUD						
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	88.10	100,98	92,24	92,71	93,68
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	60,59	81,42	65,12	81,61	74,66
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,86	0,87	0,52	0,71	1,96
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,65	0,69	1,94	0,61	0,35
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98	100	101	102	102
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97	100	103,55	106	104
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	87	91	90,36	98	102

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	31	53	64,69	67	74
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	76,1	80,4	80	84	86
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	115,10	119,14	99,99	88,27	89,45
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	%	115,09	945,08	0	N/A	
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	%	1.102.25	945,08	924,96	857,95	845,57
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	%	102,81	129,64	79,91	73.70	72,07
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	28.50	30,84	73,08	81,58	78,88
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	95	98	99,57	90,67	95,57
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	145,83	150,37	91	91,80	96,85
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87	96	93	92	97
Kesehatan						
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		4,64	4.70	3,46	7,97	5,42
Angka kelangsungan hidup bayi		-3,64	-3,7	-2,46	-6,97	
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		4,64	4,88	3.80	8,32	5,42

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		3,86	3,48	2,76	6,55	5,42
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		61,81	104,48	17,28	106,23	0,00
Rasio posyandu per satuan balita		14,72	21,43	21.80	17,77	20,73
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.20	0,21	0.20	0.20	0,42
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,01	0,01	0,01	0,01	1,00
Rasio dokter per satuan penduduk		0,22	0,18	0,18	0,17	0,152
Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,22	0,32	0,33	0.40	0,34
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	75,48	105,23	102,16	101,76	94,76
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	97,12	100,52	101,06	99,46	89,40
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80,00	70,53	88,42	91,05	69,47
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	96,81	104,33	100,44	101,36	87,22
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	2,78	2,14	3,72	6,25	3,78
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	4.50	8,07	18,18	10,70	28,11
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	51,57	56,03	86,99	62,53	66,23

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		150	181,08	267,32	250,78	289,24
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		13,72	9,75	11,06	14,81	10,73
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	51,57%	56,03	86,99%	68,51%	77,29
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	73,95	62,47	73,74	74,73	64,45
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	46,41	36,88	51.70	55,02	64,55
Angka kejadian Malaria	%	3,69	6,06	7,9	6,91	3,49
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	66,03	0	1,17	1,41	0,16
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	29,23	36,40	28,84	41,34	
Cakupan kunjungan bayi	%	98,73	106,10	110,98	108,59	99,81
Cakupan puskesmas	%	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29
Cakupan pembantu puskesmas	%	28,95	28,95	28,95	28,42	28,42
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	91,89	100,35	100,38	98,88	92,28
Cakupan pelayanan nifas	%	95,33	100	101,61	97,98	89,51

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	60,69	73,55	73,26	68,51	62,84
Cakupan pelayanan anak balita	%	76,29	80,83	97,65	98,97	100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	94,09	99,38	98,05	97,69	47,79
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	84,90	99.70	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	29,23	36.40	28,84	41,34	
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,37	0,38	0,38	0,36	0,37
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,003	0,003	0,003	0,002	0,002
Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	36,68%	38,10%	38,36%	35,65%	36,66%
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	3,73%	3,73%	3,79%	3,88%	3,95%

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		90,12%	91,20%	91,80%	92,05%
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	45,13%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		72,60%	77,56%	79,98%	81,77%
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	47,31%	51,61%	56,99%	73,12%	76,34%
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,31%	70,66%	72,03%	73,47%	74,71%
Rasio Jaringan Irigasi		4,76	6,324	7,827	8,219	8,750
Persentase penduduk berakses air minum	%	91,40%	95,03%	97,77%	91,17%	91,39%
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		0,89	0,97	0,98	0,91	0,91
Persentase areal kawasan kumuh		0,23	0,23	0,23	0,23	0.00
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan						
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk						
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,49	0,51	0,51	0,51	

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persentase	116,28%	120,27%	120,27%	120,27%	
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan						
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Ketaatan terhadap RTRW		99,9808	99,7662	99,9212	99,9212	99,9998
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Rasio rumah layak huni		0,263	0,27	0,27	0,26	0,253
Rasio permukiman layak huni		0,95	0,946	0,946	0,946	0,95
Cakupan ketersediaan rumah layak huni		0,94	0,95	0,95	0,96	0,97
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		23,66	24,53	27,47	32,75	37,98
Persentase pemukiman yang tertata		59,94	60,23	60,25	60,27	60,29
Persentase lingkungan pemukiman kumuh		0,419	0,479	0,473	0,473	0,298
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		5,81	14,89	17,77	17,77	4,63
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		2,07	2,28	3,43	3,43	2,28
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		0,06	0,06	0,17	0,17	0,21
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		87,6%	87,6%	71,12%	91,24%	91,30%

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		42,80%	42,80%	42,80%	42,80%	42,80%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	100%	100%	82,40%	95,40%
Persentase Penegakan PERDA		100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kriminalitas yang Tertangani		10,25	8,97	10,12	6,6	11,37
Sosial						
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45,92	26,75	10,68	8,11	
Persentase PMKS yang tertangani	%	28,69	84,92	10,68	8,11	
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	38,99	49,16	49,17	100	
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	%	-	0,1	0,1	0	
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	6,44	84,14	0,786	100	
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	76,25	85,39	10,86	38,66	

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	12,27	100	10,86	38,66	
Tenaga Kerja						
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		5,99	14,08	12,85	9,12	22,22
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	6,65	7,07	6,9	10,37	28,38
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	90,67	79,1	56,59	22,65	25,46
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	0	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	54	39	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	54	39	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100%	100	0
Rasio lulusan S1/S2/S3	%	11,47	11,5	N/A	N/A	0
Komunikasi dan Informatika						
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	178,57	357,14	357,14	1100
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,75	0,75	0,78	0,78	0,78

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	97,35	97,63	98,38	92,2	94,27
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Nilai	0,503	0,499	0,509	0,384	0,573
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Nilai	0,539	0,525	0,538	0,478	0,815
Koperas, Usaha Kecil dan Menengah						
Persentase koperasi aktif		69,51%	64,51%	64,67%	64,75%	64,52%
Persentase UKM non BPR/LKM aktif		100%	42,86%	30,00%	30,00%	30,00%
Persentase BPR/LKM aktif		100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil		100%	90,60%	18,29%	2,81%	2,87%
Penanaman Modal						
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	62	154	2875	6305	4550
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	11.940.9 837.780	435.517.9 27.600	4.969.93 2.970.56 6	2.092.368. 212.287	491.775.996.057
Rasio daya serap tenaga kerja	%	10,7	6,2	3,11	2,47	2,13
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-0,95%	1.072,93 %	95,08%	1575,40%	-97,97%
Kepemudaan dan Olah Raga						
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	10,26%	23,08%	24,10%	34,87%	35,89%
Persentase wirausaha muda	%	62,22%	24,29%	34,44%	55,83%	55,88%
Cakupan pembinaan olahraga	%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	100%	100,00%	100%	100%	100%
Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	3	6	7	2	2
Statistik						

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”kabupaten dalam angka”	Buku	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Buku ”PDRB”	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persandian						
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Perpustakaan						
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	605	1500	2730	2920	1808
Jumlah Perpustakaan	unit	524	524	524	524	524
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	angka	1,35	1,38	1,38	1,38	1,38
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	2.692	383.781	378.013	769.063	5.551
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	exampler	12500	12722	12722	12722	12722
Kerasipan						
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	21,95 %	21,95 %	21,95 %	23,07 %	23,07 %
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	17,30	17,22	16,11	82,59	30 %
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10 %	10 %	100 %	100 %	30 %
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	55,41%	98,16%	97,46%	16,46%	100%
Rasio KDRT	Rasio	8	13	0,03	N/A	

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	Tidak ada kegiatan	1,37	0	0	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Tidak ada kegiatan	100%	4,66%	0,00	100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100%	100%	100%	200%	100%
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	0	0	0	N/A	
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100 %	100 %	N/A	150%	100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	%	100 %	100%	0%	0%	100%
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	0,98	1,08	1,00	1,00	1,02
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	1,04	1,11	0,90	1,02	1,08

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	0,965	0,963	0,956	1.051	0
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	22,42 %	22,42%	22,47 %	0,00 %	0,00 %
Pangan						
Ketersediaan pangan utama		103,66	117,07	143,79	112,28	96,99
Ketersediaan energi dan protein perkapita		8641	8641	9014	9052	9053
		167210	167210	179,26	190,49	190,49
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		88,89	90,00	90,00	100,00	100
Pertanahan						
Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,005	0,057	0,015	0,015	
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	63,73%	64,71%	100%		
Lingkungan Hidup						
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	1	-	2	-
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	60	58,75	53,57	54,44	54,44
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	90,73	91,48	91,93	89,06	95,08
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	39,27	23,75	23,75	27,65	27,42

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	60,61	20,48	20	19,08	18,25
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Oranng	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Timbulan sampah yang ditangani	Persen	99,37% (57.713,30)	98,41% (57.469,74)	75,24% (41.705,56)	68,27% (40.640,93)	72,98% (41.455,61)
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	0,55% (318,23 Ton)	1,54% (851,01 Ton)	5,69 % (3.152,64 Ton)	1,02 % (607,26 Ton)	22,04% (12.521,01 Ton)
Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0,15%	15,36%	15,36%	15,36%	24,14%
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		0	0	69,05	65,97	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97
Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,41	0,49	0,54	0,58	
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ketersediaan	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,70	99,64	96,97	99,03	97,88
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	96,77	98,03	99,84	99,88	99,74
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	86,62	92,96	92,96	92,96	93,66
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase LSM aktif	%	0	0	0	0	0
Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	0	0
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	0	0	0
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	0	0	0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,18	1,18	1,17	0	
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	1,99	1,96	1,7	2,04

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%	14,00%	14,63%	14,63%	14,65%
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0%	0%	17,07%	17,07%	7
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		0	0	7	0	2
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1	65	0	0	4
Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	1	0	0	
Ratio Akseptor KB		76,71%	75%	53,75%	67,72%	2,1
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49		76,71%	58,69%	58,69%	67,72%	67,43%
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	1,25%	100%	206,57%	0,00%	31,05%
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	8%	48,33	50,70	54,75%	33,0%
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,85%	12,04%	15,46%	11,45%	3454

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,49%	24,00%	5,40%	7,79	14,99%
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		10,65%	32,94%	18,48%	18,08%	67,74%
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		80,46%	74,48%	54,69%	44,31%	2778
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		77,58	59,88	15,2	3,27	1547
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	75,7	43,06	90,91	9,34	365
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	14,29%	21,00%	14,29%	14,29%	1
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	4,5	4,6	485,72%	492,86%	1023
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%	100%	0%	0%	100%
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	84,14%	60,06%	66,35%	27,23%	16
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1	1	100%	100%	100%
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	149%	104%	105,16%	0%	100%

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	75,43%	78.825	100%	100%
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak	%	48,12%	81,16%	81,02%	0,00%	5354
Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	21,40%	18,18%	1,13%	0,00%	20,9%
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,45%	0,38%	0,00%	0,00%	1%
Perhubungan						
Jumlah arus penumpang angkutan umum	angka	549.453	345.287	637.830	672.980	549.358
Rasio ijin trayek						
Jumlah uji kir angkutan umum	angka	2.620	2.778	3.658	3.713	3.621
Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal	angka	5	4	4	3	3
Persentase layanan angkutan darat	%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	24,72%	5,63%	5,53%	5,47%	5,38%
Pemasangan Rambu-rambu	%	42,50%	60,38%	46,27%	8,96%	14,93%

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	angka	0,00019	0,00019			
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	angka	60.493	72.193	169.414	230.691	160.541
Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun	angka	133.891	133.510	150.859	243.412	171.801
Pariwisata						
Kunjungan wisata	Kunjungan	26.975	29,222	39,392	347,416	355,57
Lama kunjungan Wisata	Hari	0,2 Hari	0,2 Hari	0,4 Hari	0,6 Hari	0,8 Hari
PAD sektor pariwisata	%	0,05%	64%	65%	0,02%	0,05%
Pertanian						
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18,82%	18,62%	34,00%	33,68%	20,78
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	65,94	66,74	69,27	68,32	66,27
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	20,29%	20,58%	18,68%	19,03%	21,06
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100%	100%	100%	100%	100%
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		4,35	4,42	5,76	5,16	5,27
Cakupan bina kelompok petani		71,24	49,09	81,63	97,28	51,92
Pengawasan						
Ekspor Bersih Perdagangan		- 643.714,51	- 175.709,78	470.620,88	- 280.221,23	-472.648,17
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	46,51%	52,09%	52,09%	52,09%	52,09%
Kelautan dan Perikanan						

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan (Ton)	Ton	541.102,60	559.224,58	567.029,43	570.182,68	575.116,87
Konsumsi ikan (Kg)	Kg	26.946.492,30	27.061.402,40	27.112.878,00	27.115.905,04	27.419.714,26
Cakupan bina kelompok nelayan	klp	52	57	72	114	25
Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	419.155,49	419.418,44	453.623,54	462.970,95	463.544,20
Nilai tukar nelayan	%	99,64	107,43	109,29	111,56	111,92
Perencanaan dan Pembangunan						
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99	75	96,30	90,83	91,30
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	99	98,58	90,83	91,30
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	82	82	82	82	82
Keuangan						
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Pemeriksaan
Persentase SILPA	%	2,51	5,28	7,94	7,34	6,71
Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,51	5,28	7,94	7,34	6,71
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	22,18	19,95	20,63	20,72	20,13

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,9	17,86	18,75	15,39	21,84
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :	%	37,31	38,61	36,66	38,87	36,99
	%	54,21	53,36	55,94	56,22	53,04
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,35	0,29	0,37	0,36	0,42
Penetapan APBD	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		0,53	0,65	0,82	1,09	7,02
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,06	12,79	18,63	13,28	18,50
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	32,55	43,26	23,26	22,29	23,29
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		31	30	31	31	31
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		5941	5699	5218	5105	5092
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3486	3785	3658	3412	3496
Penelitian dan Pengembangan						
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	86	100	100
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	22	11	19	19

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33	8	100	100	100
Pengawasan						
Persentase tindak lanjut temuan	%	61	78%	74%	56%	100%
Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0,09	0,2	0,67	0
Jumlah temuan BPK	Temuan	18	115	23	32	24
Sekretariat Dewan						
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB
III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan Daerah membutuhkan ketersediaan dana dengan pengaturan penyelenggaraan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yaitu Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi tersebut selanjutnya diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah disusun untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Daerah. Analisis Kinerja keuangan Kabupaten Wajo yang disajikan adalah semua komponen struktur APBD, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja struktur APBD tersebut dianalisis dalam lima tahun terakhir, selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas dengan tetap menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Pengelolaan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Wajo digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

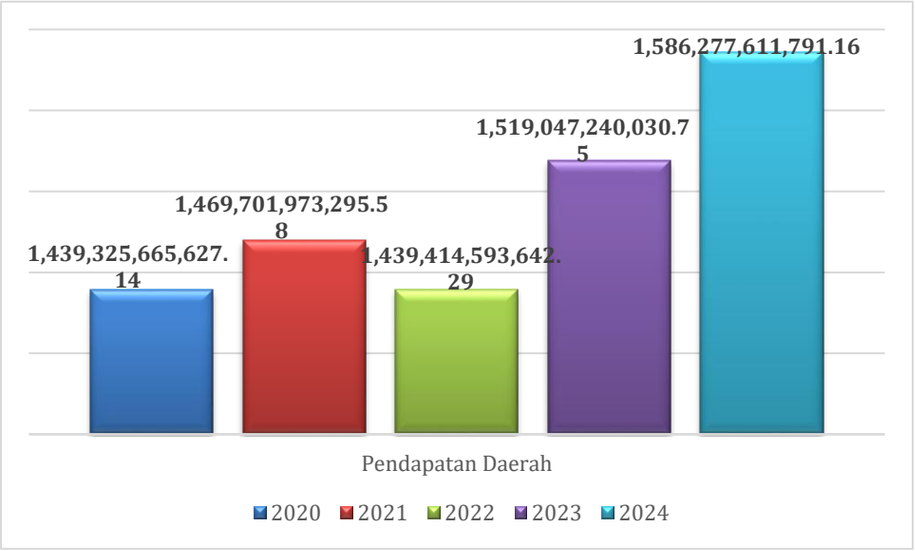
No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah					Rata-rata Pertumbuhan %
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**1.439.325.665.627,14**	**1.469.701.973.295,58**	**1.439.414.593.642,29**	**1.519.047.240.030,75**	**1.586.277.611.791,16**	**2,50%**
01.01	**PENDAPATAN DAERAH**	**143.732.703.504,99**	**150.055.689.748,58**	**154.929.404.885,29**	**187.640.193.796,87**	**188.030.345.439,16**	**7,24%**
01.01.01	Pajak Daerah	37.558.324.874,00	40.454.939.377,19	48.416.985.843,00	55.024.628.547,00	54.474.488.850,00	10,01%
01.01.02	Retribusi Daerah	9.761.434.986,80	15.245.996.364,35	13.070.907.059,00	17.783.697.364,00	11.053.720.771,00	10,03%
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	15.794.998.298,00	16.672.797.933,00	17.100.236.523,00	18.084.874.647,00	4,36%
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.162.063.636,19	78.559.755.709,04	76.768.714.050,29	97.731.631.362,87	104.417.261.171,16	7,17%
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.200.493.130.294,15**	**1.262.089.652.617,00**	**1.270.113.395.804,00**	**1.330.265.522.073,88**	**1.379.111.185.988,00**	**3,54%**
01.02.01	**Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan**	**987.724.168.969,00**	**1.055.342.820.540,00**	**1.067.088.436.319,00**	**1.083.095.943.992,00**	**1.191.266.725.054,00**	**4,86%**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	40.540.059.096,00	59.511.706.797,00	55.267.709.627,00	47.269.539.235,00	53.223.826.994,00	9,45%
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	676.935.175.000,00	668.045.435.000,00	665.895.039.406,00	703.527.642.733,00	771.791.832.501,00	3,43%
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.248.934.873,00	327.785.678.743,00	345.925.687.286,00	332.298.762.024,00	366.251.065.559,00	8,28%
01.02.02	**Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya**	**155.229.588.000,00**	**133.282.972.800,00**	**119.304.350.500,00**	**150.753.507.000,00**	**119.866.580.500,00**	**-4,69%**
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah		11.851.173.000,00	6.062.576.000,00	31.670.716.000,00		91,18%

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah					Rata-rata Pertumbuhan %
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	155.229.588.000,00					-100,00%
1.2.2.3	Dana Desa		121.431.799.800,00	113.241.774.500,00	119.082.791.000,00	119.866.580.500,00	-0,31%
01.02.03	**Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya**	**57.539.373.325,15**	**57.457.922.277,00**	**73.783.137.269,00**	**90.591.355.269,88**	**64.358.193.434,00**	**5,52%**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.539.373.325,15	57.457.922.277,00	73.783.137.269,00	90.591.355.269,88	64.358.193.434,00	5,52%
01.02.04	**Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya**	**0,00**	**16.005.937.000,00**	**9.937.471.716,00**	**5.824.715.812,00**	**3.619.687.000,00**	**-39,05%**
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Pemda Provinsi		16.005.937.000,00	9.937.471.716,00	5.824.715.812,00	3.619.687.000,00	-39,05%
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**95.099.831.828,00**	**57.556.630.930,00**	**14.371.792.953,00**	**1.141.524.160,00**	**19.136.080.364,00**	**342,45%**
01.03.01	Pendapatan Hibah	95.099.831.828,00	11.249.607.565,00	14.371.792.953,00	1.141.524.160,00	13.596.913.000,00	234,66%
01.03.02	Pendapatan Lainnya		46.307.023.365,00			5.539.167.364,00	-100,00%

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wajo tahun 2020 hingga 2024 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 1.439.325.665.627,14 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.586.277.611.791,16 pada tahun 2024. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Wajo dalam kurun waktu tersebut cukup fluktuatif dan cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata positif 2,50 persen per tahun. Sementara pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 1.469.701.973.295,58 atau sebesar 2,11 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 pendapatan daerah mengalami penurunan Rp 1.439.414.593.642,29 sebesar negatif 2,06 persen, namun pada tahun 2023 pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp 1.519.047.240.030,75 atau sebesar negatif 5,53 persen dan untuk tahun 2024 pendapatan daerah meningkat Rp 1.586.277.611.791,16 atau sebesar 4,43 persen. Sebagaimana tergambar pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024

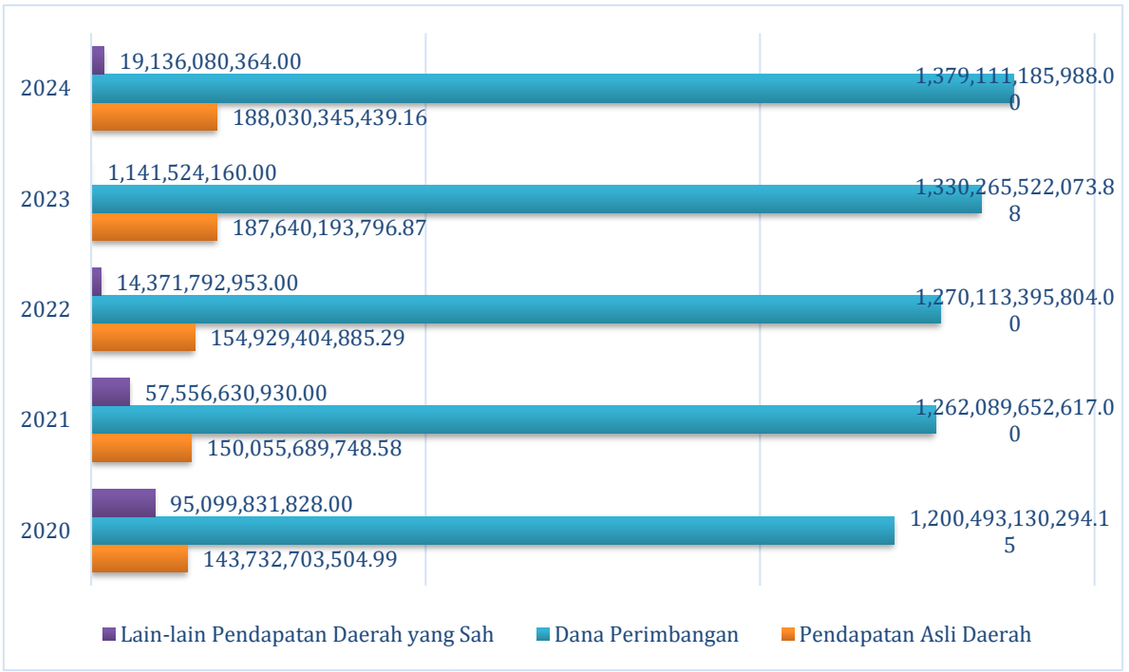


Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar 83,41 persen, di tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 85,87 persen, tahun 2022

sebesar 88,24 dan di tahun 2023 sebesar 87,57 persen serta di tahun 2024 sebesar 86,94 persen.

Grafik 3.2
Postur Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kabupaten Wajo masih sangat bergantung pada Pendapatan Dana Transfer. Rata-rata kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah masih sangat tinggi yaitu di atas 80 persen. Namun Pemerintah Kabupaten Wajo terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi intensifikasi sumber-sumber pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah

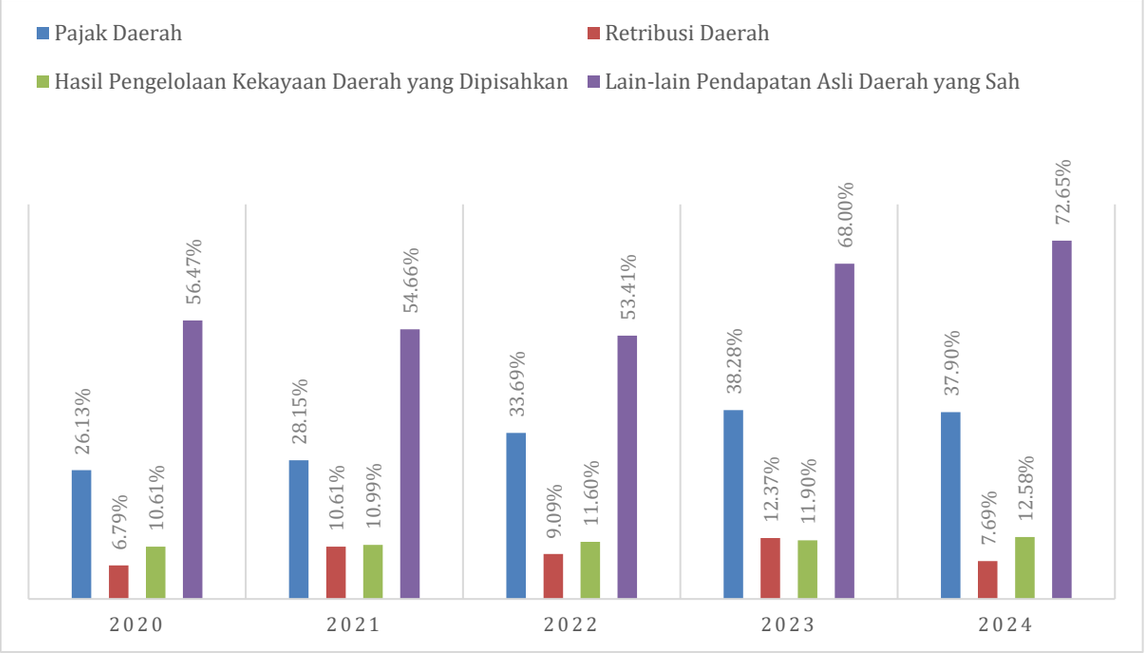
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Penerimaan Asli Daerah terdiri dari empat sumber penerimaan yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain PAD Yang Sah. Selama kurun waktu waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 perkembangan PAD sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata

7,24 persen per tahun. Namun demikian realisasi penerimaan secara nominal PAD Kabupaten Wajo mengalami peningkatan dari Rp 143.732.703.504,99 di tahun 2020 menjadi Rp 188.030.345.439,16 di tahun 2024.

Kontribusi PAD terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan pertumbuhan rata-rata 7,17 persen per tahun kemudian dari pajak daerah dengan pertumbuhan rata-rata 10,01 persen per tahun dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,36 persen per tahun serta retribusi daerah dengan pertumbuhan rata-rata 10,03 persen per tahun.

Selama periode 2020-2024 Lain-lain PAD Yang Sah yang telah berkontribusi terbesar terhadap PAD rata-rata sebesar 61,04 persen per tahun, Pajak daerah menempati posisi kedua yang berkontribusi terhadap realisasi PAD yaitu rata-rata sebesar 32,83 persen per tahun, disusul oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 11,54 persen per tahun, dan retribusi daerah 9,31 persen per tahun. Rincian Realisasi dari komponen PAD sebagai berikut:

Grafik 3.3
Postur Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

1. Pajak Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah bersumber dari 11 jenis Pajak Daerah, yakni (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Air Tanah, (7) Pajak Sarang Burung Walet, (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dan (11) Pajak Parkir. Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi kedua setelah Lain-lain PAD yang sah.

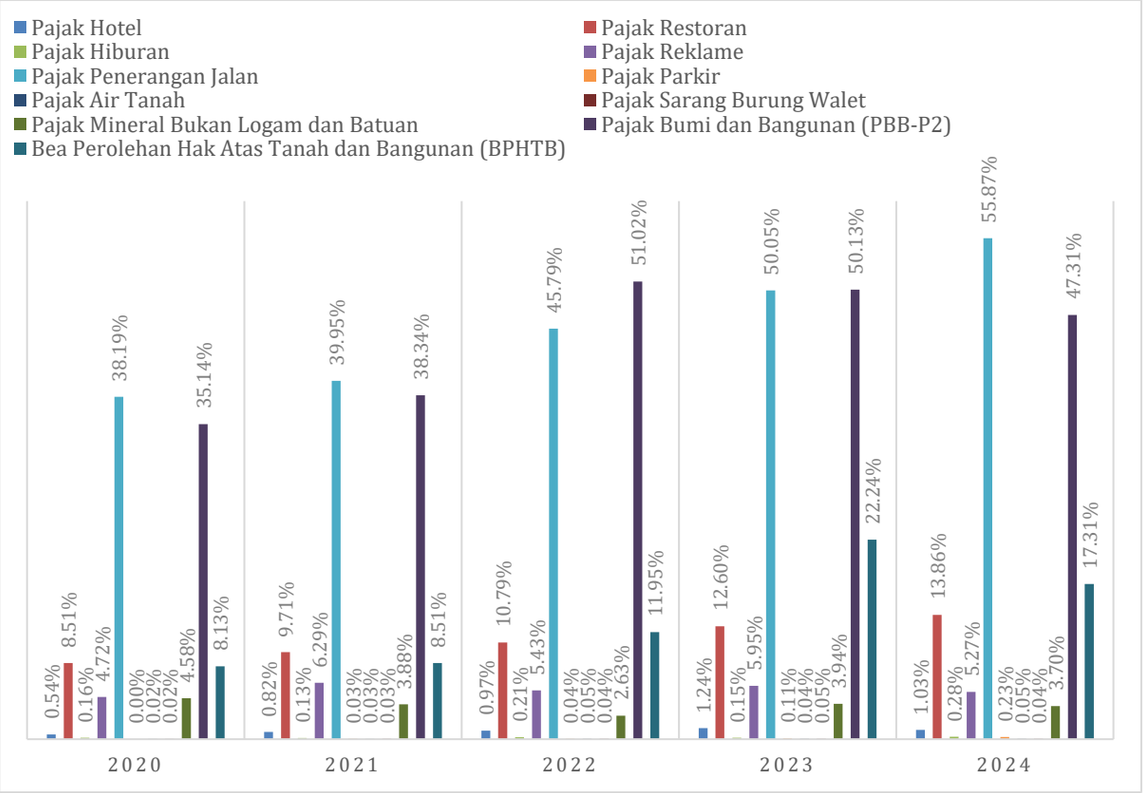
Realisasi pajak daerah untuk kurun waktu tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dan cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata positif 10,00 persen per tahun. Pada tahun 2020 pajak daerah sebesar Rp 37.558.324.874,00 meningkat menjadi Rp 54.447.102.009,00 di tahun 2024. Nilai nominal realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami perkembangan setiap tahunnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 37.558.324.874,00 atau mengalami peningkatan menjadi Rp 40.454.939.377,19 di tahun 2021 atau meningkat sebesar 7,71 persen per tahun, tahun 2022 pajak daerah meningkat menjadi Rp Rp 48.416.985.843,00, tahun 2023 meningkat menjadi Rp 55.024.628.547,00, dan selanjutnya menurun menjadi Rp 54.447.102.009,00 di tahun 2024. Sebagaimana terlihat perkembangan realisasi Pajak Daerah pada Tabel berikut:

Tabel 3. 2
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pajak Daerah					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**37.558.324.874,00**	**40.454.939.377,19**	**48.416.985.843,00**	**55.024.627.547,00**	**54.447.102.009,00**	**10,00%**
1	Pajak Hotel	202.945.982,00	306.127.128,00	362.699.875,00	465.989.401,00	386.058.311,00	20,16%
2	Pajak Restoran	3.194.949.152,00	3.645.881.163,00	4.053.423.290,00	4.732.010.033,00	5.207.355.816,00	13,02%
3	Pajak Hiburan	61.665.975,00	50.120.350,00	78.660.000,00	57.150.000,00	106.105.000,00	24,13%
4	Pajak Reklame	1.771.456.715,00	2.363.097.901,00	2.040.190.122,00	2.232.941.835,00	1.980.057.932,00	4,46%
5	Pajak Penerangan Jalan	14.342.704.000,00	15.003.434.469,00	17.198.137.044,00	18.798.860.878,00	20.982.631.888,00	10,04%
6	Pajak Parkir		12.800.000,00	13.200.000,00	41.000.000,00	88.250.000,00	162,92%
7	Pajak Air Tanah	5.636.312,00	9.918.008,00	17.578.238,00	15.753.578,00	20.046.876,00	42,52%
8	Pajak Sarang Burung Walet	6.304.000,00	12.874.500,00	16.282.125,00	18.540.000,00	14.183.000,00	30,27%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.720.422.061,00	1.455.970.489,19	986.891.498,00	1.480.920.721,00	1.390.285.792,00	-0,91%
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	13.198.767.013,00	14.400.233.256,00	19.161.869.542,00	18.828.889.800,00	17.768.915.051,00	8,70%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.053.473.664,00	3.194.482.113,00	4.488.054.109,00	8.352.571.301,00	6.503.212.343,00	27,27%

Kontribusi pajak daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun proporsinya masih jauh dibandingkan dengan lain-lain PAD Yang sah. Peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya merupakan kontribusi dari 11 jenis pajak, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 jenis pajak penerangan jalan yang berkontribusi terbesar terhadap total realisasi pajak daerah, PBB P2 berkontribusi kedua, dan ketiga pajak BPHTB kemudian berturut-turut pajak restoran, pajak reklame, pajak Minerba, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak air tanah. Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut telah dilakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan alat transaksi pembayaran cash register dan telah melakukan perubahan peraturan daerah terhadap pengenaan tarif pajak restoran dan penyesuaian beberapa jenis pajak hiburan serta penyempurnaan regulasi pelaksanaan teknis pemungutan pajak daerah. Postur Pajak Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4
Postur Pajak Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

2. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah dari Rp 9.761.434.986,80 pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 11.053.720.771,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 10,03 persen per tahun. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi pada tahun 2023 sebesar 12,37 persen Perkembangan retribusi daerah kabupaten wajo dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terlihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

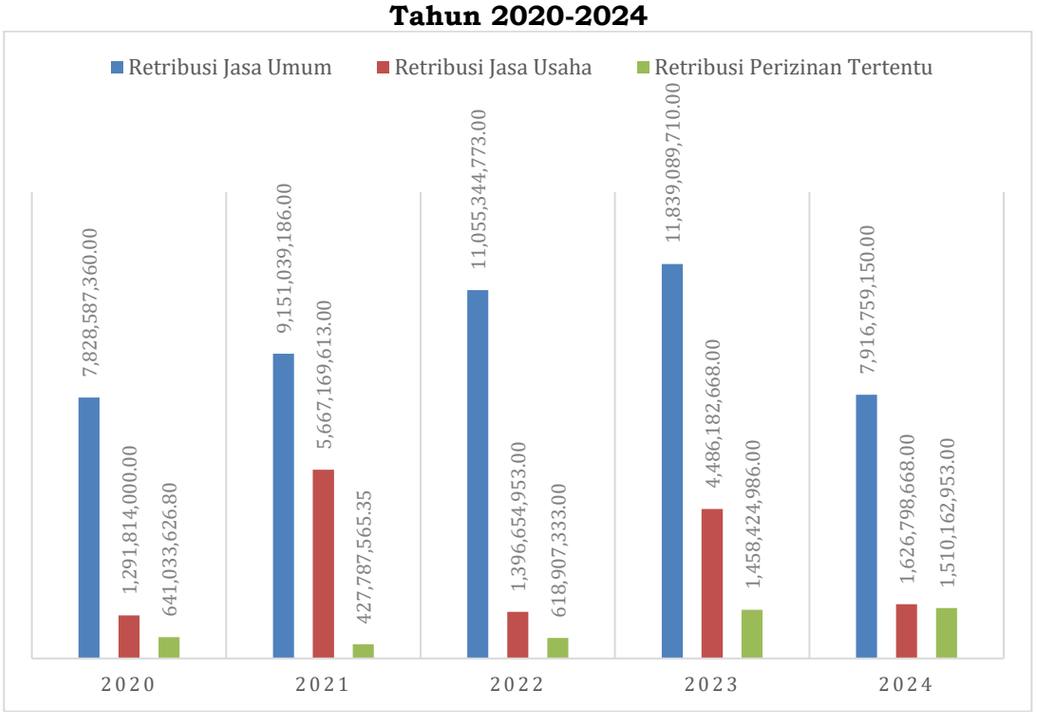
No	Jenis Retribusi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**7.828.587.360,00**	**9.151.039.186,00**	**11.055.344.773,00**	**11.839.089.710,00**	**7.916.759.150,00**	**2,92%**
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.214.870.364,00	4.723.486.796,00	5.364.101.417,00	5.853.120.350,00	2.284.553.150,00	-6,56%
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	264.770.000,00	434.270.000,00	463.965.000,00	467.665.000,00	599.770.000,00	24,98%
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	201.010.000,00	222.006.000,00	400.341.000,00	506.751.000,00	522.087.000,00	30,10%
	- Retribusi Pelayanan Pasar	2.669.290.000,00	3.322.240.000,00	4.307.405.000,00	4.502.775.000,00	4.480.299.000,00	14,54%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	109.200.000,00	138.675.000,00	182.645.000,00	185.760.000,00	0,00	-9,90%
	- Retribusi Pelayanan Pendidikan	18.200.000,00					-100,00%
	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			2.300.000,00	5.750.000,00	30.050.000,00	286,30%
	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	41.150.000,00	50.310.000,00	51.410.000,00	25.630.000,00	0,00	-31,42%
	- Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	35.825.300,00	43.120.000,00	46.611.000,00	36.672.000,00	0,00	-23,22%

No	Jenis Retribusi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	274.271.696,00	216.931.390,00	236.566.356,00	254.966.360,00	0,00	-26,02%
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.291.814.000,00**	**5.667.169.613,00**	**1.396.654.953,00**	**4.486.182.668,00**	**1.626.798.668,00**	**105,20%**
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	486.909.800,00	4.686.463.913,00	360.028.953,00	3.451.793.568,00	562.595.868,00	386,31%
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus			10.080.000,00	16.975.000,00	21.070.000,00	46,26%
	- Retribusi Tempat Pelelangan	7.605.000,00	15.097.000,00	20.116.000,00	15.004.000,00	14.850.000,00	26,33%
	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				88.040.000,00		-100,00%
	- Retribusi Terminal	174.557.000,00	142.730.000,00	80.940.000,00		0	-53,84%
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	63.374.000,00	84.146.000,00	106.055.000,00	41.525.000,00	95.877.000,00	32,21%
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	74.700.000,00	71.850.000,00	81.900.000,00	84.100.000,00	80.500.000,00	2,14%
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	484.668.200,00	606.882.700,00	690.335.000,00	743.745.100,00	805.655.800,00	13,76%
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		60.000.000,00	47.200.000,00	45.000.000,00	46.250.000,00	-7,74%
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**641.033.626,80**	**427.787.565,35**	**618.907.333,00**	**1.458.424.986,00**	**1.510.162.953,00**	**37,65%**
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	640.783.626,80	427.787.565,35	603.907.333,00	1.436.574.986,00	1.510.162.953,00	37,73%

No	Jenis Retribusi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						0,00%
	- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.000,00		15.000.000,00	21.850.000,00	0,00	-51,44%
Jumlah		***9.761.434.986,80***	***15.245.996.364,35***	***13.070.907.059,00***	***17.783.697.364,00***	***11.053.720.771,00***	**10,03%**

Retribusi Daerah terdiri dari : (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha dan, (3) Retribusi Perizinan tertentu. Dalam kurun waktu lima tahun retribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan retribusi daerah dengan rata-rata sebesar 72,60 persen per tahun kemudian menempati posisi kedua retribusi jasa usaha sebesar 33,76 persen per tahun, menyusul retribusi perizinan tertentu sebesar 3,43 persen per tahun. Sebagaimana Gambaran grafik di bawah:

Grafik 3.5
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

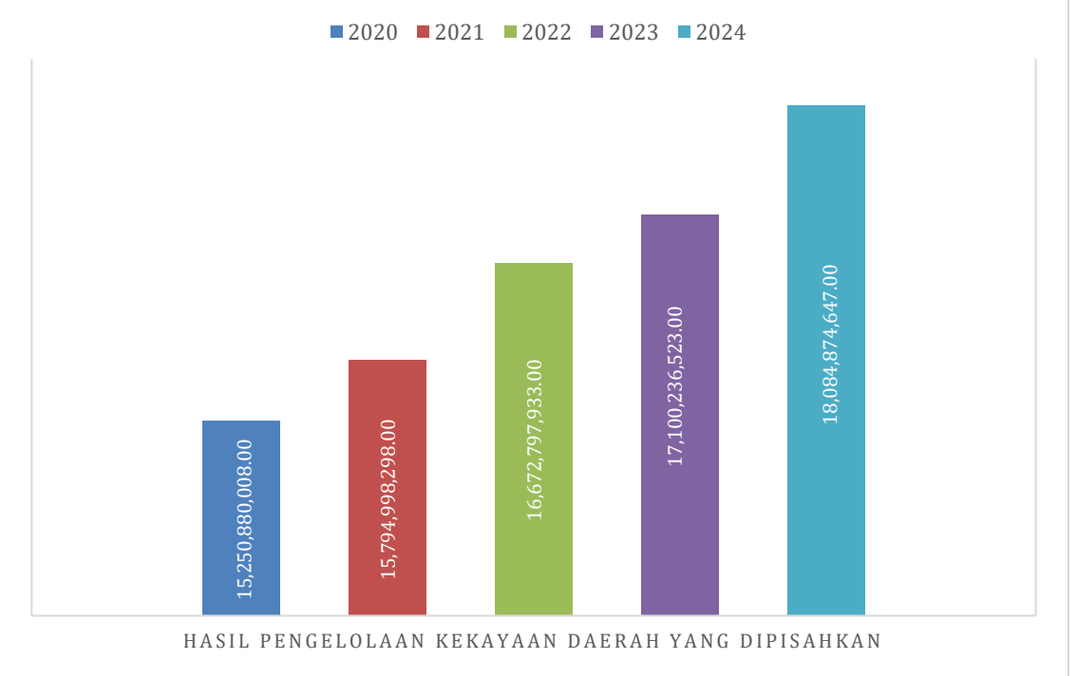
Pendapatan dari jenis retribusi jasa umum dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif dengan rata-rata sebesar 2,92 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 7.828.587.360,00 menjadi Rp 11.839.089.710 pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan Rp 7.916.759.150,00 pada tahun 2024. Pada jenis retribusi jasa usaha realisasi penerimaannya cenderung berfluktuatif dari tahun 2020 sebesar Rp 1.291.814.000,00 meningkat menjadi Rp 5.667.169.613,00 di tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 1.396.654.953,00, kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 4.486.182.668,00 dan mengalami penurunan menjadi Rp 1.626.798.668,00 pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan upaya-upaya dengan melakukan perubahan peraturan daerah terhadap penyesuain pengenaan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat di Kabupaten Wajo, serta giat melakukan renovasi sarana dan prasarana pelayanan retribusi daerah khususnya pada tempat pelayanan pasar dan tetap melakukan penyempurnaan regulasi sistem pengelolaan pelayanan yang lebih baik.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari deviden yang diperoleh dari hasil usaha daerah atas penyertaan modal terhadap lembaga keuangan Daerah dalam hal ini Bank Sulselbar. Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp 15.250.880.008,00 menjadi Rp 18.084.874.647,00 pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 4,36 persen per tahun. Perkembangan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.6
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Komponen penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah merupakan jenis penerimaan selain dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang dipisahkan yang terdiri dari 16 jenis penerimaan, yaitu : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Penerimaan Bunga Deposito; (4) Tuntutan Ganti Kerugian Dearah; (5) Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (6) Pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan; (7) Hasil dari pengelolaan dana bergulir; (8) Jasa giling RPC; (9) Hasil penjualan benih ikan unggulan; (10) Pendapatan BLUD; (11) Tunggkan retribusi Pelayanan Pendidikan akper pemda Wajo; (12) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (13) Pendapatan dana kapitasi JKN; (14) Jasa Giro Pemegang Kas; (15) Pendapatan Dana Bos dan (16) lain-lain PAD yang sah lainnya. Perkembangan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah dari tahun 2020 - 2024.sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

No	Lain-lain PAD	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	436.464.977,00	561.632.245,00	33.192.500,00	854.738.400,00	214.900.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	242.883.636,00	-	143.925.000,00
3	Jasa Giro	4.466.748.202,00	3.925.488.261,00	5.236.409.905,64	5.414.882.499,00	4.061.718.071,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.125.429.446,96	1.623.197.214,86	1.670.279.410,06	1.017.271.893,13	1.423.803.395,47
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	228.352.470,82	124.977.451,96	325.188.970,00	2.751.695.892,28	112.221.180,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	-	245.085.629,22	290.613.219,66	187.259.454,46	271.729.630,00
7	Pendapatan BLUD	58.975.845.786,36	54.539.468.818,00	52.917.987.193,93	68.142.817.133,00	98.100.363.895,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.074.888.025,00	17.322.822.089,00	15.904.456.215,00	19.357.166.091,00	-

No	Lain-lain PAD	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	181.225.000,00	-	-	
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	35.859.000,00	-	-	-
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	852.334.728,05	-	112.403.000,00	-	-
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	35.300.000,00	5.800.000,00	88.600.000,00
13	Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-	-
14	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan	2.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah		**81.162.063.636,19**	**78.559.755.709,04**	**76.768.714.050,29**	**97.731.631.362,87**	**104.417.261.171,47**

Penerimaan Pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari Rp 81.162.063.636,19 pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 78.559.755.709,04 pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar negatif 3,21 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 76.768.714.050,29 atau sebesar negatif 2,28 persen, selanjutnya di tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi Rp 97.731.631.362,87 atau sebesar 27,31 persen selanjutnya di tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi Rp 104.417.261.171,47 atau sebesar 6,84 persen sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik. 3.7
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Pendapatan Sah Kabupaten Wajo Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Penerimaan dari sektor dana perimbangan merupakan sektor penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 penerimaan dari Dana Perimbangan merupakan penerimaan yang berkontribusi terbesar dalam total pendapatan daerah, yaitu rata-rata mencapai 86,41 persen.

Berikut ini perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Wajo kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

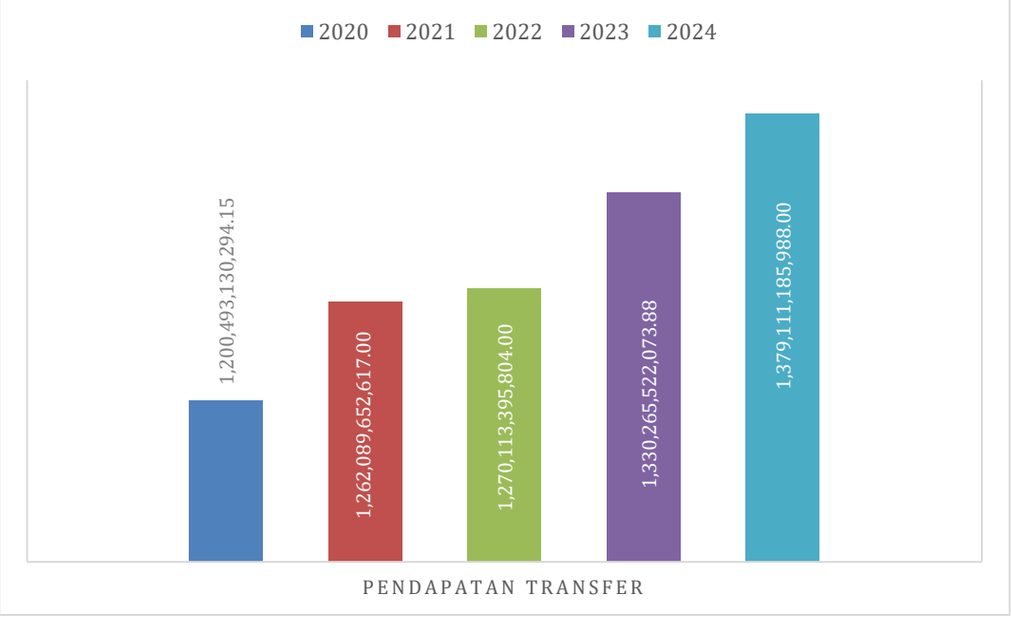
Tabel 3.5
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

No	Pendapatan Transfer	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	987.724.168.969,00	1.055.342.820.540,00	1.067.088.436.319,00	1.083.095.943.992,00	1.191.266.725.054,00	4,86%
	a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	40.540.059.096,00	59.511.706.797,00	55.267.709.627,00	47.269.539.235,00	53.223.826.994,00	9,45%
	b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	676.935.175.000,00	668.045.435.000,00	665.895.039.406,00	703.527.642.733,00	771.791.832.501,00	3,43%
	c. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.248.934.873,00	327.785.678.743,00	345.925.687.286,00	332.298.762.024,00	366.251.065.559,00	8,28%
	1. Dak Alokaksi Khusus (DAK) Fisik (DF)	110.741.470.141,00	171.557.603.172,00	164.866.655.991,00	125.265.725.567,00	164.662.171.304,00	14,61%
	2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	159.507.464.732,00	156.228.075.571,00	181.059.031.295,00	207.033.036.457,00	201.588.894.255,00	6,39%
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	155.229.588.000,00	133.282.972.800,00	119.304.350.500,00	150.753.507.000,00	119.866.580.500,00	-4,69%

No	Pendapatan Transfer	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak	57.539.373.325,15	57.457.922.277,00	73.783.137.269,00	90.591.355.269,88	64.358.193.434,00	5,52%
4	Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya (Bantuan Keuangan)	-	16.005.937.000,00	9.937.471.716,00	5.824.715.812,00	3.619.687.000,00	-39,62%
Jumlah		**1.200.493.130.294,15**	**1.262.089.652.617,00**	**1.270.113.395.804,00**	**1.330.265.522.073,88**	**1.379.111.185.988,00**	**3,54%**

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan dana perimbangan pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp 1.200.493.130.294,15 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.262.089.652.617,00 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 5,13 persen, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.270.113.395.804,00 atau sebesar 0,64 persen, kemudian di tahun 2023 Rp 1.330.265.522.073,88 atau sebesar 4,74 persen dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.379.111.185.988,00 atau 3,67 persen. Sebagaimana grafik tersebut dibawah ini:

Grafik. 3.8
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024



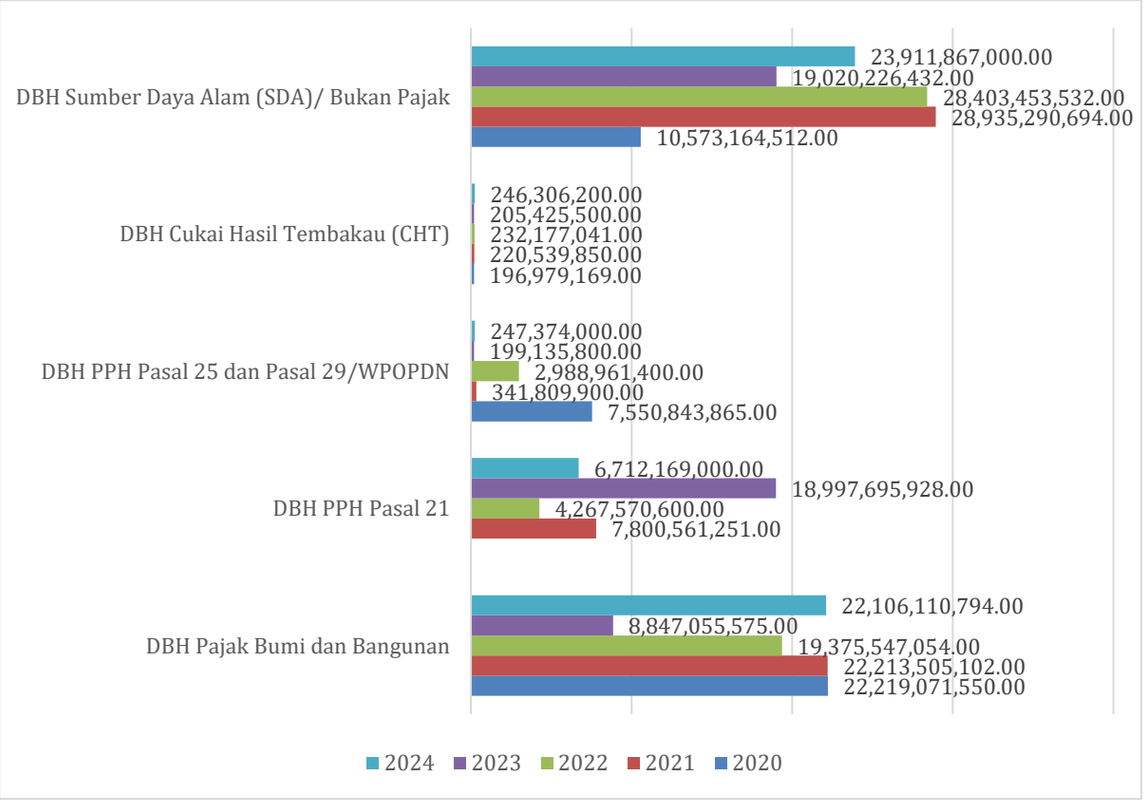
Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dan bukan pajak merupakan bagian dari pendapatan dana perimbangan. Dalam kurun waktu 2020-2024 realisasi penerimaan mengalami peningkatan yang berfluktuatif. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak merupakan dana bagi hasil pajak pusat yang ditransfer ke kas daerah, serta penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan royalti sumber daya alam, bagi hasil cukai tembakau dan bagi hasil pertambangan umum. Berikut perkembangan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Wajo kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3.6
Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

No	Dana Bagi Hasil (DBH)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	22.219.071.550,00	22.213.505.102,00	19.375.547.054,00	8.847.055.575,00	22.106.110.794,00	20,68%
2	DBH PPH Pasal 21		7.800.561.251,00	4.267.570.600,00	18.997.695.928,00	6.712.169.000,00	78,40%
3	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.550.843.865,00	341.809.900,00	2.988.961.400,00	199.135.800,00	247.374.000,00	152,47%
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	196.979.169,00	220.539.850,00	232.177.041,00	205.425.500,00	246.306.200,00	6,40%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA)/ Bukan Pajak	10.573.164.512,00	28.935.290.694,00	28.403.453.532,00	19.020.226.432,00	23.911.867.000,00	41,13%
	Jumlah	**40.540.059.096,00**	**59.511.706.797,00**	**55.267.709.627,00**	**47.269.539.235,00**	**53.223.826.994,00**	**9,45%**

Grafik 3.9
Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

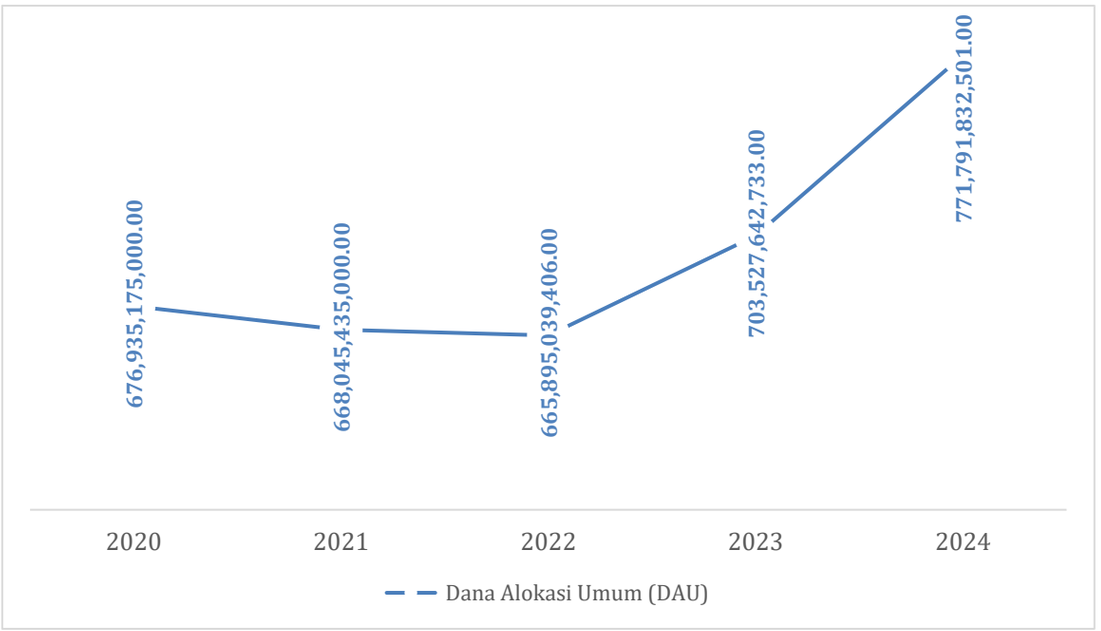


Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

Pada tahun 2020 Realisasi Dana Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 40.540.059.096,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp 53.223.826.994,00 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 9,45 persen per tahun.

Dana Alokasi Umum (DAU) dari kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 1,22 persen. DAU Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari Rp753.9 miliar tahun 2019 menjadi Rp 676.9 miliar tahun 2020 atau berkurang sebesar negatif 10.22 persen, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp668.04 miliar atau 0,32 persen begitu pula pada tahun 2022 menurun menjadi Rp665.8 miliar 6.98 persen sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp712,3 dari tahun sebelumnya atau sebesar negatif 1.22 persen. Sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:

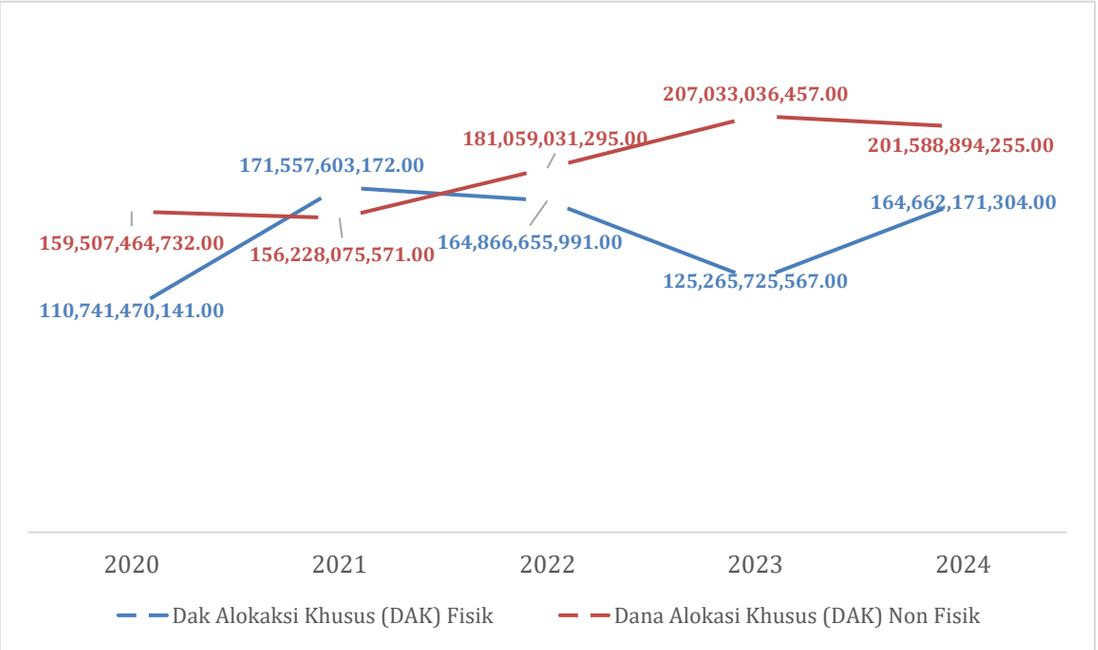
Grafik 3.10
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo 2025

Dana Alokasi Khusus (DAK) uang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat secara spesifik diperuntukkan untuk kegiatan pembanguan prioritas nasional. Pada tahun 2020 penerimaan dari DAK sebesar Rp 270.248934.873,00 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 327.785.678.743,00, penerimaan DAK sebesar Rp 345.925.687.286,00 di 2022 menjadi Rp 332.298.762.024,00 di tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi Rp 366.298.762.024,00. Sebagaiman terlihat pada grafik sebagai berikut:

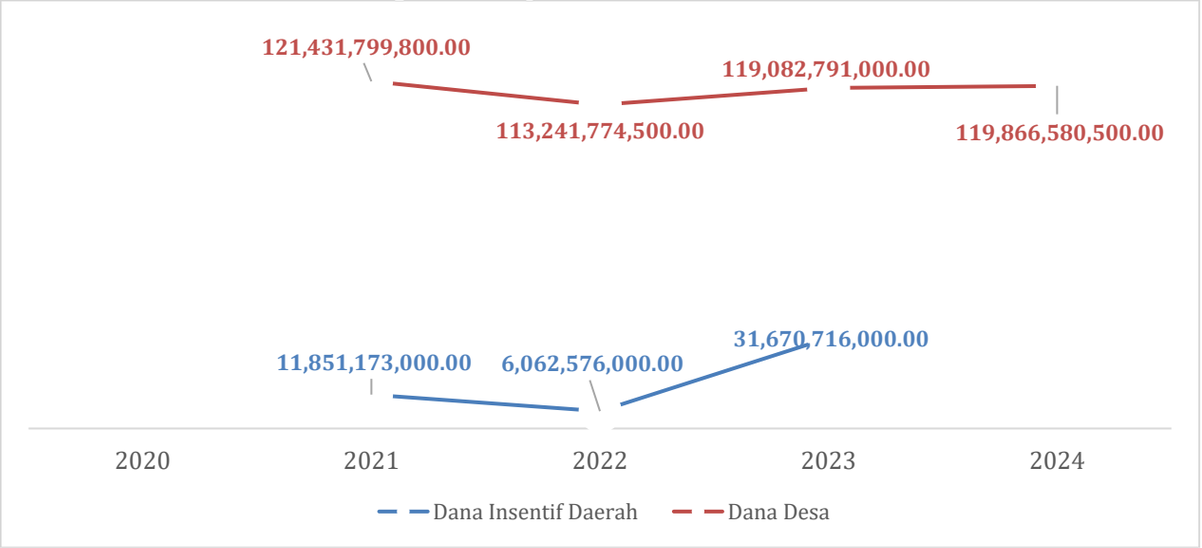
Grafik 3.11
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42).

Grafik 3.12
Perkembangan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya (DID/DD)
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : (1) Pendapatan hibah, (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

No	Pendapatan Hibah	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan
1	**Dari Pemerintah Pusat**	**58.964.497.828,00**	**57.556.630.930,00**	**14.371.792.953,00**	**1.141.524.160,00**	**19.136.080.364,00**	**351,72%**
	a. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP)	4.079.166.805,00	11.249.607.565,00	14.371.792.953,00	351.524.160,00		1,50%
	b. Pendapatan Hibah Dana BOS		46.307.023.365,00				-100,00%
	c. Pendapatan Hibah Dana Bos Satdik SD	39.651.187.140,00					-100,00%
	- BOS Reguler	31.010.077.750,00					-100,00%
	- BOS Afirmasi	6.720.816.017,00					-100,00%
	- BOS Kinerja	1.920.293.373,00					-100,00%
	d. Pendapatan Hibah Dana Bos Satdik SMP	14.199.143.883,00					-100,00%
	- BOS Reguler	12.279.025.511,00					-100,00%
	- BOS Afirmasi	1.440.118.372,00					-100,00%
	- BOS Kinerja	480.000.000,00					-100,00%
	c. Hibah Air Minum	1.035.000.000,00			790.000.000,00		-100,00%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					13.596.913.000,00	100,00%

No	Pendapatan Hibah	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					5.539.167.364,00	100,00%
2	**Bantuan Keuangan dari Provinsi**	**36.135.334.000,00**					**-100,00%**
	a. Kesehatan Gratis	4.960.000.000,00					-100,00%
	Bantuan Tanggap Darurat	1.400.000.000,00					-100,00%
	Bantuan Pembangunan Jalan	29.775.334.000,00					-100,00%
	d. Penerangan Jalan Umum (PU)						-100,00%
Jumlah		***95.099.831.828,00***	***57.556.630.930,00***	***14.371.792.953,00***	***1.141.524.160,00***	***19.136.080.364,00***	**342,45%**

Grafik 3.13
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

3.1.1.2. Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja modal yang terdiri atas Belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal asset tetap lainnya, belanja modal asset lainnya, (3) Belanja Tak Terduga, (4) Belanja Transfer yang terdiri dari transfer bagi hasil ppendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Penganggaran belanja daerah harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD Pokok/APBD Perubahan.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Komponen Belanja terdiri dari: Belanja Tidak Langsung adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga;

dan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi belanja daerah Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan pada periode Tahun Anggaran 2020-2024. Pada Tahun Anggaran 2020 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1.421.821.173.096,80 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1.615.974.976.266,38 pada Tahun Anggaran 2024. Pada kelompok belanja operasi, menunjukkan bahwa komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan rata-rata persentase sebesar 59,99 persen setiap tahunnya. Komponen belanja Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp. 29.202.719.873,63 menurun sebesar Rp. 53.261.269.859 pada tahun 2024. Pada tabel berikut disajikan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022-2024

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
BELANJA									
BELANJA OPERASI									
Belanja Pegawai	632.028.131.193,76	594.066.228.902,00	93,99%	635.895.499.017,00	580.070.956.854,00	91,22%	709.280.930.907,00	676.166.034.346,00	95,33%
Belanja Barang dan Jasa	336.379.162.936,00	315.144.938.564,00	93,69%	387.256.480.599,00	367.285.678.792,60	94,84%	443.402.792.159,00	412.663.493.966,38	93,07%
Belanja Bunga	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00%	2.182.305.743,00	2.182.305.740,00	100,00%	616.628.248,00	616.628.248,00	100,00%
Belanja Subsidi				500.000.000,00	148.561.085,00		0,00	0,00	
Belanja Hibah	30.806.472.496,00	29.202.719.873,63	94,79%	65.952.238.175,00	64.196.846.882,00	97,34%	50.886.016.705,00	53.261.269.859,00	104,67%
Belanja Bantuan Keuangan									
Belanja Bantuan Sosial	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87%	1.435.000.000,00	1.370.000.000,00	95,47%	605.000.000,00	605.000.000,00	100,00%
JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.004.106.580.354,76**	**941.853.951.068,63**	**93,80%**	**1.093.221.523.534,00**	**1.015.254.349.353,60**	**92,87%**	**1.204.791.368.019,00**	**1.143.312.426.419,38**	**94,90%**
BELANJA MODAL									
Belanja Modal Tanah	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19%	4.697.430.000,00	1.688.577.000,00	35,95%	1.172.568.000,00	137.568.000,00	11,73%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.237.648.271,00	45.018.728.283,65	87,86%	34.804.630.498,00	30.238.175.306,00	86,88%	53.055.608.088,00	50.350.857.278,00	94,90%
Belanja Gedung dan Peralatan	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51%	76.917.304.371,00	70.306.621.816,00	91,41%	116.774.148.395,00	111.321.187.769,00	95,33%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60%	160.855.426.202,00	153.493.315.508,00	95,42%	106.295.111.495,00	91.682.071.729,00	86,25%

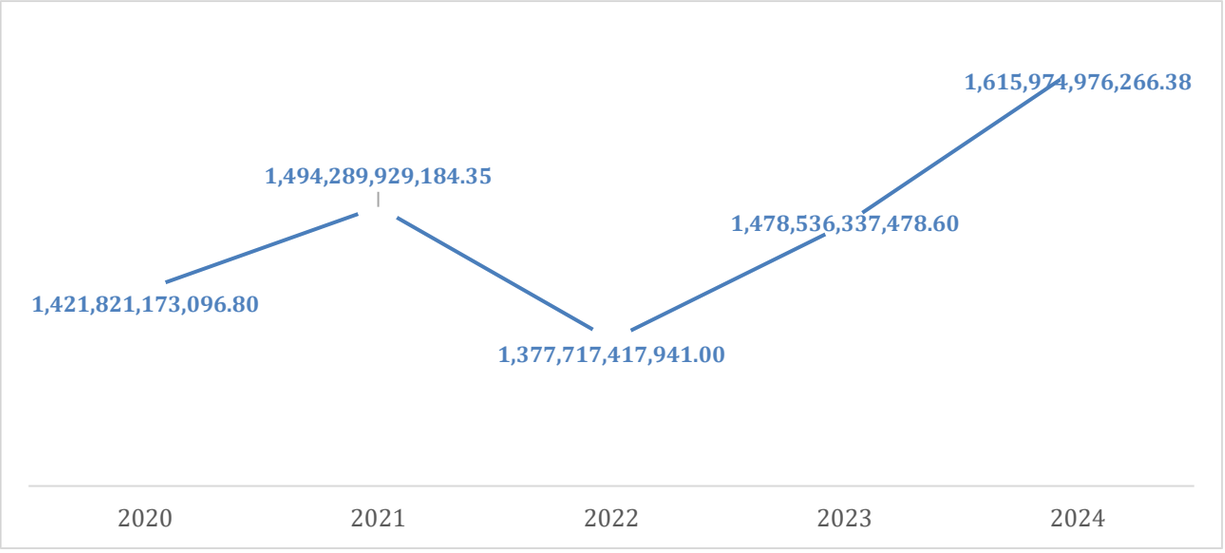
URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.995.450.363,00	3.975.683.469,00	79,59%	4.924.093.576,00	6.542.639.796,00	132,87%	9.205.960.325,00	9.633.993.895,00	104,65%
Belanja Aset Lainnya	240.000.000,00	239.018.000,00	99,59%	99.000.000,00	98.000.000,00	98,99%	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA MODAL	**297.427.859.258,00**	**240.545.028.118,37**	**80,88%**	**282.297.884.647,00**	**262.367.329.426,00**	**92,94%**	**286.503.396.303,00**	**263.125.678.671,00**	**91,84%**
BELANJA TAK TERDUGA									
Belanja Tak Terduga	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91%	6.373.319.600,00	1.681.377.850,00	26,38%	8.987.483.000,00	2.617.300.700,00	29,12%
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**9.600.642.237,00**	**4.599.895.328,00**	**47,91%**	**6.373.319.600,00**	**1.681.377.850,00**	**26,38%**	**8.987.483.000,00**	**2.617.300.700,00**	**29,12%**
JUMLAH BELANJA	**1.311.135.081.849,76**	**1.186.998.874.515,00**	**90,53%**	**1.381.892.727.781,00**	**1.279.303.056.629,60**	**92,58%**	**1.500.282.247.322,00**	**1.409.055.405.790,38**	**93,92%**
TRANSFER									
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN									
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.240.413.300,00	4.133.254.700,00	97,47%	4.240.413.300,00	4.649.358.900,00	109,64%	5.788.731.300,00	5.510.861.600,00	95,20%
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.579.840.100,00	1.541.978.600,00	97,60%	2.244.437.136,00	1.261.619.500,00	56,21%	1.862.577.100,00	1.776.849.300,00	95,40%
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**5.820.253.400,00**	**5.675.233.300,00**	**97,51%**	**6.484.850.436,00**	**5.910.978.400,00**	**91,15%**	**7.651.308.400,00**	**7.287.710.900,00**	**95,25%**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN									
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	185.108.285.800,00	185.043.310.126,00	99,96%	195.411.772.900,00	193.322.302.449,00	98,93%	199.639.255.400,00	199.631.859.576,00	100,00%

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	225.000.000,00	-	0,00%			0,00%			0,00%
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah/ Kab/ Kota ke Daerah/ Provinsi				25.000.000,00	-			-	
Transfer Dana Otonomi Khusus									
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84%	195.436.772.900,00	193.322.302.449,00	98,92%	199.639.255.400,00	199.631.859.576,00	100,00%
JUMLAH TRANSFER	191.153.539.200,00	190.718.543.426,00	99,77%	201.921.623.336,00	199.233.280.849,00	98,67%	207.290.563.800,00	206.919.570.476,00	99,82%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.502.288.621.049,76	1.377.717.417.941,00	91,71%	1.583.814.351.117,00	1.478.536.337.478,60	93,35%	1.707.572.811.122,00	1.615.974.976.266,38	94,64%

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Selama periode 2020-2024 ini, rata – rata pertumbuhan belanja daerah mengalami percepatan mencapai 3,48 persen sebesar 1.421.821.173.096,80 ditahun 2020 menjadi Rp 1.615.974.976.266,38 di tahun 2024.

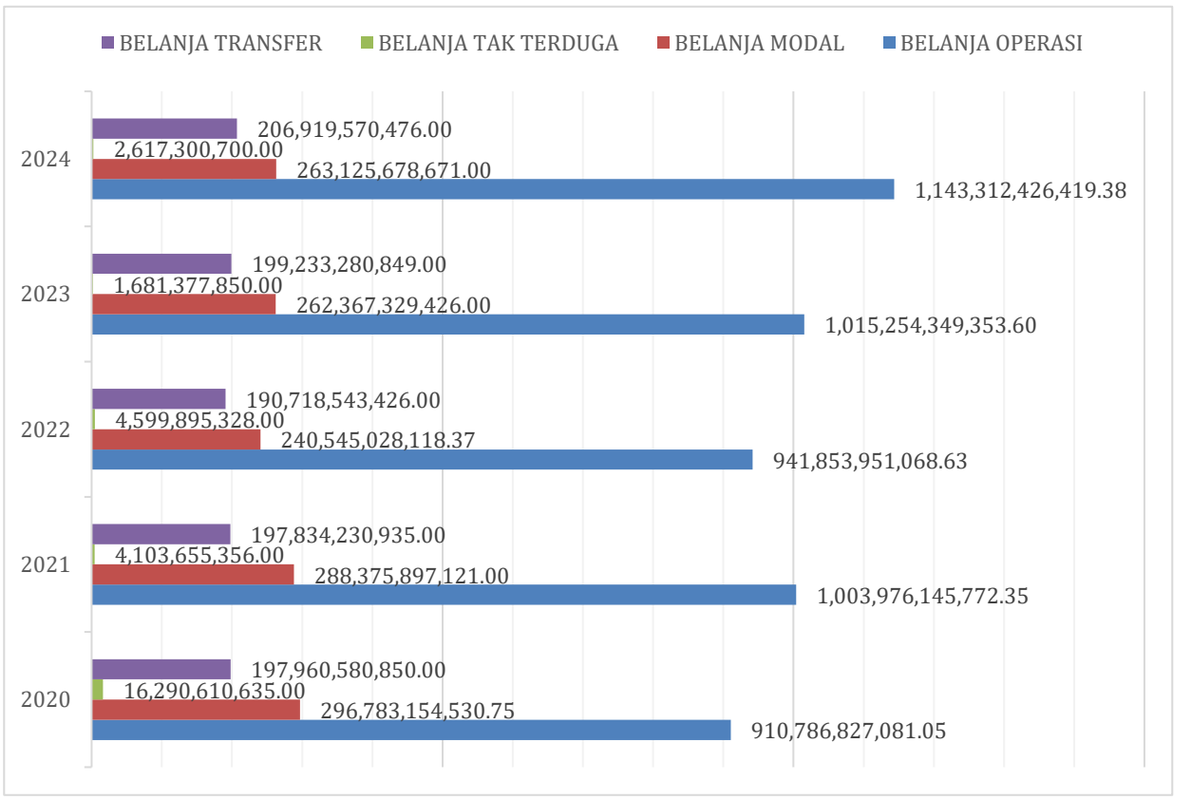
Grafik 3.14
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo 2025

Berdasarkan struktur belanja daerah kabupaten Wajo pada tahun 2020-2024 dapat dilihat alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.15
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo 2025

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali., baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberianpinjaman. Analisis pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai rata-rata

pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah. Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Wajo 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

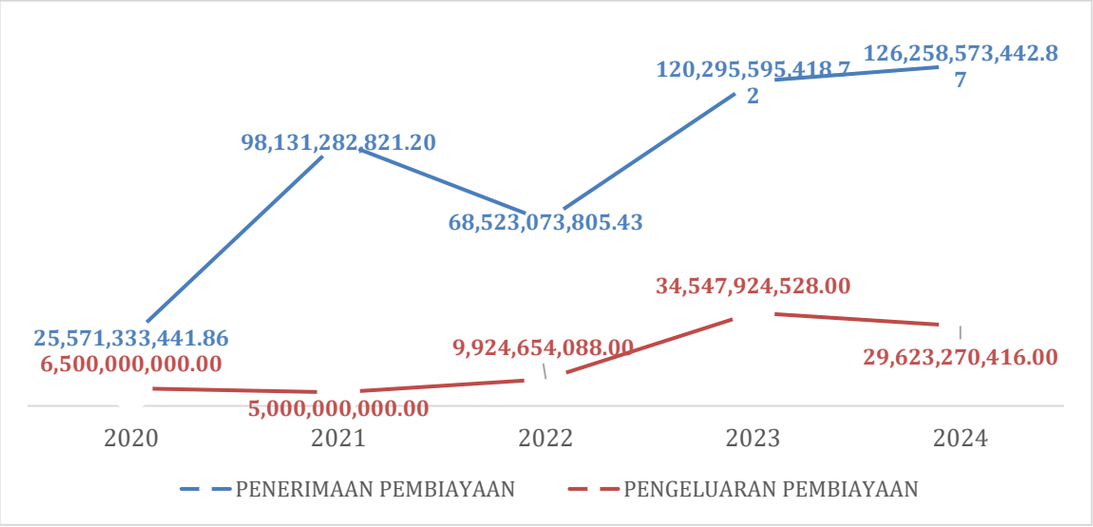
Tabel 3.9
Rata-Rata Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
PEMBIAYAAN	**19.071.333.441,86**	**93.131.282.821,20**	**58.598.419.717,43**	**85.747.670.890,72**	**96.635.303.026,87**	**102,57%**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**25.571.333.441,86**	**98.131.282.821,20**	**68.523.073.805,43**	**120.295.595.418,72**	**126.258.573.442,87**	**83,52%**
Penggunaan SILPA	25.571.333.441,86	35.366.578.811,20	68.523.073.805,43	120.295.595.418,72	126.258.573.442,87	53,14%
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		62.764.704.010,00				-100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6.500.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**9.924.654.088,00**	**34.547.924.528,00**	**29.623.270.416,00**	**77,32%**
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-5,77%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat			4.924.654.088,00	29.547.924.528,00	24.623.270.416,00	241,67%

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.571.333.441,86 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 98.131.282.821,20, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 68.523.073.805,43, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 120.295.595.418,72, dan sampai pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp 126.258.573.442,87.

Grafik 3.16
Realisasi Penerimaan Pembiyaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata pertumbuhan neraca daerah tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021–2023

No.	Uraian	2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1.	**ASET**				
1.1.	**ASET LANCAR**	**127.631.285.989**	**186.084.247.026,33**	**209.189.771.379,05**	**29,11%**
1.1.1.	Kas	68.611.964.826	120.295.664.291,72	126.258.573.442,87	40,14%
1.1.2.	Piutang	35.301.526.185	41.040.842.789,09	55.444.033.858,41	25,68%
1.1.3.	Beban Dibayar Dimuka	208.518.097	1.841.061.765,67	1.560.919.107,27	383,86%
1.1.4.	Persediaan	23.509.276.881	22.906.678.179,86	25.926.244.970,50	5,31%
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**55.404.138.368**	**60.000.000.000,00**	**65.000.000.000,00**	**8,31%**
1.2.1.	Penyertaan Modal pada Bank BPD	55.000.000.000	60.000.000.000,00	65.000.000.000,00	8,71%
1.2.2.	Penyertaan Modal pada Bank PDAM	404.138.368			(50,00%)
1.2.3.	Investasi Permanen Lainnya				0,00%
1.3.	**ASET TETAP**	**3.179.794.603.554**	**3.207.836.348.670,25**	**3.233.047.481.659,86**	**0,83%**
1.3.1.	Tanah	744.605.196.862	746.616.604.861,75	758.598.432.861,75	0,94%
1.3.2.	Peralatan dan mesin	695.453.671.431	735.186.507.474,94	755.921.682.605,63	4,27%
1.3.3.	Gedung dan bangunan	1.024.570.027.820	1.120.762.011.069,79	1.181.210.452.713,97	7,39%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.769.022.173.005	2.906.661.362.258,21	3.077.601.491.229,27	5,43%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	108.517.392.093	100.694.232.490,54	107.309.328.786,54	(0,32%)
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	55.097.437.184	45.006.308.577,39	41.675.291.805,64	(12,86%)
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(2.217.471.294.839)	(2.447.090.678.062,37)	(2.689.269.198.342,94)	10,13%
1.3.8.	dst.....				0,00%
1.3.	**ASET LAINNYA**	**20.261.559.587,88**	**43.754.012.851,93**	**32.465.026.031,48**	**45,07%**

No.	Uraian	2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran				0,00%
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	7.244.947.771,20	7.349.096.471,20	7.704.257.095,81	3,14%
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	234.371.000,00	234.371.000,00	234.371.000,00	0,00%
1.3.4.	Aset tak berwujud	584.778.226,68	767.912.613,35	656.645.666,67	8,41%
1.3.5.	Tagihan Pelelangan Ex-Ornament				0,00%
1.3.6.	Aset Lain-lain	12.197.462.590,00	32.740.344.335,39	23.869.752.269,00	70,66%
1.3.7.	Dana Transfer Treasury Deposit Fasiity (TDF)		2.662.288.432,00	-	(50,00%)
	JUMLAH ASET DAERAH	**3.383.091.587.498,63**	**3.497.674.608.548,51**	**3.539.702.279.070,39**	**2,29%**
2.	**KEWAJIBAN**	**99.314.159.371,02**	**94.898.500.105,93**	**66.234.571.480,63**	**(17,33%)**
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**41.779.847.403,02**	**70.275.229.689,93**	**66.234.571.480,63**	**31,23%**
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga				0,00%
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah				0,00%
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	3.736.598.166,75	1.436.602.488,17	2.656.782.649,00	11,69%
2.1.4.	Utang Perhitungan Fihak III				0,00%
2.1.5.	Utang Bunga, Komitmen dan Denda	3.303.758.567,06	2.182.305.743,00	616.628.251,00	(52,84%)
2.1.6.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.230.392.042,00	29.547.924.528,00	24.623.270.416,00	224,13%
2.1.7.	Utang Belanja	623.935.266,61	31.540.905.852,01	38.337.890.164,63	2488,35%
2.1.8.	Utang Jangka Pendek Lainnya	28.885.163.360,60	5.567.491.078,75	-	(90,36%)
2.1.9.	Utang Jangka Pendek Lainnya-Jasa Bank				0,00%
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**57.534.311.968**	**24.623.270.416,00**	**-**	**(78,60%)**
2.1.1.	Utang Kepada Pemerintah Pusat	57.534.311.968	24.623.270.416,00	-	(78,60%)
3.	**EKUITAS**	**3.283.777.428.127,61**	**3.402.776.108.442,58**	**3.473.467.707.589,76**	**2.85%**
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	**85.851.438.586**	**115.809.017.336**	**142.955.199.898**	**29,17%**

No.	Uraian	2021 (Audited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)	2023 (Audited) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
3.1.1.	SILPA	68.611.964.826	120.295.664.292	126.258.573.443	40,14%
3.1.2.	Cadangan piutang	35.510.044.282	42.881.904.555	57.004.952.966	26,85%
3.1.3.	Cadangan persediaan	23.509.276.881	22.906.678.180	25.926.244.971	5,31%
3.1.4.	Pendapatan yang ditangguhkan				0,00%
3.1.5.	Dana yang harus disediakan u/ pembay.Utg.Jk.Pendek	(41.779.847.403)	(70.275.229.690)	(66.234.571.481)	31,23%
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**3.197.925.989.541,39**	**3.286.967.091.106,18**	**3.330.512.507.691,34**	**2,05%**
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	3.179.794.603.553,51	3.207.836.348.670,25	3.233.047.481.659,86	0,83%
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	20.261.559.587,88	43.754.012.851,93	32.465.026.031,48	45,07%
3.2.3.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	55.404.138.368,00	60.000.000.000,00	65.000.000.000,00	8,31%
3.2.4.	Dana yang harus disediakan u/ pembay.Utg.Jk.Panjang	(57.534.311.968,00)	(24.623.270.416,00)	-	(78,60%)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.383.091.587.499**	**3.497.674.608.549**	**3.539.702.279.070**	**2,29%**

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

3.1.2.1. Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2019-2023, Kabupaten Wajo mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 2.29 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset lainnya yang mencapai 45.07 persen, sementara aset tetap hanya mengalami rata-rata pertumbuhan 0.83 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset lancar daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek daerah.

3.1.2.2. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Wajo selama periode 2019-2023 terus mengalami penurunan dengan capaian kewajiban rata-rata sebesar -17,33 persen

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Wajo selama periode 2019-2023, mengalami trend positif, meskipun rata-rata pertumbuhan yang relatif kecil yakni hanya 2,85 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

3.1.2.4. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Ratio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahkemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

1) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
2) Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Untuk rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perkembangan Rasio Likuiditas Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rasio Lancar (Current Ratio)			Rasio Quick (Quick Ratio)			
		Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
a	b	c	d	e = c/d	f	g	h	i = (f-g)/h
1	2019	92.084.742.458,89	32.665.193.254,26	2,82	92.084.742.458,89	27.023.605.919,21	32.665.193.254,26	1,99
2	2020	71.479.274.423,01	18.372.306.728,42	3,89	71.479.274.423,01	20.587.941.374,86	18.372.306.728,42	2,77
3	2021	127.631.285.989,24	41.779.847.403,02	3,05	127.631.285.989,24	23.509.276.881,09	41.779.847.403,02	2,49
4	2022	186.084.247.026,33	70.275.229.689,93	2,65	186.084.247.026,33	22.906.678.179,86	70.275.229.689,93	2,32
5	2023	209.189.771.379,05	66.234.571.480,63	3,16	209.189.771.379,05	25.926.244.970,50	66.234.571.480,63	2,77

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Lancar *(Current Ratio)* Kabupaten Wajo pada tahun 2019–2023 menunjukkan angka diatas 1 (satu) yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo atau aset lancar mampu membayar kewajiban jangka pendek. Begitupun pada Rasio Quick *(Quick Ratio)* pada tahun 2019-2023 menunjukkan angka diatas 1 (satu) yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo atau asset lancar mampu membayar kewajiban jangka pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

1) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
2) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Untuk rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perkembangan Rasio Solvabilitas Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Rasio Hutang-Asset			Rasio Hutang-Modal		
		Total Hutang	Total Asset	Rasio Hutang terhadap Total Aset	Total Hutang	Total Ekuitas	Rasio Hutang Terhadap Modal
a	b	c	d	e = c/d	f	g	h= f/g
1	2019	32.665.193.254,26	3.209.786.509.476,48	0,01	32.665.193.254,26	3.177.121.316.222,21	0,01
2	2020	18.372.306.728,42	3.329.874.563.689,26	0,01	18.372.306.728,42	3.311.502.256.960,84	0,01
3	2021	99.314.159.371,02	3.383.091.587.498,63	0,03	99.314.159.371,02	3.283.777.428.127,61	0,03
4	2022	94.898.500.105,93	3.497.674.608.548,52	0,03	94.898.500.105,93	3.402.776.108.442,58	0,03
5	2023	66.234.571.480,63	3.539.702.279.070,39	0,02	66.234.571.480,63	3.473.467.707.589,76	0,02

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Utang terhadap asset Kabupaten Wajo pada tahun 2019 – 2023 menunjukkan angka dibawah 1 (satu) yaitu sebesar 0,01 pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,03 yang berarti bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wajo dapat ditutupi oleh asset yang dimiliki, kemudian dilihat dari rasio utang terhadap modal berada dibawah 1 (satu) yaitu sebesar 0,01 pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,03 ini menunjukkan hutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat ditutupi dengan modal yang ada.

c. Ratio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

1) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rata} - \text{rata umur piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran piutang}}$$

Dimana:

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{Pendapatan daerah}}{\text{Rata} - \text{rata piutang pendapatan daerah}}$$

Sedangkan:

$$\text{Rata} - \text{rata piutang pendapatan} = \frac{(\text{Saldo awal piutang} + \text{Saldo akhir piutang})}{2}$$

2) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rata} - \text{rata umur piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran persediaan}}$$

Dimana:

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{Rata} - \text{rata nilai persediaan}}$$

Sedangkan:

$$\text{Rata} - \text{rata nilai persediaan} = \frac{(\text{Saldo awal persediaan} + \text{Saldo akhir persediaan})}{2}$$

Untuk Rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perkembangan Rasio Aktivitas Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rasio Aktivitas						
		Saldo Awal Piutang	Saldo Akhir Piutang	Total Piutang	Rata-Rata Piutang Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-Rata Umur Piutang
a	b	c	d	e=c+d	f=e/2	g	h=g/f	i=365/h
1	2019	-	39.262.788.658,50	39.262.788.658,50	19.631.394.329,25	1.575.433.188.853,20	80,25	4,55
2	2020	39.262.788.658,50	14.400.770.857,63	53.663.559.516,13	26.831.779.758,07	1.439.325.665.627,14	53,64	6,80
3	2021	14.400.770.857,63	35.301.526.184,81	49.702.297.042,44	24.851.148.521,22	1.469.701.973.295,58	59,14	6,17
4	2022	35.301.526.184,81	41.040.842.789,08	76.342.368.973,89	38.171.184.486,95	1.439.414.593.642,29	37,71	9,68
5	2023	41.040.842.789,08	55.444.033.858,41	96.484.876.647,49	48.242.438.323,75	1.519.047.240.030,75	31,49	11,59

Berdasarkan tabel diatas rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2019 sebesar 4,55, tahun 2020 sebesar 6,80, tahun 2021 sebesar 6,17, dan tahun 2022 sebesar 9,68 dan tahun 2023 sebesar 11,59.

Untuk piutang Pemerintah Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan piutang retribusi yang tergolong piutang lancar dimasukkan sebagai salah satu pendapatan dan menjadi target pendapatan pada SKPD terkait sesuai jenis pendapatan yang akan diterima dari piutang tersebut. Tidak diperhitungkan pada penerimaan pembiayaan, karena piutang dimaksud sudah diakui secara akrual dineraca pada SKPD terkait dan untuk penerimaan pembiayaan harus dipastikan diterima di tahun berkenaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai demi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait dapat dilihat pada proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Wajo
Tahun 2022-2024

Uraian	Realisasi (Rp)		
	2022	2023	2024
Belanja Daerah	**1.377.717.417.941,00**	**1.478.536.337.478,60**	**1.615.974.976.266,38**
Belanja Operasi	**941.853.951.068,63**	**1.015.254.349.353,60**	**1.143.312.426.419,38**
Belanja Pegawai	594.066.228.902,00	580.070.956.854,00	676.166.034.346,00
Belanja Barang dan Jasa	315.144.938.564,00	367.285.678.792,60	412.663.493.966,38
Belanja Bunga	3.186.313.729,00	2.182.305.740,00	616.628.248,00
Belanja Subsidi	-	148.561.085,00	0,00
Belanja Hibah	29.202.719.873,63	64.196.846.882,00	53.261.269.859,00
Belanja Bantuan Sosial	253.750.000,00	1.370.000.000,00	605.000.000,00
Belanja Modal	**240.545.028.118,37**	**262.367.329.426,00**	**263.125.678.671,00**
Belanja Modal Tanah	2.054.408.000,00	1.688.577.000,00	137.568.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.018.728.283,65	30.238.175.306,00	50.350.857.278,00
Belanja Gedung dan Peralatan	68.659.538.144,00	70.306.621.816,00	111.321.187.769,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.597.652.221,72	153.493.315.508,00	91.682.071.729,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.975.683.469,00	6.542.639.796,00	9.633.993.895,00
Belanja Aset Lainnya	239.018.000,00	98.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**4.599.895.328,00**	**1.681.377.850,00**	**2.617.300.700,00**
Belanja Transfer	**190.718.543.426,00**	**199.233.280.849,00**	**206.919.570.476,00**
Belanja Bagi Hasil	5.675.233.300,00	5.910.978.400,00	7.287.710.900,00
Belanja Bantuan Keuangan	185.043.310.126,00	193.322.302.449,00	199.631.859.576,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo Tahun 2025

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2022-2024 mengalami fluktuatif. Tahun 2022 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 398.517.847.011,00. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023 ditunjukan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2021	406.028.357.552,00	1.301.455.698.249,35	31,20%
2	2022	398.517.847.011,00	1.196.923.528.603,00	33,30%
3	2023	388.901.063.712,00	1.313.850.981.157,60	29,60%

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

3.2.1.2. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Untuk lebih jelasnya mengenai belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	406.028.357.552	398.517.847.011	388.901.063.712	(2,13)
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	40.698.909.757	30.781.697.694	30.781.697.694	(12,18)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	17.751.538.957	17.818.052.372	46.712.224.052	81,27
4	Belanja Bunga	125.402.270	3.186.313.729	2.182.305.740	1.204,68
5	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2.320.101.040	2.343.777.291	1.807.404.606	(10,93)

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.659.578.453	1.845.225.174	1.312.939.988	(8,83)
	Insentif Pemungutan Retribusi daerah	660.522.587	498.552.117	494.464.618	(12,67)
6	Belanja Bagi Hasil Desa	197.806.130.935	190.718.543.426	199.233.280.849	0,44
	Alokasi Dana Desa	71.700.488.800	71.801.535.626	74.239.511.449	1,77
	Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat	121.431.799.800	113.241.774.500	119.082.791.000	(0,79)
	Bagi hasil pajak dan retribusi ke desa	4.673.842.335	5.675.233.300	5.910.978.400	(0,79)
7	Bantuan Partai Politik	876.351.696	876.351.696	876.351.696	12,79
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	0,00
9	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	24.678.608.088	24.061.839.250	26.676.232.233	4,18
10	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	0,00
11	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	0,00
12	Belanja Honorium BLUD	3.819.713.131	8.531.968.824	11.101.904.996	76,74
13	Belanja Barang & Jasa BLUD	16.618.748.611	46.481.953.586	56.624.460.543	100,76
14	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		0,00
15	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	4.924.654.088,00	29.547.924.528,00	250,00
16	Pembayaran Utang Pihak Ketiga-Rekanan	-	-	-	0,00
17	*Penyertaan Modal (PT. Bank Sulselbar)*	55.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000	8,71
TOTAL		**765.723.862.037**	**788.242.998.967**	**859.444.850.649**	**5,99**

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo 2024

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pertumbuhan mengenai pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Wajo tahun 2021-2023 adalah 5,99 persen. Total pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan

bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara pendapatan dalam belanja daerah, dimana dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Pada setiap kebijakan pengganggaran, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pembiayaan saat penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Tabel 3.17
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Wajo Tahun 2022-2024

NO	Uraian	Realisasi (Rp)		
		2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.439.414.593.642,29	1.519.047.240.030,75	1.586.277.611.791,16
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.377.717.417.941,00	1.478.536.337.478,60	1.615.974.976.266,38
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.924.654.088,00	34.547.924.528,00	29.623.270.416,00
A	**Defisit riil**	**51.772.521.613,29**	**5.962.978.024,15**	**-59.320.634.891,22**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	68.523.073.805,43	120.295.595.418,72	126.258.573.442,87
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
9	Penerimaan Piutang Daerah			
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**68.523.073.805,43**	**120.295.595.418,72**	**126.258.573.442,87**

NO	Uraian	Realisasi (Rp)		
		2022	2023	2024
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	120.295.595.418,72	126.258.573.442,87	66.937.938.551,65

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo 2025

Berdasarkan Tabel 3.18, penganggaran Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2022-2024 mengalami defisit pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi belanja dan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan daerah.

Untuk memberi gambaran tentang komposisi SiLPA digunakan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran sehingga dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi SiLPA tahun 2022-2024 Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Wajo Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022		2023		2024		Rata-rata (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	**120.295.595.418,72**		**126.258.573.443,15**		**126.258.573.442,87**		**-**
1	Pelampauan penerimaan PAD	-7.925.942.811,71	-6,59%	12.458.401.032,87	9,87%	6.456.008.520,28	5,11%	2,80%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-16.334.020.969,00	-13,58%	8.640.211.611,88	6,84%	8.640.211.611,87	6,84%	0,04%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.584.683.693,00	2,98%	-1.618.052.840,00	-1,28%	0,00	0,00%	0,57%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	140.970.875.506,43	117,19%	106.778.013.638,40	84,57%	111.162.353.310,72	88,04%	96,60%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
6	Kegiatan Lanjutan							

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2025

Gambaran riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Wajo
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	68.611.964.826,43	120.295.664.291,72	126.258.573.442,87
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	99.314.159.371,02	94.898.500.105,93	66.234.571.480,63
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		25.397.164.185,79	60.024.001.962,24

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

Gambaran proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Wajo

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2023 (Rp)	Tingkat pertum buhan (%)	Proyeksi (Rp)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Saldo kas neraca daerah	126.258.573.442,87	40,14	132.221.483.000,00	138.184.392.000,00	144.147.301.000,00	150.110.211.000,00	156.073.120.000,00
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	66.234.571.480,63	-17,33	67.890.436.000,00	69.587.697.000,00	71.327.390.000,00	73.110.574.000,00	74.938.339.000,00
2.	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**60.024.001.962,24**		**64.331.047.000,00**	**68.596.695.000,00**	**72.819.911.000,00**	**76.999.637.000,00**	**81.134.781.000,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan di Kabupaten Wajo dalam 5 tahun kedepan perlu dihitung perkiraan kemampuan keuangan anggaran.

3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025-2029. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada keuangan daerah di masa mendatang, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, selain asumsi tersebut akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya. Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Wajo yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah lima tahun ke depan.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Wajo selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Wajo, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Wajo, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada

kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dapat dicapai oleh setiap sumber pendapatan serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi pendapatan untuk 5 (lima) tahun diharapkan dapat meningkat dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan membangun sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data objek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Perangkat Daerah terkait harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem pemungutan dan pengawasan
3. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

4. Mendayagunakan kekayaan atau asset-asset yang idle dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
5. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.
6. Peningkatan sosialisasi pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 s/d 2029

No	Uraian	Realisasi 2023	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Pendapatan	1.519.047.240.030,75	1.567.052.311.480,00	1.575.247.036.264,20	1.583.441.761.048,39	1.591.636.485.832,59	1.599.831.210.616,78
1	**Pendapatan Asli Daerah**	187.640.193.796,87	186.954.009.480,00	187.496.376.620,20	188.038.743.760,39	188.581.110.900,59	189.123.478.040,78
	Pajak Daerah	55.024.628.547,00	50.487.224.412,00	50.739.660.534,06	50.992.096.656,12	51.244.532.778,18	51.496.968.900,24
	Retribusi Daerah	17.783.697.364,00	16.997.448.000,00	17.048.440.344,00	17.099.432.688,00	17.150.425.032,00	17.201.417.376,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.100.236.523,00	18.000.000.000,00	18.036.000.000,00	18.072.000.000,00	18.108.000.000,00	18.144.000.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	97.731.631.362,87	101.469.337.068,00	101.672.275.742,14	101.875.214.416,27	102.078.153.090,41	102.281.091.764,54
2	**Pendapatan Transfer**	1.330.265.522.073,88	1.380.098.302.000,00	1.387.750.659.644,00	1.395.403.017.288,00	1.403.055.374.932,00	1.410.707.732.576,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.083.095.943.992,00	1.184.775.398.000,00	1.191.610.086.480,00	1.198.444.774.960,00	1.205.279.463.440,00	1.212.114.151.920,00
	Bagi Hasil Pajak	47.269.539.235,00	47.911.098.000,00	47.959.009.098,00	48.006.920.196,00	48.054.831.294,00	48.102.742.392,00
	Dana Alokasi Umum	712.384.708.733,00	752.174.797.000,00	758.192.195.376,00	764.209.593.752,00	770.226.992.128,00	776.244.390.504,00
	Dana Alokasi Khusus	323.441.696.024,00	384.689.503.000,00	385.458.882.006,00	386.228.261.012,00	386.997.640.018,00	387.767.019.024,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	150.753.507.000,00	115.850.226.000,00	116.429.477.130,00	117.008.728.260,00	117.587.979.390,00	118.167.230.520,00
	Dana Insentif Daerah	31.670.716.000,00					
	Dana Desa	119.082.791.000,00	115.850.226.000,00	116.429.477.130,00	117.008.728.260,00	117.587.979.390,00	118.167.230.520,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya	90.591.355.269,88	75.132.678.000,00	75.358.076.034,00	75.583.474.068,00	75.808.872.102,00	76.034.270.136,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.591.355.269,88	75.132.678.000,00	75.358.076.034,00	75.583.474.068,00	75.808.872.102,00	76.034.270.136,00
	Bantuan Keuangan	5.824.715.812,00	4.340.000.000,00	4.353.020.000,00	4.366.040.000,00	4.379.060.000,00	4.392.080.000,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.824.715.812,00	4.340.000.000,00	4.353.020.000,00	4.366.040.000,00	4.379.060.000,00	4.392.080.000,00
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	1.141.524.160,00	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	1.141.524.160,00					
	Belanja	1.478.536.337.478,60	1.567.052.311.480,00	1.575.247.036.264,20	1.583.441.761.048,39	1.591.636.485.832,59	1.599.831.210.616,78
1	**Belanja Operasi**	1.015.254.349.353,60	1.101.866.204.666,00	1.109.168.032.692,94	1.116.469.860.719,87	1.123.771.688.746,81	1.131.073.516.773,74
	Belanja Pegawai	580.070.956.854,00	649.498.806.926,00	654.694.797.381,41	659.890.787.836,82	665.086.778.292,22	670.282.768.747,63
	Belanja Barang dan Jasa	367.285.678.792,60	400.367.592.016,00	402.369.429.976,08	404.371.267.936,16	406.373.105.896,24	408.374.943.856,32
	Belanja Bunga	2.182.305.740,00	616.628.248,00	617.861.504,50	619.094.760,99	620.328.017,49	621.561.273,98
	Belanja Subsidi	148.561.085,00	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	64.196.846.882,00	50.863.177.476,00	50.964.903.830,95	51.066.630.185,90	51.168.356.540,86	51.270.082.895,81
	Belanja Bantuan Sosial	1.370.000.000,00	520.000.000,00	521.040.000,00	522.080.000,00	523.120.000,00	524.160.000,00
2	**Belanja Modal**	262.367.329.426,00	244.352.600.336,00	244.850.823.240,67	245.349.046.145,34	245.847.269.050,02	246.345.491.954,69
	Belanja Modal Tanah	1.688.577.000,00	3.172.568.000,00	3.188.430.840,00	3.204.293.680,00	3.220.156.520,00	3.236.019.360,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.238.175.306,00	33.881.379.739,00	33.949.142.498,48	34.016.905.257,96	34.084.668.017,43	34.152.430.776,91
	Belanja Gedung dan Peralatan	70.306.621.816,00	122.864.453.110,00	123.110.182.016,22	123.355.910.922,44	123.601.639.828,66	123.847.368.734,88

No	Uraian	Realisasi 2023	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.493.315.508,00	77.972.780.462,00	78.128.726.022,92	78.284.671.583,85	78.440.617.144,77	78.596.562.705,70
	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.542.639.796,00	6.461.419.025,00	6.474.341.863,05	6.487.264.701,10	6.500.187.539,15	6.513.110.377,20
	Belanja Aset Lainnya	98.000.000,00	-	-	-	-	-
3	**Belanja Tak Terduga**	1.681.377.850,00	20.000.000.000,00	20.193.840.346,11	20.387.680.692,22	20.581.521.038,33	20.775.361.384,44
	Belanja Tak Terduga	1.681.377.850,00	20.000.000.000,00	20.193.840.346,11	20.387.680.692,22	20.581.521.038,33	20.775.361.384,44
4	**Transfer**	199.233.280.849,00	200.833.506.478,00	201.034.339.984,48	201.235.173.490,96	201.436.006.997,43	201.636.840.503,91
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.910.978.400,00	6.996.572.878,00	7.003.569.450,88	7.010.566.023,76	7.017.562.596,63	7.024.559.169,51
	Transfer Bantuan Keuangan	193.322.302.449,00	193.836.933.600,00	194.030.770.533,60	194.224.607.467,20	194.418.444.400,80	194.612.281.334,40
	Surplus / (Defisit)	40.510.902.552,15	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Daerah	85.747.670.890,72	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan	120.295.595.418,72	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Sisa Lebih SiLPA	120.295.595.418,72	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-					
	Pengeluaran Pembiayaan	34.547.924.528,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	29.547.924.528,00					
	SILPA	126.258.573.442,87	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

3.3.3. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Wajo

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2023 (Rp)	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi (Rp)				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	388.901.063.712	-2,13%	398.623.591.000	408.589.181.000	418.803.910.000	429.274.008.000	440.005.858.000
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	30.781.697.694	-12,18%	31.551.241.000	32.340.022.000	33.148.522.000	33.977.235.000	34.826.666.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	46.712.224.052	81,27%	47.880.030.000	49.077.031.000	50.303.957.000	51.561.556.000	52.850.594.000
4	Belanja Bunga *	2.182.305.740	1204,68%	2.236.864.000	2.292.785.000	2.350.105.000	2.408.858.000	2.469.079.000
5	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1.807.404.606	-10,90%	1.852.590.000	1.898.905.000	1.946.378.000	1.995.037.000	2.044.913.000
6	Belanja bagi hasil*	199.233.280.849	0,44%	204.214.113.000	209.319.466.000	214.552.453.000	219.916.264.000	225.414.171.000
7	Bantuan Partai Politik	876.351.696	0,00%	898.261.000	920.718.000	943.735.000	967.329.000	991.512.000
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-						
9	Belanja Jasa Kantor	26.676.232.233	4,18%	27.343.139.000	28.026.717.000	28.727.385.000	29.445.570.000	30.181.709.000
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (Telah ada kontrak jangka panjang)	-						
11	Belanja Honorium BLUD	11.101.904.996	76,74%	11.379.453.000	11.663.939.000	11.955.538.000	12.254.426.000	12.560.787.000
12	Belanja Barang & Jasa BLUD	56.624.460.543	100,76%	58.040.073.000	59.491.074.000	60.978.351.000	62.502.810.000	64.065.380.000

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2023 (Rp)	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi (Rp)				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
13	Pembentukan Dana Cadangan	-						
14	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	29.547.924.528	250,00%	30.286.623.000	31.043.789.000	31.819.883.000	32.615.380.000	33.430.765.000
15	Pembayaran Utang Pihak Ketiga-Rekanan	-						
16	Penyertaan Modal (PT. Bank Sulselbar) *	5.000.000.000	8,71%	5.125.000.000	5.253.125.000	5.384.454.000	5.519.065.000	5.657.042.000
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**799.444.850.649**	**5,99%**	**819.430.971.915**	**839.916.746.213**	**860.914.664.868**	**882.437.531.490**	**904.498.469.777**

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

3.3.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Selama periode lima tahun ke depan, diprediksikan setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan	1.567.052.311.480	1.575.247.036.264	1.583.441.761.048	1.591.636.485.833	1.599.831.210.617
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	64.331.047.000	68.596.695.000	72.819.911.000	76.999.637.000	81.134.781.000
	Total penerimaan	1.631.383.358.480	1.643.843.731.264	1.656.261.672.048	1.668.636.122.833	1.680.965.991.617
	Dikurangi:					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	819.430.971.915	839.916.746.213	860.914.664.868	882.437.531.490	904.498.469.777
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	811.952.386.565	803.926.985.051	795.347.007.180	786.198.591.342	776.467.521.839

Sumber: BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
d. Belanja Modal Transportasi, besarannya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029.

Prioritas Ketiga untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2025–2029, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Target (Rp)				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	784.484.756.923,75	805.150.696.580,37	849.294.645.931,08	927.796.339.257,73	1.056.049.619.377,72
1	Prioritas I	196.121.189.230,94	201.287.674.145,09	212.323.661.482,77	231.949.084.814,43	264.012.404.844,43
2	Prioritas II	392.242.378.461,87	402.575.348.290,19	424.647.322.965,54	463.898.169.628,86	528.024.809.688,86
3	Prioritas III	196.121.189.230,94	201.287.674.145,09	212.323.661.482,77	231.949.084.814,43	264.012.404.844,43

Sumber : BPKPD Kabupaten Wajo, 2024

BAB
IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang kurang didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori.

Melihat pada rumusan permasalahan yang telah dianalisis berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Berikut ini diuraikan 4 indikator permasalahan pembangunan daerah.

4.1.1.1. Rendahnya Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat Kabupaten Wajo masih tergolong rendah. PDRB/kapita pada tahun 2022 sebesar Rp 64.14 juta/kapita/tahun, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi yang sebesar Rp 65.59 juta/kapita/tahun, dan nasional yang sebesar Rp 71.03 juta/kapita/tahun. Secara tren pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir (2013-2022) PDRB perkapita Kabupaten, Provinsi dan Nasional mengalami kenaikan pendapatan perkapita, namun Kabupaten Wajo secara rata-rata masih dibawah Provinsi dan Nasional.

Negara maju minimal mencapai pendapatan US$ 11.906/tahun. Bila nilai dollar sebesar Rp.15.500 berarti PDRB/kapita Indonesia dikatakan negara maju bila pendapatan sebesar Rp. 184.500.000/tahun. Dengan demikian, Kabupaten Wajo dapat menyumbang pencapaian Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 bila PDRB/kapita mencapai 184.500.000/tahun atau tiga kali lebih besar dari PDRB/kapita tahun 2022.

Rendahnya pendapatan masyarakat Kabupaten Wajo disebabkan karena belum terjadinya transformasi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 34%, sedangkan kontribusi sektor industri sebesar 3,90% dan sektor jasa sebesar 0,46%. Industrialisasi cenderung stagnan, bahkan terjadi deindustrialisasi, terutama pada industri manufaktur. Dengan masih

dominannya sektor pertanian, nilai perekonomian lebih banyak dikontribusi oleh produk primer yang nilai tambahnya rendah, sehingga produktivitas petani sebagai tenaga kerja rendah. Salah satu potensi industri di Kabupaten Wajo adalah industri tenun sutera. Permasalahannya adalah benang sutera yang digunakan berbahan baku impor, karena industri hulu yakni produksi benang melalui budidaya ulat sutera sudah mati. Potensi lain adalah industri pengolahan beras, tetapi wirausaha pada bidang ini kurang berkembang, sehingga produksi gabah sebagian diolah di daerah lain.

4.1.1.2. Angka Kemiskinan dan Ketimpangan yang masih tinggi

Angka Kemiskinan Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 10 tahun (2013-2022) menunjukkan penurunan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 namun setelah itu mengalami fluktuasi ditahun-tahun selanjutnya. Angka Kemiskinan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,50% dari tahun sebelumnya dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 6,91, tahun 2020 kembali naik menjadi 6,95 dan turun lagi pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022 kembali naik pada titik 6,57%.

Secara perbandingan data angka kemiskinan Kabupaten Wajo selalu lebih rendah terhadap Provinsi dan Nasional. Namun melihat tren angka kemiskinan Kabupaten Wajo yang fluktuatif perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah serta mengambil program pencegahan kenaikan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan megatrend nasional dan global.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah angka ketimpangan atau indeks gini, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Berdasarkan Data indeks gini Kabupaten Wajo tahun 2019 mencapai angka 0,347, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,375 dengan kategori ketimpangan sedang. Jika dilakukan proyeksi berdasarkan tren pertumbuhan ketimpangan pendapatan 4 (empat) tahun terakhir dapat melanjutkan tren atau memperparah ketimpangan pendapatan yang ada.

Demikian pula dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Wajo, yang menunjukkan angka 0,98 (2020), lalu meningkat menjadi 0,79 (2021) dan kembali mengalami penurunan menjadi 0,86 (2022). Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wajo, menunjukkan angka 0,21 (2020), lalu menurun menjadi 0,15 (2021) dan kembali mengalami peningkatan menjadi 0,21 (2022). Kedua indikator kemiskinan

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan baik kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan Kabupaten Wajo tahun 2020 hingga 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional.

Dalam rencana jangka panjang nasional Indonesia Emas 2045 pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan sasaran dalam pembangunan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Persentase angka kemiskinan ditargetkan menjadi 0% dan rasio ketimpangan antar penduduk dan antar wilayah juga berkurang. Target Tingkat kemiskinan yang diharapkan pada kisaran 0.5 - 0.8 persen dan ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0.377-0.320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB kti menjadi 28.5 persen.

Sehingga angka terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Wajo yaitu sebesar 6,57 pada tahun 2022 diharapkan mampu mencapai target pada tahun 2045 yaitu kisaran 0,5 - 0,8 persen. Kondisi ini perlu perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Daerah mengingat tren pertumbuhan indeks gini 4 tahun terakhir yang berpeluang melanjutkan angka ketimpangan yang ada.

Dari total pekerja di Kabupaten Wajo pada tahun 2022, sektor tenaga kerja paling tinggi adalah sektor pertanian sebesar 45,10%. Yang dimana dapat mempengaruhi pendapatan sebagian besar dari masyarakat wajo. Pada tahun 2022 terjadi bencana alam yaitu terjadi kekeringan dan banjir yang menyebabkan petani gagal panen dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 6,57% pada tahun 2022 serta adanya biaya-biaya pokok yang harus dikeluarkan petani tanpa adanya pendapatan.

4.1.1.3. Masih Rendahnya Kualitas Manusia

Kemajuan pembangunan daerah sangatlah ditentukan oleh kualitas manusianya. Berdasarkan Data Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wajo pada tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 70.26 berada pada peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di sulawesi selatan, rata-rata pertumbuhan IPM selama kurun waktu 2013/2022 sebesar 0,73 persen, dibawah kabupaten sekitarnya yakni Kabupaten Bone sebesar 0,98 persen dan Kabupaten Soppeng 0,88 persen dalam kurun waktu yang sama, angka IPM Kabupaten Wajo di tahun 2022 masih berada di bawah angka provinsi sebesar 72.82 dan dibawah nasional sebesar 72.91.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian IPM ini adalah nilai harapan lama sekolah (HLS), angka rata-rata lama sekolah (RLS), usia harapan hidup (UHH), dan pengeluaran perkapita. Data Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wajo pada tahun 2022 meningkat 0,15 atau sebesar 13,30 dibanding tahun sebelumnya (2021) dan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Wajo selama sepuluh tahun terakhir bergerak naik secara perlahan dari 12,51 (tahun 2013) menjadi 13,30 (tahun 2022) atau berada pada peringkat 11 dari 24 kabupaten/kota di sulawesi selatan di tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa setiap penduduk di kabupaten wajo yang berusia 7 tahun hanya memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1, Angka UHH Kabupaten Wajo masih berada di bawah Provinsi dan target Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 14,81 pada tahun 2045. Rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah selama kurun waktu 2013/2022 di kabupaten wajo hanya sebesar 0,68 persen, masih tertinggal dari kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Bone (1,03 persen) dan Kabupaten Soppeng (1,62 persen) dalam kurun waktu yang sama.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Wajo mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022 berada di angka 7,16 tahun atau setara sekolah dasar. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan masih tergolong rendah, dan berada pada pada peringkat 11 dari 24 kabupaten/kota se sulawesi selatan di tahun 2022. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di kabupaten wajo hanya bersekolah sampai tingkat menengah pertama, Rata-rata pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah selama kurun waktu 2013/2022 di kabupaten wajo hanya sebesar 1,38 persen, Masih tertinggal dari kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Bone (2,47 persen) dan Kabupaten Soppeng (1,55 persen) dalam kurun waktu yang sama. Angka ini masih sangat jauh dari harapan dan cukup tertinggal dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah dan merupakan *outcome* dari proses pendidikan, dan pada akhirnya dominasi tenaga kerja kebanyakan lulusan sekolah dasar dan menengah terutama pada usia angkatan kerja.

Sedangkan angka Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Wajo selama kurun waktu tahun 2013 - 2022 terjadi trend peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 65.87 tahun di tahun 2013 menjadi 67.82 di tahun 2022 capaian tersebut mendapatkan peringkat ke 19 dari 24 kabupaten /kota di sulawesi selatan di tahun 2022. UHH Kabupaten Wajo meningkat selama sepuluh tahun terakhir namun belum optimal hal tersebut dikarenakan masih dibawah UHH Tingkat Provinsi dan Nasional. UHH Kabupaten Wajo ditargetkan menjadi 80,0 pada tahun 2045 dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu Indonesia Emas 2045. Rata-rata pertumbuhan Usia Harapan Hidup selama kurun waktu 2013/2022 di kabupaten wajo hanya sebesar 0,32 persen, diatas dari kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Bone (0,30 persen) dan Kabupaten Soppeng (0,29 persen) dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan proyeksi penduduk kabupaten wajo tahun 2025-2045 merupakan masa Bonus demografi dengan rasio ketergantungan yang lebih rendah dari 50 persen sebagaimana yang terlihat pada grafik 3.2 , rasio ketergantungan kabupaten wajo di tahun 2045 diprediksi 41,05 persen di bawah target nasional di tahun 2045 yaitu 53,43 persen , namun di tahun 2045 diprediksi usia 65 keatas akan meningkat sebesar 15,78 persen dengan angka rasio ketergantungan sebesar 41,05 persen di tahun 2045 dari total populasi. Sebaliknya usia 0-14 tahun di prediksi akan mengalami penurunan sebesar 7,80 persen dari tahun 2040, atau 13,33 persen dari total populasi penduduk di tahun 2045.

4.1.1.4 Masih Rendahnnya Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang melalui pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum (WEF)* menunjukkan IDSD Kabupaten Wajo pada tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulsel dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengukuran IDSD, dimana skor IDSD Kabupaten Wajo sebesar 3,10, Provinsi Sulsel sebesar 3,35, dan Nasional sebesar 3,26.

Kerangka IDSD 2022 terdiri dari 4 komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Pada komponen lingkungan pendukung terdapat 4 pilar diantaranya, institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan kestabilan ekonomi makro. Pada komponen ini skor pilar institusi Kabupaten Wajo lebih tinggi dari provinsi dan nasional.

Demikian halnya skor pilar kestabilan ekonomi makro sebesar 3,24, yang lebih tinggi dari skor nasional sebesar 3,05 dan lebih rendah dari skor provinsi sebesar 3,61. Sedangkan untuk pilar infrastruktur dan pilar adopsi TIK, skor Kabupaten Wajo lebih rendah dari skor provinsi dan nasional.

Begitu pula dengan Komponen SDM, terdapat 2 pilar yaitu kesehatan dan keterampilan dimana pada komponen ini terdapat kesenjangan pada seluruh pilar terhadap provinsi dan nasional. Selanjutnya pada aspek pasar, terdapat 4 pilar yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Skor Kabupaten Wajo pada pilar pasar produk sebesar 3,55, lebih tinggi dibandingkan dengan skor provinsi sebesar 2,70 dan skor nasional sebesar 2,68. Adapun skor Kabupaten Wajo pada pilar sistem keuangan sebesar 5,00 sedangkan skor provinsi sebesar 3,14 dan skor nasional sebesar 2,66.

Komponen Inovasi terdapat 2 pilar yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Pada pilar dinamisme bisnis memperoleh nilai yang sama dengan provinsi dan nasional namun pada pilar kapabilitas inovasi tertinggal jauh dengan nilai 1,27 sedangkan provinsi 3,48 dan nasional 2,62.

4.1.1.5 Masih Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca

Menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan skala besar dan tingginya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan tingkat pencemaran yang tinggi. Pencemaran air, udara, tanah, dan pesisir/laut terus terjadi karena tekanan lingkungan meningkat lebih cepat dibandingkan upaya pencegahan dan pengendaliannya. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang paling sering terjadi.

Pemerintah Kabupaten Wajo berupaya mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Namun eksploitasi lingkungan yang kerap terjadi secara tidak terkendali dan dampak emisi GRK masih menjadi isu di daerah sehingga masih perlu peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan terhadap lingkungan menuju *net zero emission* dimasa yang akan datang.

Penanganan perubahan iklim dan bencana telah menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan nasional. Emisi Gas Rumah Kaca di Wajo pada tahun 2021 mencapai angka 68,44% dan Sasaran Visi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menurunkan intensitas emisi

GRK menuju net zero. Tingkat penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) ditargetkan mencapai 93.5 persen.

4.1.1.6 Masih Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan

Kualitas kesehatan penduduk yang belum optimal diindikasikan oleh rendahnya Usia Harapan Hidup, tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Wajo, prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional dan provinsi, dan meningkatnya kasus tuberculosis dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan oleh Upaya promotif dan preventif yang belum optimal dilakukan, Belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, khususnya untuk pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan. Begitupun sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawat-daruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum menjangkau seluruh keluarga. Penerapan pola hidup sehat belum menjadi sebuah kesadaran umum di masyarakat, dan pada saat yang sama pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dua belas urusan kesehatan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diwujudkan bagi masyarakat.

4.1.1.7 Masih Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan lanjutan yang berkualitas belum merata. Masih nampak kesenjangan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, serta antara daerah daratan dan daerah kepulauan. Kondisi ini ditandai, antara lain dengan capaian RLS yang masih di bawah nasional, APM SMP/sederajat yang masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang rendah juga ditandai dengan capaian rerata kompetensi Literasi dan Numerasi yang masih rendah, serta digambarkan pada rendahnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ini, dimana secara umum disebabkan oleh tingkat pemenuhan SPM urusan pendidikan yang masih rendah dan tidak merata pada seluruh daerah Kabupaten Wajo. Belum

meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun ke atas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standar kompetensi antara perdesaan dan perkotaan. Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara masyarakat perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan, serta antara golongan kaya dengan masyarakat miskin dan kurang mampu.

4.1.1.8 Perlindungan Sosial yang Adaptif Belum Diterapkan Secara Menyeluruh

Perlindungan sosial yang adaptif diperlukan untuk menyangga penurunan kehidupan masyarakat akibat dampak dari berbagai krisis, guncangan atau perubahan siklus kehidupan yang terjadi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan sosial.

Penerapan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) di Kabupaten Wajo saat ini masih tergolong rendah. Terkendala oleh sejumlah faktor seperti belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memerlukan perhatian khusus; peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat rasio ketergantungan penduduk meningkat; belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor berbasis lahan yang belum optimal dilakukan proses peningkatan nilai tambah dan pengembangan kualitas SDM; pengembangan sektor jasa dan industri yang masih bertumpu di perkotaan; ketidaksetaraan dalam akses pembiayaan dan sumberdaya antara perdesaan dan perkotaan; rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal; serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan

informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.

4.1.1.9 Masih Rendahnya Penerapan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Produktivitas ekonomi yang masih tergolong rendah di Kabupaten Wajo ditandai dengan PDRB per kapita yang lebih rendah dari nasional dan provinsi. Rendahnya produktivitas ekonomi ini merupakan salah satu dampak dari penerapan IPTEK dan inovasi yang belum maksimal dalam pengelolaan SDA yang melimpah di Kabupaten Wajo. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat orientasi penyelenggaraan pendidikan yang menunjang kompetensi untuk penerapan IPTEKIN belum menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan lanjutan dan tinggi di Kabupaten Wajo. Hal ini diindikasikan dengan belum berkembangnya penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berorientasi penerapan IPTEKIN untuk pengelolaan SDA guna peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Kalaupun terdapat sejumlah penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi IPTEKIN, belum menjadi prioritas dan cenderung hanya sebagai alternative dan pelengkap penyelenggaraan pendidikan yang bersifat umum dan tidak menjadi unggulan daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonominya.

Rendahnya penerapan IPTEK dan inovasi daerah, baik dalam pelayanan publik maupun dalam kegiatan ekonomi masyarakat ini memang sangat berkorelasi kegiatan ekonomi unggulan yang berkembang pada setiap daerah di Kabupaten Wajo. Industri pengolahan yang belum berkembang secara merata, pertumbuhan industri kreatif dan rantai pasok ekonomi kreatif yang melambat, investasi yang belum merata pada sektorsektor produktif menjadi faktor pendorong masih kurangnya penerapan IPTEKIN dalam kegiatan ekonomi masyarakat pada berbagai daerah. Kondisi ini juga didorong dengan capaian rasio kewirausahaan yang masih rendah, pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif belum menjadi prioritas.

4.1.1.10 Belum Optimalnya Penerapan ekonomi Biru dan Hijau dalam Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang mengedepankan orientasi pertumbuhan mekonomi yang tinggi dengan harapan melalui mekanisme *trickle down effect* untuk terwujudnya pemerataan pembangunan. Cenderung akan mengabaikan pembangunan berkelanjutan dan berdampak pada rendahnya komitmen stakeholder pada penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini dirasakan pada hampir semua daerah, termasuk di Kabupaten Wajo dalam beberapa dekade implementasi pembangunan ekonomi hingga saat ini. Untuk tujuan pembangunan ekonomi daerah berorientasi berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, diperlukan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari keseimbangan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, tetapi memberi dampak penguatan pondasi perekonomian daerah yang kuat, melalui terciptanya pembangunan ekonomi yang mensejahterahkan masyarakat yang disertai risiko kerusakan lingkungan yang rendah. Artinya, komitmen penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau masih belum optimal karena masih tinggi komitmen pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan di Kabupaten Wajo belum menjadi sebuah kesadaran bersama. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya kebutuhan investasi awal untuk penerapan ekonomi hijau dan biru ini, sehingga peningkatan peluang kerja dan investasi hijau, pengembangan produk-produk hijau, pengembangan potensi lokal dan mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) serta mengimplementasikan ekonomi sirkular masih sangat terbatas penerapannya pada pembangunan ekonomi daerah.

4.1.1.11 Masih Terbatasnya Transformasi Digital

Terbatasnya transformasi digital di Kabupaten Wajo berimplikasi pada melemahnya daya saing digital daerah. Hal ini ditandai dengan menurunnya peringkat indeks daya saing digital Kabupaten Wajo hingga tahun 2023, bahkan capaian literasi digital Kabupaten Wajo lebih rendah dari nasional dan provinsi. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan

infrastruktur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan tehnologi digital yang tepat, sehingga masih terdapat sejumlah desa tanpa BTS. Masih rendahnya kemampuan masyarakat Kabupaten Wajo dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

4.1.1.12 Kesenjangan Ekonomi Perkotaan dan Perdessaan Kian Melebar

Dalam perspektif pengembangan wilayah, ekonomi perkotaan dan perdesaan terintegrasi secara fungsional dalam kaitan lapangan usaha primer, sekunder dan tersier (jasa-jasa). Berkembangnya sektor industri dan jasa di perkotaan sejatinya akan mampu menarik pertumbuhan sektor perdesaan dalam penyediaan bahan baku dan dukungan input produksi lainnya. Begitupun sebaliknya, berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan akan mendorong pengembangan industri pengolahan dan jasa layanan di perkotaan. Keterkaitan fungsional ekonomi perkotaan dan perdesaan tersebut kurang berjalan efektif, kalau tidak ingin dikatakan justeru menimbulkan gap yang semakin melebar. Hal ini dikarenakan belum berkembangnya kegiatan ekonomi agribisnis, agroindustri, agrowisata yang belum menjadi fokus perhatian dan prioritas pembangunan ekonomi daerah saat ini. Sumber utama pendapatan masyarakat belum bertumpu pada sumber kegiatan agribisnis, agroindustri, agrowisata sehingga belum tumbuh pengembangan ekosistem agropolitan yang mampu mengurangi gap kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan. Kawasan perdesaan belum mampu menjadi *hinterland* bagi tumbuh dan berkembangnya *core activity* pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan. Sejatinya perdesaan dan perkotaan saling mendukung, bersifat interdependensi/saling membutuhkan, dimana hinterland mengembangkan usaha budidaya (*on farm*), sementara perkotaan menyediakan fasilitas jasa pendukungnya seperti modal, sarana/prasarana, pemasaran, dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih lebar.

4.1.1.13 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Jika merunut pada Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wajo tahun 2022 yaitu sebesar 2,86 dimana itu jauh berada di bawah nilai Indeks Pelayanan Publik provinsi yaitu sebesar 4,34 di tahun 2022. Hal ini juga terjadi di beberapa tahun sebelumnya dimana nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Wajo berfluktuatif bahkan cenderung menurun yaitu 3,11 di tahun 2019; 2,87 di tahun 2020 dan 3,00 di tahun 2021 yang mana jika di rata-ratakan masih jauh dibawah nilai Indeks Pelayanan Publik Provinsi sehingga bisa disimpulkan bahwa belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo. Adapun beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor kualitas aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Adapun target Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2045 yaitu sebesar 5,00 sehingga masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam selalu memperbaiki kualitas pelayanan publik, mengingat tren kualitas pelayanan publik cenderung menurun dan berfluktuatif.

Dalam penguatan reformasi birokrasi dalam rangka memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Perbaikan birokrasi diharapkan mampu mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Organisasi perangkat daerah masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Untuk data Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Wajo berada pada angka 63,78 di tahun 2022.

Permasalahan umum yang terjadi di Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan adalah masih kentalnya intervensi politik di dalam birokrasi dan lemahnya kemampuan ASN dalam menyikapi hal tersebut. Disamping itu posisi kepala daerah memang juga selaku pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi dan pemberhentian ASN.

Dalam sistem pemerintahan juga sangat dibutuhkan inovasi-inovasi yang membangun daerah. Dari data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten masih rendah dan menunjukkan tren penurunan peringkat dari tahun ke tahun. Pada data peringkat indeks inovasi Kabupaten berada pada peringkat 70 pada tahun 2019 dan turun pada tahun 2020 menjadi 216. Tahun 2021 turun lagi menjadi peringkat 240 dan terakhir tahun 2022 pada peringkat 252. Penyebab rendahnya indeks inovasi daerah diantaranya masih rendahnya implementasi inovasi yang ada baik oleh masyarakat dan pemerintah sendiri, masih kurangnya kuantitas dan kualitas manusianya (Peneliti, Perekayasa), minimnya sarana dan prasarana inovasi teknologi serta koordinasi antar unsur-unsur sistem inovasi yang belum terjalin. Adapun bidang yang paling membutuhkan sentuhan inovasi di Kabupaten Wajo diantaranya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Transformasi Ekonomi dan Inovasi Pelayanan publik.

4.1.1.14 Masih Rendahnya Stabilitas dan Ketenteraman Umum

Kualitas hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi yang belum berjalan dengan baik. Indikasinya di Kabupaten Wajo, angka kriminalitas belum cukup menggambarkan kondisi yang aman dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; ketidaksetaraan akses ke hukum di masyarakat terutamanya di daerah-daerah terpencil. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan yang sewenang-wenang, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, konflik dan ketidakstabilan politik, teknologi keamanan siber masih kurang, tingkat pendidikan, kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas, akses terhadap layanan kesehatan mental masih terbatas; peredaran narkoba dan sejumlah kejahatan psikotropika lainnya yang belum terselesaikan. Berbagai aspek penegakan hukum negara, daerah dan bahkan sosial yang tidak konsisten dan tidak tuntas ini mendorong

masih besarnya tingkat kerawanan sosial yang menyebabkan terganggunya ketentraman, dan ketertiban umum masih cukup tinggi pada sejumlah daerah.

Stabilitas dan ketentraman umum dapat menjadi fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Stabilitas dan ketentraman yang stabil dan tentram tentu akan mengundang pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan membentuk iklim bisnis yang kondusif.

4.1.1.15 Ekonomi Makro Daerah yang Tidak Stabil

Ketergantungan perekonomian daerah pada faktor eksternal akan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian daerah dalam jangka panjang, setidaknya kondisi ini sangat terasa di Kabupaten Wajo dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakstabilan ekonomi makro didorong oleh faktor fiskal dan moneter, salah satunnya ataupun kedua-duanya secara simultan. Meskipun demikian dalam konteks pembangunan daerah, ketidakstabilan ekonomi makro akan lebih dominan faktor dari sisi fiskal, karena dari perspektif itulah pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung. Pada aspek fiskal, stabilitas ekonomi makro Kabupaten Wajo yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas dalam penyelenggaraan pembangunan. Kapasitas fiskal yang rendah akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan kondisi makro ekonomi daerah.

Ketergantungan fiskal daerah yang tinggi dan kurangnya keleluasaan fiskal daerah berdampak kurang efektifnya pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan makro ekonomi daerah akibat goncangan eksternal. Dalam hal perkembangan harga-harga umum, Kabupaten Wajo masih mencatat tingkat inflasi yang lebih tinggi dari provinsi dan nasional, mengindikasikan ketergantungan ekonomi pada faktor eksternal masih cukup tinggi pada sejumlah daerah di Kabupaten Wajo. Hal ini terjadi dan berdampak timbulnya *high cost economy* mulai dari produksi, distribusi dan konsumsinya. Biaya input yang meningkat akan berdampak pada penurunan produksi, serta biaya transportasi dan logistik yang tinggi akan berdampak pada berlanjutnya tekanan inflasi, sehingga dapat berdampak ketidakstabilan makro ekonomi daerah dalam jangka Panjang.

4.1.1.16 Sinergitas dan Kerjasama Antar Daerah Tidak Beerjalan Efektif

Kerangka pengembangan wilayah belum sepenuhnya diterapkan sehingga tidak berjalan efektif hingga saat ini. Kerjasama wilayah substansial (berbasis komoditas) dan kawasan (berbasis letak geografis) tidak berjalan dengan baik, dan banyak melahirkan ketimpangan antar wilayah, baik substansial maupun kawasan. Kesenjangan pembangunan antara kawasan di daerah Kabupaten Wajo, pada umumnya ditandai dengan kesenjangan infrastruktur wilayah, diantaranya kemantapan jalan yang ditunjukkan dengan kemantapan jalan nasional yang masih rendah, apalagi kemantapan jalan-jalan menunjukkan capaian yang lebih rendah lagi. Konektivitas wilayah menjadi hambatan utama sehingga sinergitas dan kerjasama wilayah tidak berjalan efektif. Saat ini kita tidak dapat menutup mata masih terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Wajo. Pemerintah Kabupaten Wajo berupaya mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan skema kerja sama daerah baik berupa kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela.

4.1.1.17 Kesadaran Moderasi Beragama dan Berkebudayaan Maju Masih Lemah

Kerukunan umat beragama mengalami pasang surut. Kurang optimalnya dialog antar tata nilai yang berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab yang penting untuk menjadi perhatian utama.

Sejalan dengan itu, pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wajo juga belum berjalan dengan optimal. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Wajo, yaitu (1) Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif; (2) Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya; (3) Melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga; (4) Lemahnya koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; (4) Lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan

kebudayaan dan Cagar Budaya; serta (5) Belum tersedianya informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

4.1.1.18 Kualitas Ketahanan keluarga dan Kesetaraan Gender yang Masih Lemah

Menurunnya kualitas ketahanan keluarga ditandai oleh menurunnya kualitas ketahanan sosial psikologi keluarga; kualitas ketahanan sosial budaya keluarga masih di bawah nasional, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan relatif kecil penurunannya dari tahun ke tahun, semakin menurunnya persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya melakukan kegiatan keagamaan, dan persentase rumah tangga perkawinan anak yang tinggi, lebih tinggi dari capaian nasional.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, meliputi: (1) Belum terbangunnya upaya sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; (2) Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana dan jenis layanannya; serta (3) Kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Salah satu fondasi dalam mewujudkan kualitas ketahanan keluarga adalah tercapainya kesetaraan gender. Hal ini penting, mengingat kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat untuk masyarakat, sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Terdapat tiga dimensi penyebab ketimpangan ini, dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi keadaan geografis suatu wilayah terutama pada daerah terpencil yang mengakibatkan akses layanan kesehatan terbatas, biaya persalinan yang tinggi dan masyarakat miskin sebagian belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Rendahnya akses masyarakat di kepulauan dan perdesaan terhadap layanan kesehatan yang mudah

dijangkau dan berkualitas. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak mendukung kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir, dan ketersediaan SDM layanan kesehatan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas.

4.1.1.19 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal di Kabupaten Wajo. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh: (1) Lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak; (2) Belum efektifnya peran bimbingan dan pengawasan terhadap perwujudan Kabupaten Layak Anak; (3) Permasalahan anak belum dianggap sebagai urusan lintas sektor sehingga efektivitas sistem perlindungan anak sebagai sebuah ekosistem menjadi lemah; (4) Belum efektifnya (kapasitas dan kuantifikasi) layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah; (5) Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, pengembangan dan pelembagaan pengasuhan dan perawatan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak dan meningkatkan kerentanan anak menjadi korban perlakuan salah; serta (6) Belum optimalnya peningkatan kualitas anak dan pemuda termasuk penyandang disabilitas, yang dapat membentuk resiliensi, meningkatkan kompetensi dan daya saing anak dan pemuda, dan mampu berkiprah dalam kancah nasional maupun internasional, serta menghindarkan anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

4.1.1.20 Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam (air, tanah, udara) dengan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan permasalahan seperti sampah dan limbah

dimana permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah dan limbah seperti sekarang ini tidak hanya menjadi permasalahan utama di daerah perkotaan, melainkan di daerah-daerah kabupaten khususnya Kabupaten Wajo. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan 3 indikator diantaranya indeks lingkungan hidup, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R.

Merunut data indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Wajo yang cenderung fluktuatif yaitu 57,8 di tahun 2017; 61,32 di tahun 2018; 55.49 di tahun 2019; 60,93 di tahun 2020; 64,34 di tahun 2021 dan 62,58 di tahun 2022 yang mana jika dirata-ratakan masih jauh dibawah nilai indeks Provinsi yang sebesar 73,72 dan nasional sebesar 72,42 sehingga bisa disimpulkan bahwa belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Wajo. Berdasarkan target nasional untuk kualitas lingkungan hidup kabupaten Wajo menargetkan minimal sebesar 3,7 poin. Adapun beberapa faktor penyebab yaitu masih rendahnya kualitas air yang disebabkan kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat tentang pembuangan limbah atau sampah pada sungai dan di danau tempe yang selama ini menjadi sumber air utama untuk dikonsumsi masyarakat. Serta penebangan hutan untuk dialih fungsikan sebagai perumahan penduduk dimana pada prosesnya beberapa tidak memperhatikan optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Data sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Namun tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis hingga tahun 2022 yaitu hanya 1,57% sampah yang terkurangi. Capaian tersebut masih sangat jauh dari target mengingat target pengolahan dan daur ulang pada tahun 2045 adalah 35%. Capaian Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Wajo dari tahun 2014 hingga tahun 2022 mengalami tren peningkatan. Di tahun 2014 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 77,79% dan di tahun 2022 menjadi 91,20%. Secara rata-rata persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Wajo sudah memenuhi target persentase nasional namun masih di bawah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masih perlu pengoptimalan.

Selanjutnya, tingginya dampak negatif yang terjadi di danau tempe disebabkan belum mempertimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta kurangnya pengawasan kesesuaian terhadap RTRW terutama aspek penyelenggaraan penataan ruang dan aspek pelaksanaan penataan ruang.

4.1.1.21 Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di indikasikan oleh belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Menurunnya ketahanan energi disebabkan belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industri dan rumah tangga; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil. Penurunan ketahanan air disebabkan oleh terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman. Permasalahan terkait menurunnya ketahanan pangan disebabkan masih rendahnya akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas. Masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; serta kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan.

4.1.1.22 Masih Tingginya Risiko Bencana dan Masih Rendahnya Mitigasi Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Wajo yang berada pada kategori tinggi merupakan anccaman yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Wajo. Mengingat Kab. Wajo berada pada Sesar Walanae yang berpotensi mengakibatkan bencana seperti gempa,

longsor, likuifaksi, dan juga mampu mempengaruhi struktur dan pergerakan tanah hal tersebut berdampak pada instalasi pipa dan kabel dibawah tanah yang dapat berpotensi kebakaran lahan atau hutan. Minimnya kualitas mitigasi bencana dalam jangka panjang mampu memberikan dampak kerusakan dan kerugian yang besar.

Adapun bentuk mitigasi yang masih minim diantaranya adalah infrastruktur peringatan dan evakuasi, pendidikan mitigasi bencana kepada masyarakat terkhusus yang berada di daerah jalur sesar, serta pemantauan prakiraan cuaca dan pergerakan aktivitas patahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai perumusan permasalahan dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Rendahnya Pendapatan Masyarakat	masih rendahnya penciptaan iklim investasi dan stabilitas ekonomi makro daerah
		Belum optimalnya produksi ikan dan non ikan yang berkelanjutan
	Angka Kemiskinan dan Ketimpangan yang masih tinggi	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan
	Kesenjangan Ekonomi Perkotaan dan Perdessaan Kian Melebar	Masih rendahnya usaha ekonomi pedesaan
	Ekonomi Makro Daerah yang Tidak Stabil	Masih lemahnya optimalisasi fungsi ekonomi Danau Tempe, produksi ikan dan non ikan yang berkelanjutan
		Masih rendahnya pengelolaan hilirisasi SDA dan Industri Halal
Belum Optimalnya peningkatan daya saing daerah	Masih Rendahnnya Daya Saing Daerah	Belum optimalnya peningkatan pembangunan infrastruktur

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Masih kurangnya Pemenuhan fondasi persiapan pembangunan wilayah yang inklusif dan terintegrasi antar pusat-pusat produksi komoditas daerah
		Belum terintegrasinya pusat-pusat produksi komoditas daerah
		Masih rendahnya dukungan pengelolaan pelabuhan siwa sebagai koridor utama untuk rantai pasok domestik
	Masih Terbatasnya Transformasi Digital	Masih rendahnya teknologi pemanfaatan air danau tempe dan air teluk bone untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat
		masih kurangnya pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
	Masih Rendahnya Penerapan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat	Masih lemahnya penanganan BUMD dan UMKM dalam pengelolaan produk unggulan daerah untuk mendukung hilirisasi SDA dan Industri Halal yang diiringi dengan peningkatan produktifitas tenaga kerja berbasis riset dan inovasi
		masih rendahnya produktifitas tenaga kerja berbasis riset dan inovasi
Belum optimalnya kualitas hidup manusia dan kehidupan manusia	Masih Rendahnya Kualitas Manusia	masih rendahnya Pemenuhan kualitas SDM masyarakat yang unggul
	Masih Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan	Masih rendahnya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	masih kurangnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat yang maju
	Perlindungan Sosial yang Adaptif Belum Diterapkan Secara Menyeluruh	Masih rendahnya Pemenuhan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk penuntasan kemiskinan
	Masih Rendahnya Stabilitas dan Ketenteraman Umum	Belum optimalnya pengendalian kondisi keamanan dan ketertiban daerah
		Masih lemahnya pengendalian kondisi keamanan dan ketertiban untuk penciptaan iklim investasi dan stabilitas ekonomi makro daerah
Belum optimalnya penerapan prinsip kepemerintahan yang baik	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi serta mematuhi kerangka hukum tata kelola domain publik
		belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi tata kelola domain publik
		Belum optomalnya pelaksanaan sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah serta menduduk pencapaian sasaran prioritas nasional
		Belum optimalnya pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimanlnya penanganan kualitas Lingkungan Hidup ;	Masih Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca	Masih rendahnya dukungan transisi pembangunan infrastruktur rendah karbon
	Belum Optimalnya Penerapan ekonomi Biru dan Hijau dalam Pembangunan	Masih lemahnya optimalisasi pengelolaan usaha ekonomi pedesaan berbasis ekonomi biru dan energi baru terbarukan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.	Belum optimalnya ketahanan energi, air, pangan, dan ketahanan bencana secara berkelanjutan
		Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan secara berkelanjutan

4.1.2 Perumusan Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori.

Melihat pada rumusan permasalahan yang telah dianalisis berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebanyak 6 (enam) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan

pembangunan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut.

4.1.2.1.1 Pendidikan

Permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Rendahnya nilai literasinya.
2. Nilai Numerasi belum mencapai standar.
3. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah.
4. Rendahnya Angka Partisipas Sekolah (APS) Umur 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang mengeyam Pendidikan Kesetaraan.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah :

1. Kecukupan formasi Guru ASN untuk sekolah yang diselenggaran oleh Negara.
2. Indeks Distribusi Guru yang masih rendah.
3. Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas.
4. Kelengkapan sarana dan prasarana yang belum sesuai SNP.
5. Masih terdapat Guru yang belum bersertifikat pendidik.
6. Rendahnya Kualitas Pembelajaran.
7. Rendahnya capaian Pembelajaran yang membangun kemampuan Fondasi Anak.
8. Kesadaran Masyarakat masih rendah akan pentingnya Pendidikan.
9. Kurangnya biaya personal peserta didik.
10. Daya Tampung Satuan Pendidikan belum sebanding dengan peserta didik.

4.1.2.1.2 Kesehatan

Permasalahan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Masih adanya kasus gizi buruk.
3. Prevalensi stunting yang masih tinggi.
4. Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular.
5. Kasus gangguan jiwa yang semakin tinggi.
6. Distribusi SDM Kesehatan yang belum merata dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah :

1. Minimnya sarana dan prasana serta perbekalan kesehatan (obat dan BHP).
2. Kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang.
3. Sanitasi yang masih buruk.
4. Perilaku PHBS yang masih rendah.
5. Jaminan kesehatan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
6. Pernikanahan dini dan melahirkan pada usia lanjut.
7. Minimnya sarana dan prasana pencegahan penyakit.
8. Lemahnya koordinasi dan partisipasi setiap stakeholder.
9. Minimnya tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter.
10. Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan yang maksimal.
11. Kurangnya kebijakan yang mendukung pengembangan SDM Kesehatan.
12. Kengganan NAKES untuk tinggal dan menetap dilokasi penempatan.

4.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kemantapan ruas jalan kabupaten.
2. Adanya jembatan yang tidak berfungsi secara optimal.
3. Belum optimalnya sistem drainase perkotaan khususnya keberfungsian drainase primer.
4. Belum terpenuhinya akses air minum yang layak dan aman.
5. Belum terpenuhinya akses air limbah domestik yang layak dan aman.
6. Kurangnya tenaga terampil bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.
7. Pengelolaan bangunan yang belum optimal.
8. Terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang.
9. Belum optimalnya cakupan layanan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi.

4.1.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kawasan permukiman yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
2. Masih tingginya rumah tidak layak huni.

3. Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani.
4. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana PSU pada kawasan perumahan.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana PSU pada kawasan permukiman.

4.1.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban yang dipengaruhi oleh :
   - SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan.
   - Insentif yang masih dibawah standar dan tidak merata.
   - Kurang maksimalnya pelatihan untuk pananganan bancana, kegiatan sosial, ketertiban dan ketentraman dan kegiatan PEMILU.
   - Jumlah petugas linmas yang belum sebanding dengan luas wilayah kerja.
   - Masih adanya pelanggaran K3 yang belum terselesaikan.
   - Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi PERDA.
   - Masih terbatasnya aparatur Polisi Pamong Praja yang mempunyai.
   - Masih kurangnya jumlah aparatur SATPOL PP dan tenaga PPNS.
   - Koordinasi antar instansi yang masih lemah.
   - Kurangnya sarana dan prasarana bagi petugas SATPOL PP
2. Tingginya tingkat kebakaran yang tidak bisa tertangani sesuai respon time 15 menit sudah tiba dilokasi yang dipengaruhi oleh :
   - Kurangnya posko Pemadam Kabakaran (baru ada 6 Posko dari 14 Kecamatan).
   - SDM yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya.
   - Relawan pemadam kebakaran belum merata di tiap kecamatan.
   - Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
   - Sarana dan prasanana yang kurang memadai.
   - Akses wilayah yang sulit untuk dijangkau.
   - Masih ada wilayah yang belum memiliki sarana akses pengisian ulang air.
   - Kurangnya personil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan

3. Masih tingginya resiko bencana yang dipengaruhi oleh :
   - Mitigasi bencana dan perubahan iklim yang belum maksimal.
   - Luasnya daerah rawan bencana.
   - Kurangnya personil yang terlatih dan kompeten.
   - Sarana dan prasarana yang kurang dan belum memadai.
   - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.
   - Masih terjadinya perubahan dan alih fungsi lahan.
   - Lemahnya koordinasi antar instansi/lembaga dan stakeholder.

4.1.2.1.6 Sosial

Permasalahan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja puskesos menangani data masyarakat penerima Bansos.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.
3. Tidak adanya data wahana kesejahteraan sosial.
4. Kualitas SDM yang masih rendah.

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebanyak 18 (delapan belas) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut.

4.1.2.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum harmonisnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di perusahaan
2. Masih rendahnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
3. Masih Rendahnya pemahaman pekerja dan pengusaha terkait Undang-Undang ketenaga kerjaan
4. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja
5. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja berbagai sektor per kab. Kota

6. Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi.
7. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (Enterprenersik).

4.1.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik.
2. Masih rendahnya minat dan kualitas Perempuan di bidang politik.
3. Masih terjadi KDRT yang belum terlapor.
4. Tidak tersedia data pekerja anak.
5. Masih ada pekerja anak.
6. Masih adanya kasus KtA/KtP belum terlapor.
7. Tidak tersedia data pekerja perempuan.
8. Belum optimalnya penanganan kasus di unit pelayanan.
9. Masih adanya perkawinan usia anak.
10. Data layanan rehabilitasi sosial tidak ada di unit pelayanan terpadu.

4.1.2.2.3 Pangan

Permasalahan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Pengelolaan aspek-aspek ketahanan pangan yang belum optimal.
2. Belum terpenuhinya target cadangan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Belum idealnya pola pangan harapan.
4. Masih adanya daerah yang rawan pangan.
5. Kurangnya stok pangan untuk 11 pangan strategis.
6. Kurangnya tenaga teknis dibidang pangan.

4.1.2.2.4 Pertanahan

Permasalahan pembangunan bidang pertanahan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya persetifikatan tanah milik pemerintah daerah.
2. Inventarisasi tanah milik pemerintah belum optimal.
3. Koordinasi antar instansi dalam penerbitan sertifikat yang belum terjalin baik.

4. Masih terjadinya konflik pertanahan.
5. Alas hak yang belum jelas.
6. Kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang sudah inkrah masih rendah.
7. Terbatasnya pengadaan tanah untuk pembangunan/kepentingan umum.
8. Ketidaksesuaian nilai apraisal dengan nilai jual yang diinginkan.

4.1.2.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal.
2. Belum berfungsinya laboratorium lingkungan.
3. SDM yang berkompeten belum tersedia.
4. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
5. Lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi .
6. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan.
7. Tingginya kejadian penambangan liar.
8. Berkurangnya tutupan lahan dan luasan keanekaragaman hayati.
9. Belum tersedianya dokumen RPPLH.
10. Pengelolaan persampahan yang belum optimal.
11. Belum berfungsinya TPS 3R.
12. Tingkat partisipasi dan koordinasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah belum optimal.
13. Rendahnya tingkat pelayanan persampahan di 14 Kecamatan.
14. Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R masih rendah.
15. Sarana dan prasarana persampahan masih kurang memadai dan tidak layak.
16. Rendahnya tingkat pengetahuan petugas persampahan.
17. Lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi .
18. Kapasitas TPA sudah over kapasitas.

4.1.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelayanan pengurusan KTP.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan.
3. Kurang optimalnya pelayanan pengurusan akte kelahiran.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib ad. ministrasi kependudukan.
5. Ketergantungan pada jaringan sistem informasi administrasi kependudukan.
6. Banyaknya masyarakat yang Kurang melakukan perekaman KTP elektronik.
7. Kurang optimalnya pelayanan pengurusan KTP..
8. Kurang optimalnya pelayanan penerbitan akta kelahiran.

4.1.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Rendahnya jumlah desa berkategori desa mandiri.
2. Masih adanya desa yang belum memiliki kantor tetap.
3. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).
4. Data tentang kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum yang belum valid.
5. Data tentang jumlah kelompok binaan PKK yang belum valid.
6. Koordinasi antar instansi yang masih lemah.
7. Masih kurangnya kinerja kader LSM dalam pembangunan.
8. Masih banyaknya lembaga masyarakat belum memahami tentang konsep pemberdayaan masyarakat pada kegiatan LPM.
9. Masih kurangnya kinerja kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pembangunan.
10. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya swadaya masyarakat.
11. Kurangnya program pemberdayaan yang inovatif

4.1.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
2. Kurang optimalnya penerapaan KB di masyarkat.
3. Masih tingginya jumlah kelahiran.
4. Masih rendahnya peran stakeholders terhadap program pembangunan daerah melalui Kampung KB.
5. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk.
6. Data tentang Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk yang Kurang valid.
7. Data tentang Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang Kurang valid.
8. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK.
9. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga.
10. Masih kurangnya sosialisasi tentang program KB.

4.1.2.2.9 Perhubungan

Permasalahan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Infrastruktur perhubungan belum memadai dan terkelola dengan baik.
2. Kualitas jalanan Kab. Wajo belum memadai.
3. Kesebrawutan angkutan umum.
4. ketersediaan sarana pendukung jalanan seperti rambu lalu lintas,traficc ligth.
5. Kesadaran masyarakat berlalu lintas masih rendah.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya mobil angkutan.
7. Infrastruktur perhubungan belum memadai dan terkelola dengan baik.
8. Adanya perlambatan pelayanan masyarakat khususnya mobil masuk ke pelabuhan.

9. Bendungan/tanggul dermaga bendungan pelabuhan yang sudah jebol dan kerap terjadi banjir.
10. Adanya pengurangan drainase yg melewati jembatan dermaga
11. Tidak adanya pagar prembatas di wilayah pelabuhan
12. Belum optimalnya pengamanan sistem elektronik
13. Belum adanya papan Dermaga/Pelabuhan
14. Belum optimalnya SDM di bidang UPTD
15. Belum adanya SDM kab. Wajo yang bersertifikasi tentang penilai analisis dampak lalu lintas.
16. Belum optimalnya pemanfaatan Terminal Sawerigading sebagai pusat angkutan penumpang.
17. Pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum optimal.
18. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya uji kelaikan teknis kendaraan angkutan umum dan angkutan barang masih rendah.

4.1.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan transformasi digital.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraaan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyrakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi terintegrasi.
3. Tingginya tuntutan terhadap pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi .
4. Tingginya tuntutan terhadap ketersediaan data center dan pusat satu data yang terintegrasi.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi digital.
6. Belum optimalnya budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital.

4.1.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan bidang kopreasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kurangnya koperasi yang berkualifikasi sehat.
2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
3. SDM Pengurus yang masih rendah sehingga laporan tidak bisa dibuat.
4. Pembinaan terhadap koperasi yang masih belum optimal.
5. Kurangnya tenaga pengawas koperasi..
6. Adanya koperasi yang tidak aktif ditandai kepengurusan yang tidak jelas.
7. Penguatan dan Daya Saing Koperasi yang belum optimal
8. Rendahnya pengetahuan SDM pelaku usaha.
9. Pertumbuhan UMKM yang belum maksimal.
10. Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku UMKM dan Pelaku IKM yang belum optimal.
11. Belum optimalnya pengelolaan UMKM.
12. Legalitas perijinan yang maksimal.
13. Kurangnya tenaga pembina untuk UMKM.
14. Kurangnya respon pelaku usaha untuk pengembangan usahanya.
15. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi produk usaha

4.1.2.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Kesadaran Pelaku Usaha Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Menurunnya pendapatan pelaku usaha sehingga tidak menyampaikan pelaporan kegiatan usahanya.
3. Pelaku usaha di tingkat cabang tidak diberikan akses dari pusat.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam melporkan kegiatan usahanya.
5. Pelaku usaha yg telah melaporkan LKPM tidak terbaca di sistem.
6. Adanya pelaku usaha yang mangkrak sehingga belum melakukan pelaporan LKPM.

7. Pengaruh iklim investasi yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi.
8. Kurangnya minat investor PMDN/PMA untuk berinvestasi.
9. Tidak adanya regulasi yang mendukung para investor.
10. Tidak adanya lahan clear dan clean (status lahan tidak jelas).
11. SDM yang kurang memadai.
12. Infrastruktur yang kurang memadai.
13. Belum tersedianya RDTR.
14. Kurang tersedianya data peluang investasi.
15. Terbatasnya pelayanan sistem pelayanan investasi.

4.1.2.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kurangnya kader dan wirausahawan muda.
2. Masih kurangnya kinerja kader pemuda dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya wirausaha dalam usia muda
4. Minimnya prestasi keolahragaan baik ditingkat regional maupun nasional..
5. Belum optimalnya pembinaan olahraga.
6. Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi.
7. Rendahnya regenerasi atlit.
8. Rendahnya prestasi atlit dalam cabang olahraga.
9. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.

4.1.2.2.14 Statistik

Permasalahan pembangunan bidang statistik di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan portal data statistik sektoral.
3. Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data sektoral.
4. Validasi data yang belum dilaksanakan secara optimal
5. Lemahnya koordinasi antar instansi.

4.1.2.2.15 Persandian

Permasalahan pembangunan bidang persandian di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Tinggi risiko kerawanan keamanan informasi.
2. Kapasitas untuk backup data belum optimal.

4.1.2.2.16 Kebudayaan

Permasalahan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih adanya cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya
2. Pendataan yang belum optimal
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya
4. Masih rendahnya SDM pengelola cagar budaya
5. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan
6. Pendataan yang belum optimal
7. Kurangnya kajian akademik tentang pemajuan kebudayaan
8. Keterlibatan masyarakat yang masih kurang
9. Sosialisasi yang belum optimal
10. Kesenian tradisinal belum berkembang baik

4.1.2.2.17 Perpustakaan

Permasalahan pembangunan bidang perpustakaan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Pengelolaan perpustakaan daerah yang belum optimal.
2. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang belu refresentatif.
3. Kurangnya tenaga pustakawan.
4. Status organisasinya yang belum menjadi satuan perangkat daerah.

4.1.2.2.18 Kearsipan

Permasalahan pembangunan bidang kearsipan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Pengelolaan arsip daerah yang masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan Perangkat Daerah menata arsip secara baku.
3. Kurangnya pembinaan pengelolaan arsip secara baku.

4. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip belum ada.
5. Pengarsipan dokumen belum dilakukan secara digitalisasi.
6. Status organisasinya yang belum menjadi satuan perangkat daerah.
7. Kurangnya tenaga arsiparis.

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebanyak 8 (delapan) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang urusan pemerintahan pilihan, sebagai berikut.

4.1.2.3.1 Pariwisata

Permasalahan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Destinasi dan industri pariwisata belum berkembang secara maksimal
2. Daya tarik wisata di kabupaten wajo belum dikembangankan secara maksimal
3. Promosi pariwisata ke luar daerah belum di maksimalkan
4. Belum optimalnya pemasaran wisata
5. Belum berkualitasnya sarana dan prasarana obyek wisata
6. Rendahnya dukungan pihak swasta
7. SDM pelaku pariwisata masih rendah
8. Belum berkembangnya ekonomi kreatif
9. SDM pelaku ekonomi kreatif yang masih terbatas
10. Regulasi yang belum mendukung perkembangan ekonomi kreatif
11. Kurangnya pembinaan yang dilakukan pada sektor ekraf

4.1.2.3.2 Pertanian

Permasalahan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Penurunan produksi peternakan.
2. Belum optimalnya produktifitas pertanian.
3. Kurangnya tatakelola pemasaran hasil pertanian.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah :

1. Kejadian penyakit mulut dan kuku (PMK).
2. Sarana dan prasana yang masih kurang.
3. Tenaga medis dan paramedis veteriner yang masih kurang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan PUSKESWAN di Kecamatan.
5. PUSKESWAN belum menjangkau semua kecamatan.
6. Kejadian penyakit gangguan reproduksi masih tinggi.
7. Sarana dan prasana yang masih kurang.
8. Belum optimalnya penangan serangan OPT.
9. Ketersediaan benih/bibit bersertifikat yang masih kurang.
10. Sistem penyaluran pupuk belum optimal.
11. Tingginya biaya produksi.
12. Tenaga penyuluh pertanian yang masih kurang.
13. Adanya perubahan iklim.
14. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian.
15. Harga yang berfluktuasi.
16. Kebijakan yang tidak berpihak ke petani.
17. Adanya permainan harga ditingkat pedagang.
18. Sistem resi gudang yang belum berjalan.
19. Kemitraaan petani dengan pengusaha belum berjalan.
20. Sistem ijon masih terjadi secara terselubung.
21. Belum adanya RPH dan RPU yang sesuai standar.
22. Belum berfungsinya pasar hewan.

4.1.2.3.4 Perdagangan

Permasalahan pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Wajo, sebagai berikt :

1. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam Daerah.
2. Sarana dan Prasarana Pasar dan Pengelolaan pasar rakyat/tradisional belum optimal.
3. Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakaat tentang produk yangn dapat di ekspor.
5. Rendahnya pembinaan kelompok pedagang / usaha formal.
6. Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum terpenuhi sesuai standar.

7. Belum optimalnya penerapan sitem informasi perdagangan.
8. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap barang beredar.
9. Kurang tenaga pengawas perdagangan.

4.1.2.3.5 Perindustrian

Permasalahan pembangunan bidang perindustrian di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing IKM
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaku IKM
3. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry
4. Masih rendahnya kualitas, desaign dan kemasan produk IKM
5. Legalitas perijinan usaha yang masih rendah
6. SDM pelaku usaha yang masih rendah
7. Keterbatasan modal usaha
8. Peralatan yang masih sederhana

4.1.2.3.6 Transmigrasi

Permasalahan pembangunan bidang transmigrasi di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Lokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai.
2. Belum optimalnya penyelesaian sertifikasi lahan permukiman transmigrasi
3. Tingkat pendapatan warga transmigran belum memadai
4. Belum Maksimal pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM warga transmigran.

4.1.2.3.7 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan.
2. Nilai tambah produk olahan belum optimal dan berdaya saing.
3. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar yang masih rendah.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Selain itu, juga terdapat fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebanyak 5 (lima) urusan. Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan pembangunan tentang funsgi penunjang urusan pemerintahan, sebagai berikut :

4.1.2.4.1 Perencanaan

Permasalahan pembangunan bidang perencanaan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan.
2. Rendahnya kompetensi aparatur perencana.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja.
4. Rendahnya pemahaman bersama terhadap kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.
5. Rendahnya kepatuhan pengusul atau penerima DAK terhadapa tahapan penyusunan perencanaan dokumen pembangunan daerah.
6. Kurangnya masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.
7. Rendahnya pemahaman peserta terhadap tujuan pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD.
8. Rendahnya partisipasi anggota DPRD dalam proses/kegiatan musrenbang.
9. Verifikasi dan validasi data belum dilaksanakan.
10. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum optimal.

4.1.2.4.2 Keuangan

Permasalahan pembangunan bidang keuangan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum tertibnya laporan tentang aset daerah.
2. Masih adanya aset yang belum bersertifikat.
3. Belum maksimalnya pemahaman SDM terkait penyusunan laporan keuangan.
4. Potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Pertumbuhan pendapatan yang masih lambat.
6. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.
7. Kurangnya pemahaman pengelola aset terkait regulasi.
8. Pemanfaatan aset yang belum optimal.
9. Pemeliharaan aset yang kurang memadai.
10. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.
11. Kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas.
12. Inventarisasi dan penilaian aset daerah yang belum komprehensif.
13. Penerapan akuntasi daerah yang belum konsisten.
14. Keterbatasan sumber-sumber PAD.
15. Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum efisien.

4.1.2.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang membatasi tentang belanja pegawai maksimal 30%.
2. Belum tersedianya kebijakan Peta Jabatan.
3. Kurangnya kesadaran pegawai untuk melakukan pengkinian data dalam database pegawai secara mandiri.
4. Penerapan PP 30 Tahun 2019 belum dipedomani dalam penyusunan dan penilaian kinerja.
5. Penerapan PP 94 Tahun 2021 belum dipedomani dalam penegakan disiplin pegawai.
6. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan internal mengenai pengembangan karir, standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi dan talent pool.

7. Lemahnya koordinasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang diikuti dan/atau yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
8. Kurangnya SDM pengelola data kepegawaian .
9. Belum optimalnya penerapan hasil analisa kebutuhan pengembangan kompetensi.
10. Masih adanya pejabat struktural dan fungsional yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan.

4.1.2.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi inovasi daerah.
2. Masih rendahnya kapasitas dan ekosistem inovasi.
3. Belum adanya komitmen untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dalam pembangunan daerah.
4. Minimnya SDM kelitbangan sehingga memerlukan pihak ketiga dalam menyusun produk kelitbangan.
5. Masih terdapat duplikasi fungsi kelitbangan pada perangkat daerah.

4.1.2.4.6 Pengawasan

Permasalahan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
2. Kedisplinan pegawai
3. Kurang tertibnya pengelolaan keuangan dan administrasi pelaksanaan program kegiatan.

4.1.2.5 Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan pembangunan bidang fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Kurang optimalnya sarana dan prasarana aparatur
3. Rendahnya disiplin aparatur

4. Kurang optimalnya fasilitas pindah / purna tugas PNS
5. Kurang optimalnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
6. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
7. Kurang optimalnya peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8. Kurang optimalnya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
9. Kurang optimalnya penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan
10. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
11. Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat
12. Kurang optimalnya peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
13. Kurang optimalnya penataan peraturan perundang-undangan
14. Kurang optimalnya penataan daerah dan penyelesaian tapal batas administrasi antar wilayah
15. Belum tersedianya tentang perancang peraturan perundang-undangan

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik berdampak negatif maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang

lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai faktor eksternal, seringkali pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengelola pengaruh eksternal tersebut, sehingga fokus perhatian pemerintah daerah lebih kepada upaya-upaya mitigasi untuk mencegah dampak negative yang dapat dirasakan atau mengoptimalkan kesempatan dan peluang untuk memperoleh dampak positif yang dapat diterima dalam implementasi pembangunan daerah.

Adapun isu-isu strategis daerah diantaranya :

1. Munculnya kembali kasus folio.
2. Bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan.
4. Degradasi lingkungan dan rendahnya ketahanan bencana.
5. Daya tampung TPA yang sudah over kapasitas.
6. Rendahnya produktifitas dan nilai tambah produk pertanian.
7. Pengelolaan SDA yang belum berorientasi pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau.
8. Belum optimalnya keterkaitan/nexus antara pangan, energi dan air.
9. Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat.
10. Belum optimalnya peran BUMD sebagai agen perubahan.
11. Pemanfaatan fungsi Danau Tempe yang belum optimal.
12. Geopolitik dan Geoekonomi global
13. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
14. Pembangunan IKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN)
15. Hilirisasi sumber daya alam mineral.
16. Perubahan Iklim.

BAB
V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"WAJO MARADEKA"

Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi yakni Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan. Pokok visi ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Tabel 5. 1
Pokok Visi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan
WAJO MARADEKA	Maju	Kondisi dimana terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat Wajo di segala bidang yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kulitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, peningkatan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintahan yang melayani.
	Religius	Kondisi tercipitanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Wajo dan pemerintahan yang berdasar pada nilai-nilai keagaamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika, norma dan adat istidat yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.
	Bermartabat	kondisi dimana pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai kedauatan penuh dalam menjalankan pemerintahannya untuk

Visi	Pokok Visi	Penjelasan
		menjamin masyakat yang sejahtera, tentram dan bahagia.
	Terdepan	Kondisi dimana Kabupaten Wajo memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi lokal unggulan daerah sehingga dapat berkompetisi di tingkat regional dan nasional.
	Berkeadilan	Kondisi dimana terciptanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Wajo yang berbasis pada pengembangan wilayah dan sumber daya lokal unggulan daerah dengan prinsip Tidak Ada Seorangpun Yang Tertinggal (*No One Left Behind).* Prinsip ini mengandung pengertian yang inklusif bahwa siapapun dapat menikmati pembangunan tanpa ada diskriminasi kelas, jenis kelamin dan latar belakang suku dan agama.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi ini untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menetukan jalan yang akan ditempuh untuk mecapai visi.

Misi ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 seperti berikut:

1. **Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif**

   Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspansif tetapi juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkulitas sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi baik antar kelompok dan antar wilayah. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Wajo sehingga hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus kepada: pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan.

2. **Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat**

   Eksistensi pelayanan publik perlu menjadi prioritas dari pemerintah karena hal tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik kualitas pelayanan publik, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Dalam misi ini penyediaan pelayanan publik yang berkulitas oleh Pemerintah Kabupaten Wajo akan berfokus kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya birokrasi untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

3. **Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter**

   Peran masyarakat dalam pembangunan telah mengalami pergeseran, dari sekedar sebagai objek Pembangunan menjadi Subjek Pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka misi ini bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Wajo yang unggul.

   a. Sehat diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas.
   b. Cerdas diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pendidikan yang berkualitas.
   c. Produktif diwujudkan dengan meningkatkan kapasistas dan kompetensi pada simpul-simpul pembangunan daerah yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
   d. Berkarakter diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, nilai kearifan lokal yang religius, santun, toleran, kreatif, jujur dan bertanggung jawab.

4. Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang

Keadilan ekologis dalam arti sempit berfokus pada distribusi dampak buruk dari eksploitasi alam, sedangkan secara luas keadilan ekologis berpusat pada distribusi, baik dampak buruk maupun keuntungan dari manusia bagi alam. Misi ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wajo:

a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. Menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan.
c. Penguatan tata kelola lingkungan hidup, ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air, dan sampah dan ketahanan terhadap bencana alam.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Wajo

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Base Line 2023	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif									
Tujuan 1.1.: Meningkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi berkelanjutan	PDRB per Kapita	63,61							
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,1							
Sasaran-1.1.1. Berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Ekonomi Biru	63,56							
	Indeks Ekonomi Hijau	19,62							
Sasaran-1.1.2. Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif	Persentase wirausaha muda	55,83%							
	Jumlah Usaha Mikro Baru								
Sasaran-1.1.3. Meningkatnya Prestasi Kepemudaan di Berbagai Bidang	Indeks Pembangunan Pemuda								
Tujuan 1.2: Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah berbasis iptekin	Pertumbuhan Ekonomi	1,43							
Sasaran-1.2.1. Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	4,15							
Tujuan 1.3.: Meningkatkan daya saing infrastruktur berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,12	3,37	3,45	3,51	3,57	3,62	3,65	3,74
Sasaran-1.3.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur								
	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	2,31	3,03	3,15	3,32	3,38	3,43	3,51	3,64

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Base Line 2023	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 2: Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat									
Tujuan 2.1.: Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat	Indeks Pelayanan Publik								
Sasaran-2.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	65,06							
	Nilai SAKIP	62,99							
	Indek Desa Membangun	0,7068							
Sasaran-2.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	43,41							
	Indeks SPBE	2,67	2.77	2.77	2.85	2.96	03.05	3.11	3.17
Misi-3: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter									
Tujuan-3.1: Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan	Indeks Modal Manusia								
Sasaran-3.1.1. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	6,73	6, 47	4.,46	4,56	4,46	4,36	4,26	3,26
	Rasio Gini	0,362	0,369	0,360	0,358	0,358	0,357	0,358	0,357
Sasaran-3.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	73,25	73, 47	73, 57	73, 67	73, 77	73, 87	73, 97	74
Sasaran-3.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,31	13, 32	13, 5	13,6	13,7	13,8	13,9	14
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,45	7, 46	7,50	7,51	7,52	7,53	7,54	7,55

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Base Line 2023	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 4: Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang									
Tujuan 4.1.: Menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,71%	57,3	59,3	63,3	64,8	66,8	68,8	70,8
Sasaran-4.1.1. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	100%						
Sasaran-4.1.2. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai kebudayaan	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	21%							
Tujuan 4.2.: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30.374		37	40,76	44,52	48,29	52,05	55,44
Sasaran-4.2.1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,58	64,98						
Sasaran-4.2.2. Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	156,96	141,09						

5.4. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Keselarasan Visi dabn Misi RPJMD Kabupaten Wajo 2025-2029 dengan RPJM Nasional 2025-2029

RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029
VISI	
"WAJO MARADEKA"	"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"
MISI	
1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal.
	PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal.
2. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029
	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
4. Memelihara ketahanan sosial budaya dan keadilan ekologi.	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Wajo 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029

RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029
VISI	
"WAJO MARADEKA"	**"SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER"**
MISI	
1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif	2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas, Merata Dan Berkelanjutan
	4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
2. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat	3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Berintegritas, Adaptif, Dan Produktif
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter	1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, Dan Berdaya Saing

RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029
4. Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang	4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029	RPJPD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2045
VISI	
"WAJO MARADEKA"	**"WAJO DAERAH PERNIAGAAN YANG MAJU DENGAN PERTANIAN MODERN YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN"**
MISI	
1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif	2. Kolaborasi untuk Transformasi Ekonomi
	7. Kolaborasi untuk Pembangunan Kewilayahan yang Inklusif dan Terintegrasi Antar Pusat-Pusat Produksi Komoditas Daerah
	8. Kolaborasi untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
2. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat	3. Kolaborasi untuk Transformasi Tata Kelola
	4. Kolaborasi untuk Keamanan dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter	1. Kolaborasi untuk Transformasi Sosial
4. Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang	5. Kolaborasi untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	6. Kolaborasi untuk Kesinambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah

BAB
VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mecapai tujuan dan sasaran dalm pembangunan daerah tahun 2025-2029 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah perencenaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program prioritas pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan

Rumusan strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemnbangunan daerah dengan melalui pendekatan yang komprehensif yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupate Wajo

Tujuan	Sasaran	Hasil Perumusan Strategi
VISI : Wajo Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan		
Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif		
1.1.: Meningkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi berkelanjutan	1.1.1. Berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mengoptimalkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan infrastruktur bagi sektor-sektor hijau dan biru.
	1.1.2. Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif	Meningkatkan Produktivitas UMKM dengan membuka akses permodalan, perijinan, dan pangsa pasar yang didukung oleh up-skilling dan re-skilling pelaku UMKM
1.2: Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah berbasis iptekin	1.2.1. Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan melalui peningkatan produksi bahan baku, penyiapan infrastruktur dan tenaga kerja terampil dengan membuka peluang investasi dan kemitraan
1.3.: Meningkatkan daya saing infrastruktur berkelanjutan	1.3.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang resiliensi terhadap bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, berkolaborasi dengan pihak swasta dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya serta mendorong kerjasama antar daerah
Misi 2: Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat		
2.1.: Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat	2.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan reformasi birokrasi yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah
	2.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing dengan penguatan regulasi, SDM yang profesional, perluasan infrastruktur TIK, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Tujuan	Sasaran	Hasil Perumusan Strategi
VISI : Wajo Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan		
Misi-3: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter		
3.1: Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam program perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi berbagai sektor dan peningkatan kapasitas petugas layanan
	3.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terlatih dan terdistribusi merata.
	3.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana terstandarisasi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten, serta penguatan pemahaman dan partispasi aktif masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang		
4.1.: Menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju	4.1.1. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, pembinaan, pengembangan kelembagaan dan SDM keagamaan untuk penguatan moderasi beragama
	4.1.2. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai kebudayaan	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan melalui pembinaan, pengembangan kelembagaan, SDM generasi muda dan budaya serta pelestarian seni dan budaya
4.2.: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	4.2.1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan regulasi, kolaborasi pihak swasta, dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	4.2.2. Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatkan ketahanan bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana, dan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalh pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan startegi agar memilih fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaanya. Adapun arah kebbijakan tiap tahun yang perlu dilakukan disajikan dalam keterkaitan strategi pembanhinan dengan arah kebijakan pembangunan jagnka menengah Kabupaten Wajo 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Arah Kebijakan Kabupaten Wajo

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mengoptimalkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan infrastruktur bagi sektor-sektor hijau dan biru.	- Identifikasi potensi daerah untuk pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. - Penguatan regulasi dan kebijakan yang disertai peningkatan kesadaran publik dan pelaku usaha tentang ekonomi hijau dan biru. - Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	-Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi hijau, seperti transportasi rendah emisi dan energi terbarukan. - Peningkatan riset dan inovasi dalam teknologi ekonomi biru - Percepatan transisi menuju ekonomi hijau. - Penerapan kebijakan ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. - Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi hijau dan biru.	- Penguatan mekanisme pembiayaan hijau, seperti dana investasi berkelanjutan. - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis ekosistem. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi hijau dan biru melalui program berbasis komunitas. - Pengembangan ekowisata sebagai sektor unggulan dalam ekonomi hijau.	- Peningkatan daya saing sektor ekonomi hijau dan biru - Penguatan kebijakan ekonomi hijau dan biru yang mendukung produk ramah lingkungan. - Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya alam melalui diversifikasi usaha berkelanjutan. - Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan keberlanjutan ekonomi hijau dan biru.	- Pengembangan sistem pemantauan berbasis AI dan IoT untuk pengelolaan sumber daya alam. - Digitalisasi layanan pemerintah terkait ekonomi hijau dan biru. - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan. - Pengembangan ekosistem startup berbasis teknologi hijau dan biru.	- Evaluasi dampak kebijakan ekonomi hijau dan biru terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. - Penyempurnaan regulasi dan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. - Pengembangan roadmap jangka panjang untuk menjaga kesinambungan ekonomi hijau dan biru.
Meningkatkan Produktivitas UMKM dengan membuka akses permodalan, perijinan, dan pangsa pasar yang didukung oleh up-skilling dan re-skilling pelaku UMKM	- Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM di sektor ekonomi kreatif. - Peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. - Identifikasi potensi industri kreatif unggulan di berbagai daerah. - Penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM kreatif melalui skema kredit mikro dan modal ventura. - Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui	- Pengembangan pusat kreatif (creative hubs) di berbagai daerah untuk mendukung inovasi. - Digitalisasi proses bisnis UMKM dengan peningkatan akses ke e-commerce dan teknologi. - Pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk ruang kerja bersama dan pusat pelatihan. - Implementasi program pelatihan berbasis keterampilan kreatif dan teknologi digital. - Penguatan jejaring dan kolaborasi dengan	- Penguatan branding dan sertifikasi produk kreatif agar kompetitif di pasar internasional. - Pengembangan sistem pemasaran berbasis digital, termasuk pemanfaatan media sosial dan e-commerce. - Fasilitasi keikutsertaan UMKM kreatif dalam pameran dan festival internasional. - Peningkatan skema insentif pajak bagi UMKM kreatif yang berorientasi ekspor. - Pengembangan ekosistem logistik yang mendukung	- Mendorong inovasi produk dan layanan kreatif berbasis teknologi. - Implementasi model bisnis berkelanjutan yang mengutamakan ekonomi sirkular dan ramah lingkungan. - Pengembangan UMKM kreatif berbasis komunitas dan kearifan lokal. - Peningkatan kemitraan strategis dengan sektor pariwisata untuk mendukung ekonomi kreatif. - Optimalisasi platform	- Pemanfaatan big data dan AI untuk analisis pasar dan pengembangan produk UMKM kreatif. - Peningkatan kerja sama dengan industri besar melalui skema kemitraan strategis. - Penguatan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku industri kreatif. - Pembangunan sistem keuangan digital yang lebih inklusif bagi UMKM kreatif. - Pengembangan teknologi blockchain untuk transparansi dan	- Evaluasi dampak kebijakan terhadap pertumbuhan UMKM kreatif dan kesejahteraan pelaku usaha. - Penyempurnaan kebijakan dan strategi berdasarkan hasil evaluasi. - Peningkatan daya saing UMKM kreatif dengan mendorong inovasi berbasis teknologi. - Penguatan peran UMKM kreatif dalam rantai pasok industri - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	inkubator dan akselerator bisnis.	perusahaan besar serta sektor swasta.	distribusi produk kreatif secara efisien.	digital untuk pengelolaan dan ekspansi bisnis UMKM kreatif.	keamanan transaksi bisnis.	pertumbuhan UMKM kreatif.
Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan melalui peningkatan produksi bahan baku, penyiapan infrastruktur dan tenaga kerja terampil dengan membuka peluang investasi dan kemitraan	- Penyusunan regulasi yang mendorong investasi dalam industri hilir komoditas unggulan daerah. - Pemetaan potensi komoditas unggulan di setiap daerah dan identifikasi pasar potensial. - Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku usaha terkait pengolahan komoditas unggulan. - Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor hilirisasi. - Implementasi proyek percontohan hilirisasi di sektor-sektor strategis.	- Pembangunan dan modernisasi infrastruktur pendukung industri hilir, seperti kawasan industri berbasis komoditas. - Penguatan riset dan pengembangan teknologi pengolahan komoditas unggulan. - Fasilitasi transfer teknologi dari pusat penelitian dan perguruan tinggi ke pelaku usaha daerah. - Peningkatan kemitraan antara UMKM, koperasi, dan industri besar dalam rantai nilai hilirisasi. - Insentif pajak bagi industri yang berinvestasi dalam pengolahan komoditas lokal.	- Pengembangan sistem logistik dan distribusi yang efisien untuk mendukung rantai pasok hilirisasi. - Fasilitasi UMKM dan koperasi dalam mendapatkan sertifikasi standar produk nasional dan internasional. - Penguatan branding dan promosi produk hilirisasi berbasis komoditas unggulan daerah. - Pembentukan ekosistem bisnis yang mendukung ekspansi pasar domestik dan global. - Peningkatan program inkubasi dan akselerasi bisnis berbasis hilirisasi komoditas.	- Mendorong diversifikasi produk hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. - Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan manajemen rantai pasok komoditas. - Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk berbasis komoditas unggulan. - Integrasi industri hilir dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung inovasi dan kolaborasi industri hilir.	- Implementasi big data dan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. - Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam industri hilir guna mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. - Pembangunan ekosistem digital untuk mempermudah transaksi dan akses pasar bagi pelaku industri hilir. - Peningkatan kerja sama internasional dalam bidang teknologi dan investasi hilirisasi. - Optimalisasi regulasi terkait standar kualitas, keamanan produk, dan keberlanjutan industri.	- Evaluasi dampak kebijakan hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. - Penyempurnaan kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil evaluasi. - Penguatan daya saing industri hilir. - Meningkatkan integrasi antara sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri manufaktur berbasis hilirisasi. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan hilirisasi komoditas unggulan.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang resiliensi terhadap bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, berkolaborasi dengan pihak swasta dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya serta mendorong kerjasama antar daerah	- Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur berkelanjutan. - Pemetaan kebutuhan infrastruktur strategis di setiap wilayah berdasarkan potensi ekonomi dan sosial. - Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. - Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. - Penerapan standar kualitas dan keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.	- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. - Penguatan akses listrik dan air bersih. - Digitalisasi sistem transportasi dan logistik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. - Peningkatan kapasitas dan modernisasi infrastruktur transportasi publik. - Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur strategis.	- Pengembangan sistem transportasi multimoda untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. - Peningkatan integrasi jaringan jalan untuk menghubungkan pusat ekonomi dan produksi. - Pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus berbasis infrastruktur yang efisien. - Implementasi teknologi smart infrastructure untuk meningkatkan pemeliharaan dan efisiensi operasional.	- Penerapan konsep pembangunan hijau dalam proyek infrastruktur. - Peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam operasional infrastruktur. - Pengurangan emisi karbon melalui transportasi rendah emisi dan elektrifikasi angkutan umum. - Revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur lama untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi.	- Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen infrastruktur dan layanan transportasi. - Penguatan konektivitas internet dan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah. - Implementasi big data dan AI untuk optimasi lalu lintas dan transportasi publik. - Peningkatan sistem keamanan dan ketahanan infrastruktur dari bencana alam dan perubahan iklim. - Penyediaan platform digital untuk integrasi layanan transportasi dan logistik.	- Evaluasi dampak kebijakan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. - Penyempurnaan kebijakan dan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan reformasi birokrasi yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah	- Penyusunan dan penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. - Implementasi reformasi birokrasi berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. - Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan berbasis kompetensi dan digitalisasi. - Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. - Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan strategis.	- Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan efisiensi layanan. - Peningkatan integrasi data dan sistem informasi antar instansi di pemerintahan daerah. - Implementasi layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. - Optimalisasi penggunaan teknologi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui platform digital.	- Implementasi standar akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah berbasis outcome. - Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dengan pendekatan berbasis kinerja. - Penguatan pengawasan keuangan daerah melalui sistem audit digital. - Optimalisasi penerimaan daerah melalui inovasi dalam manajemen pendapatan asli daerah (PAD). - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.	- Penguatan kerja sama antardaerah dalam penyelenggaraan layanan publik. - Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. - Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah. - Implementasi kebijakan berbasis data dalam perumusan program pembangunan daerah. - Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola investasi dan proyek strategis.	- Penguatan sistem meritokrasi dalam pengelolaan SDM aparatur daerah. - Penerapan smart governance untuk meningkatkan efektivitas layanan pemerintahan. - Peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. - Pengembangan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintahan daerah. - Optimalisasi pelayanan terpadu untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik.	- Evaluasi dampak reformasi tata kelola pemerintahan daerah terhadap efisiensi dan efektivitas layanan. - Penyempurnaan kebijakan dan regulasi berbasis hasil evaluasi dan praktik terbaik. - Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. - Peningkatan daya saing daerah melalui pengelolaan pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing dengan penguatan regulasi, SDM yang profesional, perluasan infrastruktur TIK, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.	- Penyusunan dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. - Penguatan standar pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan - Peningkatan kapasitas inovasi daerah. - Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional. - Implementasi sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. - Meningkatkan keterbukaan informasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat.	- Penguatan layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. - Integrasi sistem informasi pelayanan publik untuk mengurangi birokrasi yang berbelit. - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung layanan daring (e-services). - Penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis digital. - Optimalisasi pengaduan masyarakat melalui platform digital dan pusat layanan cepat tanggap.	- Pengembangan mekanisme umpan balik masyarakat dalam menilai kualitas layanan publik. - Penguatan sistem reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik. - Peningkatan transparansi dalam proses pelayanan untuk mencegah praktik korupsi. - Pengembangan program peningkatan kapasitas pelayanan berbasis customer satisfaction. - Meningkatkan inklusivitas layanan publik untuk kelompok rentan dan disabilitas.	- Mendorong inovasi dalam metode dan mekanisme pelayanan publik berbasis teknologi. - Penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan. - Optimalisasi penggunaan kecerdasan buatan dan big data dalam manajemen pelayanan publik. - Peningkatan efisiensi pelayanan dengan mengurangi proses administrasi yang tidak perlu. - Implementasi model layanan berbasis mobile government (m-government) untuk meningkatkan jangkauan layanan.	- Peningkatan kapasitas instansi publik dalam menangani keluhan dan kebutuhan masyarakat secara cepat. - Penguatan integrasi layanan lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas layanan. - Penyediaan fasilitas layanan publik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. - Peningkatan kualitas layanan berbasis data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). - Peningkatan kerja sama dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih maju.	- Evaluasi dampak kebijakan peningkatan pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakat. - Penyempurnaan regulasi dan kebijakan berbasis hasil evaluasi - Penguatan kapasitas daerah dalam mengembangkan model pelayanan yang inovatif. - Meningkatkan daya saing layanan publik - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akses masyarakat dalam program perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi berbagai sektor dan peningkatan kapasitas petugas layanan	- Penyusunan dan harmonisasi regulasi terkait perlindungan sosial berbasis inklusi dan keberlanjutan. - Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. - Penguatan sistem data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan akurasi penerima manfaat. - Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan layanan perlindungan sosial. - Optimalisasi mekanisme penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efisien.	- Implementasi sistem digital dalam registrasi dan distribusi bantuan sosial. - Integrasi sistem informasi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan. - Penguatan mekanisme pengaduan berbasis teknologi untuk memastikan transparansi layanan. - Penyediaan layanan perlindungan sosial berbasis mobile government (m-government). - Pengembangan skema bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.	- Ekspansi cakupan program jaminan sosial untuk kelompok rentan dan pekerja informal. - Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi penerima manfaat perlindungan sosial. - Penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri. - Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam perlindungan sosial. - Pengembangan kebijakan berbasis data dalam penentuan intervensi sosial yang lebih tepat.	- Mendorong inovasi dalam skema perlindungan sosial berbasis kebutuhan masyarakat. - Penguatan skema bantuan sosial berbasis kinerja untuk mendorong kemandirian penerima manfaat. - Optimalisasi dana desa dan program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perlindungan sosial. - Implementasi sistem monitoring berbasis real-time untuk menilai efektivitas program sosial. - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program perlindungan sosial secara mandiri.	- Penguatan sistem perlindungan sosial dalam menghadapi bencana dan krisis ekonomi. - Peningkatan responsivitas layanan sosial terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. - Implementasi kebijakan perlindungan sosial berbasis keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. - Peningkatan kolaborasi global dalam pengembangan sistem perlindungan sosial yang inovatif. - Pemantapan integrasi layanan sosial dengan sektor lain seperti ketenagakerjaan dan perumahan.	- Evaluasi dampak program perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. - Penyempurnaan kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil evaluasi dan praktik terbaik global. - Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. - Peningkatan daya saing sistem perlindungan sosial Indonesia di tingkat internasional. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan perlindungan sosial setelah 2030.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terlatih dan terdistribusi merata.	- Penguatan sistem kesehatan daerah dengan pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. - Peningkatan kapasitas SDM tenaga medis dan paramedis melalui pelatihan berkelanjutan. - Penguatan sistem rujukan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi. - Optimalisasi sistem jaminan kesehatan nasional untuk memastikan akses yang lebih luas. - Persiapan peningkatan tipe rumah sakit umum daerah.	- Implementasi rekam medis elektronik di seluruh fasilitas layanan kesehatan. - Pengembangan sistem telemedicine untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. - Integrasi data kesehatan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. - Peningkatan efisiensi layanan melalui sistem antrian daring dan konsultasi digital. - Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja layanan kesehatan. - Peningkatan tipe rumah sakit umum daerah.	- Ekspansi fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. - Peningkatan distribusi tenaga kesehatan dengan insentif bagi dokter dan tenaga medis di RSUD Siwa. - Penguatan program kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. - Peningkatan layanan kesehatan untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. - Peningkatan cakupan imunisasi dan program pencegahan penyakit menular. - Penguatan program ketahanan pangan dan gizi untuk mendukung kesehatan masyarakat.	- Implementasi sistem kesehatan berbasis nilai (value-based healthcare) untuk meningkatkan efektivitas layanan. - Mendorong penerapan layanan kesehatan berbasis lingkungan sehat dan gaya hidup preventif. - Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan berkualitas.	- Penguatan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan. - Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dalam menangani keadaan darurat. - Penguatan program ketahanan pangan dan gizi untuk mendukung kesehatan masyarakat. - Pengembangan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas.	- Evaluasi dampak kebijakan peningkatan layanan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat. - Penyempurnaan kebijakan dan regulasi berbasis hasil evaluasi. - Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung sistem kesehatan yang lebih inklusif. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Meningkatkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana terstandarisasi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten, serta penguatan pemahaman dan partispasi aktif masyarakat	- Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pendidikan berbasis inklusivitas dan mutu. - Peningkatan akses pendidikan. - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui program sertifikasi dan pelatihan. - Penguatan infrastruktur pendidikan, termasuk fasilitas penunjang. - Optimalisasi distribusi buku dan bahan ajar berkualitas bagi peserta didik.	- Implementasi sistem pembelajaran berbasis digital dan e-learning. - Pengembangan infrastruktur teknologi informasi di sekolah. - Peningkatan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik. - Integrasi platform pendidikan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar. - Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta	- Penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. - Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dan riset. - Mendukung program vokasi dan keterampilan teknis bagi siswa. - Peningkatan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal.	- Pengembangan model pendidikan berbasis kecerdasan buatan dan big data. - Implementasi pendekatan pendidikan personalisasi berdasarkan minat dan bakat siswa. - Optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui sistem beasiswa dan subsidi. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam dunia pendidikan.	- Peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan dan riset. - Mendukung pendidikan berbasis kewirausahaan untuk mendorong kreativitas siswa.	- Evaluasi dampak kebijakan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia. - Penguatan tata kelola pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. - Peningkatan daya saing pendidikan. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk kesinambungan peningkatan kualitas pendidikan.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Peningkatan literasi dan numerasi peserta didik.	dalam pengadaan teknologi pendidikan.		- Penguatan sekolah inklusi dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.		
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, pembinaan, pengembangan kelembagaan dan SDM keagamaan untuk penguatan moderasi beragama	- Mendorong kebijakan dalam rangka aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. - Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat. - Peningkatan sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam pembangunan karakter bangsa. - Mendukung moderasi beragama untuk mencegah intoleransi dan radikalisme. - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah.	- Pengembangan aplikasi dan media edukasi berbasis teknologi untuk pembelajaran agama. - Mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi keagamaan yang positif. - Penguatan program dakwah berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan penyebaran nilai-nilai agama.	- Peningkatan kualitas tenaga pendidik agama dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pembinaan keagamaan. - Peningkatan akses pendidikan agama bagi masyarakat di seluruh wilayah. - Penguatan peran rumah ibadah sebagai pusat pendidikan moral dan sosial masyarakat.	- Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan. - Optimalisasi program keagamaan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan umat. - Penguatan kerja sama lintas agama dalam menciptakan harmoni dan perdamaian sosial. - Penguatan peran organisasi keagamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.	- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman. - Optimalisasi program pembangunan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga dan sekolah. - Peningkatan peran pemuka agama dalam mediasi sosial dan resolusi konflik. - Penguatan keterlibatan umat beragama dalam kegiatan sosial dan lingkungan.	- Peningkatan efektivitas program pendidikan agama dan dakwah berbasis teknologi. - Penguatan tata kelola lembaga keagamaan agar lebih profesional dan inklusif.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan melalui pembinaan, pengembangan kelembagaan, SDM generasi muda dan budaya serta pelestarian seni dan budaya	- Harmonisasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan kebudayaan. - Peningkatan peran lembaga budaya dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. - Revitalisasi infrastruktur kebudayaan, seperti museum, pusat seni, dan kawasan cagar budaya. - Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan budaya lokal. - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya melalui edukasi dan kampanye publik. - Integrasi muatan budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal.	- Implementasi teknologi digital untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan budaya. - Pengembangan platform digital untuk akses mudah terhadap informasi budaya dan seni tradisional. - Peningkatan literasi digital bagi seniman dan budayawan dalam memanfaatkan teknologi. - Optimalisasi media sosial dan platform daring sebagai sarana promosi kebudayaan. - Penguatan program digitalisasi naskah kuno dan arsip budaya.	- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai budaya. - Penguatan program pengenalan seni dan budaya kepada generasi muda. - Optimalisasi peran komunitas budaya dalam pengembangan dan pelestarian warisan budaya. - Peningkatan akses pendidikan budaya bagi masyarakat di daerah terpencil dan terpinggirkan.	- Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, komunitas budaya, dan sektor swasta dalam pengembangan budaya. - Optimalisasi festival budaya sebagai ajang promosi seni dan budaya lokal. - Penguatan kerja sama lintas daerah dan internasional dalam pertukaran budaya. - Pengembangan pariwisata berbasis budaya untuk mendukung ekonomi kreatif. - Peningkatan peran budaya untuk memperkenalkan kearifan lokal.	- Optimalisasi program pengembangan budaya berbasis komunitas untuk memperkuat identitas daerah. - Penguatan peran budaya dalam membangun karakter bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan nasional. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	- Penyempurnaan regulasi berbasis hasil evaluasi dan perkembangan budaya. - Penguatan tata kelola kebudayaan agar lebih profesional, inklusif, dan berkelanjutan. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan regulasi, kolaborasi pihak swasta, dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi limbah plastik dan bahan berbahaya serta pendaurulangan sampah. - Penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. - Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan.	- Penyediaan sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan. - Penyediaan aplikasi untuk pemantauan kualitas udara, air, dan lahan secara real-time. - Penyediaan sistem informasi geospasial untuk perencanaan lingkungan berbasis data. - Peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi. - Penyediaan program bank sampah digital untuk mendorong ekonomi sirkular.	- Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam melalui praktik berkelanjutan. - Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk keberlanjutan ekosistem. - Pengembangan kebijakan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam.	- Pengembangan strategi adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas. - Peningkatan program penghijauan dan reboisasi di wilayah rentan perubahan iklim. - Optimalisasi sistem peringatan dini untuk bencana alam terkait iklim. - Penguatan kerja sama multi sektor dalam pengurangan emisi karbon. - Peningkatan kapasitas riset dan inovasi dalam mitigasi dampak perubahan iklim.	- Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah domestik dan industri. - Optimalisasi pemanfaatan limbah menjadi energi atau produk bernilai ekonomi. - Penguatan regulasi terhadap emisi industri dan transportasi. - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan polusi.	- Evaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang telah diterapkan. - Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi. - Penguatan tata kelola lingkungan yang berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk kesinambungan pengelolaan lingkungan.

Strategi	Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketahanan bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana, dan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	- Penyusunan dan harmonisasi kebijakan mitigasi dan respons bencana berbasis risiko. - Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana. - Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. - Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai risiko bencana dan tindakan darurat. - Pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutan untuk kesiapsiagaan bencana.	- Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kecerdasan buatan. - Penguatan infrastruktur komunikasi untuk mendukung penyebaran informasi bencana. - Pengembangan aplikasi berbasis data untuk pemetaan risiko bencana. - Peningkatan pemanfaatan drone dan satelit untuk pemantauan bencana. - Peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penggunaan data real-time untuk penanganan bencana. - Penguatan sistem drainase dan tata kelola air untuk mengurangi risiko banjir.	- Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat dan relawan. - Pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana. - Penguatan kurikulum pendidikan kebencanaan di sekolah. - Optimalisasi peran komunitas lokal dalam pencegahan dan penanganan bencana. - Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam program tanggap darurat.	- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik yang tahan bencana. - Peningkatan standar bangunan tahan gempa dan bencana lainnya. - Pembangunan tempat evakuasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak. - Peningkatan kapasitas logistik dan penyimpanan bantuan bencana di setiap daerah.	- Penguatan kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan bencana. - Pengembangan kerja sama multi sektor dalam mitigasi dan respons bencana. - Optimalisasi sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. - Penyusunan program pembelajaran dari pengalaman bencana sebelumnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan.	- Evaluasi efektivitas kebijakan dan strategi ketahanan bencana. - Penyempurnaan regulasi berbasis hasil evaluasi dan perkembangan teknologi. - Penguatan sistem tata kelola bencana yang lebih inklusif dan adaptif. - Penyusunan roadmap jangka panjang untuk kesinambungan ketahanan bencana.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program pstrategis nasional serta dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD yang bersifat strategis, inovatif, kolaboratif, integratif, dan implementatif dalam upaya mencapai visi dan misi pembnagunandaerah yang telah ditetapkan.

Adapun program pembanguan daerah Kabupaten Wajo periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui															
			Tujuan 1.1 : Meningkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi berkelanjutan															
			Sasaran 1.1.1 : Berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															
			Sasaran 1.1.2 : Berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi kreatif															
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
			Tujuan 1.2 : Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah berbasis iptekin															
			Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan daerah															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
			Tujuan 1.3 : Meningkatkan daya saing infrastruktur berkelanjutan															
			Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah															
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
			Misi 2: Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern															
			Tujuan 2.1 : Menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat															
			Sasaaran 2.1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif															
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
			Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
			Misi 3: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter															
			Tujuan 3.1: Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan															
			Sasaran 3.1.1: Meningkatnya kualitas layanan perlindungan sosial masyarakat															
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
			Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
1	02	05	PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN															
			Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
			Misi 4 : Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang															
			Tujuan 4.1 : Menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju															
			Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai keagamaan															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
			Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai kebudayaan															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
			Tujuan 4.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
			Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya ketahanan bencana															
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA															

BAB
VII
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Visi dan misi dalampembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program-program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang mnejadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wajo. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Berikut tabel indikasi rencana program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Wajo.

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
1	02	05	PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN															
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN															
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN															
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN															
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN															
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN															
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**															
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN															
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT															
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG															
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH															
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH															
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH															
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN															
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN															
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU															
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN															
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN															
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA															
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA															
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
2	13	08	PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN															
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN															
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN															
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	17	09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI															
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL															
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH															
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP															
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN															
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**															
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA															
3	28	08	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT															
3	**29**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**															
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI															
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN															
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR															
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**															
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
5	**01**		**PERENCANAAN**															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
5	**02**		**KEUANGAN**															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH															
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
7	**01**		**KECAMATAN**															
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															

Kode			Bidang Urusan/Program	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif per Tahun												PD Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
X	**XX**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**															
X	XX	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															

BAB
VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daeraj bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2025-2029, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang diperoleh berdasarkan indikator sasaran strategis RPJMD dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diperoleh dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati *(impact based)* untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. 1
Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SATUAN	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Modal Manusia								
2	Angka Kemiskinan		6, 47						
3	Rasio Gini								
4	Usia Harapan Hidup		68, 32						
5	Harapan Lama Sekolah		13, 32						
6	Rata-Rata Lama Sekolah		7, 46						
7	PDRB per Kapita								
8	Tingkat Pengangguran Terbuka								
9	Indeks Ekonomi Biru								
10	Indeks Ekonomi Hijau								

No	INDIKATOR	SATUAN	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase wirausaha muda								
12	Jumlah Usaha Mikro Baru								
13	Pertumbuhan Ekonomi								
14	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan								
15	Indeks Pelayanan Publik								
16	Indeks Reformasi Birokrasi								
17	Nilai SAKIP								
18	Indek Desa Membangun								
19	Indeks Inovasi Daerah								
20	Indeks SPBE								
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga								
22	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah		100%						
23	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi								
24	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,98						
26	Indeks Risiko Bencana		141,09						
27	Indeks Daya Saing Daerah								
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur								
29	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur								

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraaan urusan pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 terdiri atas 3 aspek yaitu aspke kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum serta indikator kinerja kunci. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. 2
Indikator Kinerja Daerah

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek Geografi dan Demografi								
Laju Pertumbuhan Penduduk								
Rasio Penduduk								
Kepadatan Penduduk								
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)								
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)								
Indeks Ketahanan Pangan								
Skor Pola Pangan Harapan								
Kapasitas Air Baku (m3/detik)								
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman								
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)								
Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)								
Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia								
Indeks pertanaman (IP) padi								
Proporsi sawah irigasi								
Jumlah produksi perikanan budidaya								
Angka Konsumsi Ikan								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Risiko Bencana								
Penurunan Emisi GRK Tahunan (Lihat Aplikasi Aksara)								
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
Laju Pertumbuhan Ekonomi								
PDRB Per Kapita								
Tingkat Kemiskinan (%)			4.,46	4,56	4,46	4,36	4,26	3,26
Indeks Gini			0,36	0,358	0,358	0,357	0,358	0,357
Indeks Pembangunan Manusia								
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			73,35	73,48	73.82	74,01	74,32	74,59
Kesehatan Ibu dan Anak				73,48				
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan			89,4	89,5	89,6	89,7	89,8	89,8
Jumlah Kematian Ibu			5	5	4	4	3	3

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)								
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)			66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)			89,9	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22
Angka Literasi			60	61	62	63	64	65
Angka Numerasi			50	51	52	53	54	55
Rata-Rata Lama Sekolah			7,5	7,51	7,52	7,53	7,54	7,55
Harapan Lama Sekolah			13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (diolah dr data Dinas Capil)								
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan								
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)								
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)								
Persentase benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
terhadap total registrasi								
Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi								
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (KPPA)								
Indeks Perlindungan Anak								
Indeks Ketimpangan Gender								
Aspek Daya Saing Daerah								
Rasio PDRB Industri Pengolahan								
Pengembangan Pariwisata			62	65	65	68	68	68

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum								
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)			80	81	82	83	84	85
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif			255	260	265	270	275	280
jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota			17	17.05	18	18.05	19	19.05
Persentase koperasi sehat di kab/kota								
Return on Aset (ROA) BUMD (%)								
Produktifitas Padi								
Jumlah Produksi Perikanan								
Tingkat Pengangguran Terbuka			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Tingkat Penguasaan IPTEK								
Indeks Kapabilitas Inovasi								
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau								
Indeks Ekonomi Hijau								
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi								
Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok								
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Net Ekspor Barang dan Jasa								
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB								
Tingkat Inflasi Gabungan (%)								
Pertumbuhan Investasi Daerah								
Indeks Pengelolaan keuangan Daerah			92	96	97	98	99	100
Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten								
Indeks Daya Saing Daerah								
Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi								
Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			39.62%	41.17%	42.64%	44.05%	45.38%	46.64%
Indeks Layanan Infrastruktur								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek Pelayanan Umum								
Indeks Reformasi Hukum			96,85%	97,10%	97,35%	97,60%	97,85%	98,10%
Indeks SPBE			2,77	2,85	2,96	3,06	3,11	3,17
Indeks Pelayanan Publik			3%	3,30%	3,50%	3,70%	4%	4,50%
Indeks Survey Penilaian Integritas								
Nilai MCP KPK								
Indeks Maturitas SPIP								
Persentase Penegakan Hukum Peraturan daerah								
Persentase tindak kriminal yang ditangani								
Persentase Perempuan terhadap total anggota DPRD			10%	10%	10%	10%	10%	10%
Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD			2					
Persentase Perempuan pengurus partai politik			34.16%	34.16%	34.16%	34.16%	34.16%	34.16%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase desa mandiri								
Indikator Kinerja Kunci								
Pendidikan								
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A			110	110	100	100	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B			100	100	90	91	92	93
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A			5100	5200	5300	5400	5500	5600
Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP			5100	5200	5300	5400	5500	5600
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			100	100	95	96	97	98
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			100	100	90	91	92	93
Angka partisipasi sekolah (APS) PAUD								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A			100	100	100	100	100	100
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			100	100	85	86	87	88
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI			0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Angka Kelulusan (AL) SD/MI			100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			100	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs			100	100	100	100	100	100
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			85	86	87	88	89	90
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			85	86	87	88	89	90

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			100	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA			100	100	100	100	100	100
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)			75	75	75	75	75	75
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar			80	81	82	83	84	85
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki			100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)			100	100	100	100	100	100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			100	100	100	100	100	100
Kesehatan								
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			8	8	7	7	6	6
Angka kelangsungan hidup bayi			4960	4960	4965	4965	4970	4970
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			8	8	7	7	6	6
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			7	7	6	6	5	5
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			7	7	6	6	5	5
Rasio posyandu per satuan balita			1/30 balita	1/34 balita	1/38 balita	1/42 balita	1/45 balita	1/49 balita

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			1					
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			1	1	1	1	1	1
Rasio dokter per satuan penduduk			0,33	0,36	0,39	0,44	0,48	0,53
Rasio tenaga medis per satuan penduduk			0,43	0,47	0,52	0,56	0,6	0,64
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			90	90	95	95	100	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			89	89	90	90	93	100
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			80	90	80	80	80	80
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			100	100	100	100	100	100
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk			2	2	2	2	2	2
Cakupan balita pneumonia yang ditangani			28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)								
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)								
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS			69,45	75,45	81,45	87,45	93,45	99,45

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			74,5	75,45	86,45	97,45	98	90
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani			100	100	100	100	100	100
Angka kejadian Malaria			<1 per mil	<1 per mil	<1 per mil	<1 per mil	<1 per mil	<1 per mil
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat			100	100	100	100	100	100
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS								
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin								
Cakupan kunjungan bayi			95	95	98	98	99	100
Cakupan puskesmas			164,29	164,29	164,29	164,29	164,29	164,29
Cakupan pembantu puskesmas			28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4			90	92	94	96	98	100
Cakupan pelayanan nifas			89	89	90	90	93	100
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			60	62	64	66	68	70
Cakupan pelayanan anak balita			95	95	96	96	98	100

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin			100	100	100	100	100	100
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat			100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin								
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			100	100	100	100	100	100
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik								
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk								
Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4								
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)								
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)								
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase rumah tinggal bersanitasi								
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar								
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat								
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor								
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik								
Rasio Jaringan Irigasi								
Persentase penduduk berakses air minum								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan								
Persentase areal kawasan kumuh								
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan								
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk								
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk								
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB								
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan								
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan								
Ketaatan terhadap RTRW								
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
Rasio rumah layak huni			0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Rasio permukiman layak huni			0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946
Cakupan ketersediaan rumah layak huni			0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			39.62%	41.17%	42.64%	44.05%	45.43%	44.66%
Persentase pemukiman yang tertata			60.29%	60.30%	60.31%	60.32%	60.33%	60.34%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase lingkungan pemukiman kumuh			0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			4.99%	5.36%	5.72%	6.09%	6.09%	6.82%
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			2.28%	2.27%	2.27%	2.27%	2.26%	2.26%
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU			21.98%	22.53%	23.08%	23.35%	23.63%	24.18%
Sosial								
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			100	100	100	100	100	100
Persentase PMKS yang tertangani			100	100	100	100	100	100
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya			100	100	100	100	100	100
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat			100	100	100	100	100	100
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap			100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			100	100	100	100	100	100
Tenaga Kerja								
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun			5	5	5	5	5	5
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			5	5	5	5	5	5
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			200	200	200	200	200	200
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek			6500	6500	6500	6500	6500	6500

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah			0	0	0	0	0	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			40	40	40	40	40	40
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			10	10	10	10	10	10
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			0	0	0	0	0	0
Rasio lulusan S1/S2/S3								
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
Persentase koperasi aktif			64,60%	64,67%	64,90%	65,12%	65,35%	65,56%
Persentase UKM non BPR/LKM aktif								
Persentase BPR/LKM aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Usaha Mikro dan Kecil			3,00%	3,03%	3,06%	3,10%	3,12%	3,18%
Penanaman Modal								
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			4,777	5,015	5,265	5,528	5,804	6,094
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			516,364,795,859	542,183,035,651	569,292,187,433	597,756,796,804	627,644,636,644	659,026,868,476
Rasio daya serap tenaga kerja			02.25	02.36	02.47	02.59	0,132638889	0,141666667
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			20%	40%	65%	80%	95%	100%
Kepemudaan dan Olah Raga								
Persentase organisasi pemuda yang aktif			36%	37%	38%	39%	40%	41%
Persentase wirausaha muda			56%	57%	58%	59%	60%	61%
Cakupan pembinaan olahraga								
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan pembinaan atlet muda								
Jumlah prestasi olahraga								
Pertanian								
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB			21,78	21,78	22,78	22,78	23,78	23,78
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			66,27	66,28	66,29	66,29	66,29	66,29
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB			21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB			100	100	100	100	100	100
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			5,16	5,17	5,18	5,19	5,2	5,3
Cakupan bina kelompok petani			52,92	53,92	54,92	55,92	56,92	57,92

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perdagangan								
Ekspor Bersih Perdagangan								
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal								
Perindustrian								
Cakupan bina kelompok pengrajin								
Kontribusi Industri terhadap PDRB								
Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri								
Pertumbuhan Industri								
Kelautan dan Perikanan								
Produksi perikanan			568.425,17	574.139,68	578.025,98	581.881,28	585.864,79	589.911,79
Konsumsi ikan			25.237.824	25.742.580	26.257.431	26.782.579	27.318.230	27.853.881
Cakupan bina kelompok nelayan			30	35	40	45	50	55

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produksi perikanan kelompok nelayan			378.476	381.882	385.319	388.786	392.285	395.722
Nilai tukar nelayan			108,6	108,7	108,8	108,9	109	109,1
Pariwisata								
Kunjungan wisata			372,5	403	428,3	453,7	478,9	504,05
Lama kunjungan Wisata			1 Hari	1,1 Hari	1,1 Hari	1,2 Hari	1,2 Hari	1,2 Hari
PAD sektor pariwisata			0,60%	0,62%	0,64%	0,66%	0,68%	0,20%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk			1	1	1	1	1	1
Rasio bayi berakte kelahiran			1	1	1	1	1	1
Rasio pasangan berakte nikah			0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penerbitan akta kelahiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik								
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)								
Persentase LSM aktif								
Persentase LPM Berprestasi								
Persentase PKK aktif								
Persentase Posyandu aktif								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat								
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat								
Perencanaan Pembangunan								
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			92%	93%	94%	95%	96%	97%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			92%	93%	94%	95%	96%	97%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW								
Keuangan								
Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA			5%	5%	5%	5%	5%	5%
Persentase SILPA terhadap APBD			5%	5%	5%	5%	5%	5%
Persentase belanja pendidikan (20%)			20%	20%	20%	20%	20%	20%
Persentase belanja kesehatan (10%)			10%	10%	10%	10%	10%	10%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :			60%	60%	60%	60%	60%	60%
			40%	40%	40%	40%	40%	40%
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa			0.49%	0.56%	0.63%	0.70%	0.77%	0.84%
Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			7,85	7,9	7,94	7,98	8	8,05
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			16,45	17	17,15	17,3	17,45	18
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural			23,75	23,85	23,87	23,9	23,95	24

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah			31	31	31	31	31	31
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah			1439	1439	1439	1439	1439	1439
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			4334	4133	4012	3845	3720	3535
Penelitian dan pengembangan								
Persentase implementasi rencana riset dan inovasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			20%	30%	40%	50%	60%	70%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengawasan								
Persentase tindak lanjut temuan								
Persentase pelanggaran pegawai								
Jumlah temuan BPK								
Sekretariat Dewan								
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota			ada	ada	ada	ada	ada	ada

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			ada	ada	ada	ada	ada	ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			ada	ada	ada	ada	ada	ada
Perpustakaan								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			2000	2000	3000	3000	3000	4000
Jumlah Perpustakaan			524	524	524	524	524	524
Rasio perpustakaan persatuan penduduk			1,31	1,37	1,38	1,37	1,38	1,39
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun			167	183	208	250	266	292
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan			12722	12772	12822	12872	12922	12972
Kearsipan								
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			40%	50%	60%	80%	90%	100%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan			2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Statistik								
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Buku ”kabupaten dalam angka”			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”PDRB”			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persandian								
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100
Komunikasi dan Informatika								
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Telekomunikasi			0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon			93,15	93,4				
Proporsi rumah tangga dengan akses internet			0,581	0,591	0,6	0,615	0,635	0,66

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi			0,493	0,502	0,512	0,521	0,532	0,541
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			30%	30%	30%	30%	30%	30%
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			30%	30%	30%	30%	30%	30%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio KDRT			10	10	10	10	10	10
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur			1%	1%	1%	1%	1%	1%
Partisipasi angkatan kerja perempuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			40	40	40	40	40	40
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.			50	50	50	50	50	50
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			20	20	20	20	20	20
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			15	15	15	15	15	15
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP								
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun								
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian								
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Total Fertility Rate (TFR)			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,66

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			7	7	7	7	7	8
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			2	2	2	2	2	2
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			4	4	4	4	4	4
Rata-rata jumlah anak per keluarga			2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ratio Akseptor KB			67,43	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49			59,4	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)			31,05	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			33	33,01	33,01	33,01	33,01	33,01
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			3454	3455	3455	3455	3455	3455
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			14,99	14,99	15	15	15	15

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			67,74	67,75	67,75	67,75	67,75	67,75
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			2778	2780	2780	2780	2780	2780
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB			1547	1549	1549	1549	1549	1549
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB			365	365	365	365	365	365
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			1	1	1	1	1	1
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa			1023	1023	1023	1023	1023	1025

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri			16	16	16	16	16	17
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan			5354	5354	5354	5354	5354	5355

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
tumbuh kembang anak								
Rata-rata usia kawin pertama wanita			20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes			1%	1%	1%	1%	1%	1%
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)			91.28%	91.36%	91.52%	91.76%	91.92%	92.32%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
ketentraman, keindahan)								
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota			42.28%	42.28%	49.33%	49.33%	49.33%	56.38%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			95.56%	96.15%	97.96%	98.15%	100%	100%
Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Kriminalitas yang Tertangani			11.39	10,94	10,75	10,26	9,93	9,81
Kebudayaan								
Penyelenggaraan festival seni dan budaya			4	5	6	7	8	9
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			3	5	7	9	11	13

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			2	4	6	8	10	12
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			2	3	4	5	6	7
Pangan								
Ketersediaan pangan utama			97,99	98,99	99,99	100,9	101,9	102
Ketersediaan energi dan protein perkapita			190,49	191	191	191	191	191
			9053	9054	9054	9055	9055	9056
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup								
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota				1	1			
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota			1				1	
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air			73,16	73,36	73,56	73,76	73,96	74,16

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara			78,66	78,96	79,26	79,56	79,86	80,16
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan			53,76	53,83	53,9	53,96	54,03	54,1
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			26%	27%	28%	29%	30%	30%
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			6	6	6	6	6	6

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup			14	14	14	14	14	14
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Timbulan sampah yang ditangani			73% (41.464,949)	74% (42.032,926)	73% (41.464,949)	72% (40.896,936)	71% (40.328,923)	70% (39.760,91)
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R			24%	25%	26%	27%	28%	30%
Persentase cakupan area pelayanan			26%	33%	40%	47%	67%	75%

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota			77.33% (43.958,52 Ton)	81,89% (46.514,58 Ton)	86,39% (48.502,63 Ton)	90,39% (51.342,69 Ton)	95,39% (54.182,76 Ton)	99.68% (56.619,53 Ton)
Perhubungan								
Jumlah arus penumpang angkutan umum								
Rasio ijin trayek								
Jumlah uji kir angkutan umum								
Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal								
Persentase layanan angkutan darat								
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum								
Pemasangan Rambu-rambu								
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan								

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun								

BAB
IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yang berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-20245, RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042.

RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen bersama seluruh *srakeholders* pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi pedoman Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Wajo, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen RPJMD sangat tergantung dari komitmen, kerja keras dan dukungan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dalam menjaga konsistensi RPJMD berserta impelementasi tahunan rencana pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.